

TUGAS AKHIR

STUDI KELAYAKAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN KECAMATAN TANAH GROGOT

(Studi kasus :Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur)

Oleh :

HALIMURRAHMAN

10.24.056



**PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2015**



FT. BNI (PERSEKHO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

PERSETUJUAN SKRIPSI

Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran
Kecamatan Tanah Grogot
(Studi Kasus : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik Planologi S-I
Institut Teknologi Nasional Malang

Disusun oleh:
Halimurrahman

10.24.056

Menyetujui

Penahibing I



Maria C. Endaryati, ST., MIUEM

Pembimbing II


Agung Widiaksono, ST., MTP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)




Ida Soewarni, ST., MT.

NIP. Y. 1039 600 293



PT BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangle, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PENGESAHAN

Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran
Kecamatan Tanah Grogot
(Studi Kasus : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Skripsi Dipertahankan Dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi
Jenjang Strata Satu (S-1)

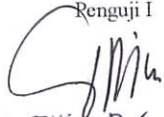
Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Agustus 2015

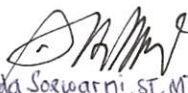
Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh:
Halimurrahman
10.24.056

Disahkan oleh,
Penguji II

Penguji III

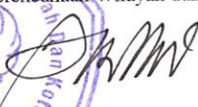
Renguji I

Ir. Titik Perwati, MT


Ida Soewarni, ST, MT


Endang Budis, ST, MT

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)




Ida Soewarni, ST, MT
NIP. Y.1039 600 293



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hutung), Fax: (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax: (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Halimurrahman

Nim : 10.24.056

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2015


Judul : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap
Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot
(Studi Kasus :Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- Judul & Sasaran (tdk seimbang)
- Tinjauan pustaka, misal Hal 17. Masih 2 faktor didataalkan nabeva
- Metode : • 4/analisa aspirasi? → kuisisioner = sampel?
• hal 59-60 → masukkan di Bab II (Metode)
- Hal 89 tabel 5.9. Aspirasi masyarakat.
- Hal. 92 → hasil analisa?

Malang, Agustus 2015

Dosen Penguji I


Ir. Titik Pærwati, MT



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553016 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Tolp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Halimurrahman

Nim : 10.24.056

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2015

Judul : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap
Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot
(Studi Kasus : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Terdapat kekurangan yang meliputi :

- PP No 19 / 2008

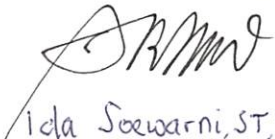
- Quisioner atau wawancara ?

- Rekapitulasi hasil wawancara

- Kelayakan indikator

Malang, Agustus 2015

Dosen Penguji II


Ida Soewarni, ST, MT



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karangic, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERBAIKAN

Sidang Komprehensif Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) :

Nama : Halimurrahman

Nim : 10.24.056

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2015

Judul : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap
Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot
(Studi Kasus : Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Terdapat kekurangan yang meliputi :

✓ Hub. antarfasaan ?

✓ Hub/kaitan dg daerah asal pemekaran ???

✓ cek ulang rumusan masalah tentang fasasan!


✓ standar / teori kelayakan pemekaran + penilaian!

✓ poin & detail analisis ?!

✓ layde vs mampu!!

Malang, Agustus 2015

Dosen Penguji III


Endang Budi S, ST, MT



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Halimurrahman

Nim : 10.24.056

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (Teknik Planologi)

Judul Skripsi : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap
Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan/plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan


Halimurrahman
NIM : 10.24.056

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
C9103ADF307198697
6000
ENAM RIBU RUPIAH

“Study Feasibility and Aspiration Of Society to Splitting Sub District Tanah Grogot”

ABSTRACTION

Various efforts to improve the quality of public services, among others, with the approach distance between the public service and society well as the proportional distribution of workload is one important requirement in improving the welfare of society. There are various reasons that encourage the increasing desire to do region split. Formally it was triggered by desire to increase the reach of public services, especially for large areas. The voice and role of the community becomes a key condition for the sustainability of a process of region split. This is consistent with essence region split oriented of the improvement of public service and public welfare. Therefore, clearly outlined the role of public in the form of legislation referendum to determine the choice whether or not to be any separations.

Besides the aspirations of society as one of the conditions for an expansion process, weighting counting in determining whether or not a region divided by taking into account the following factors : population, an area, span of control, economy activity and Availability Infrastructures. Calculation of the weighting and scoring refers to Government Regulation No. 19 of 2008 on the Subdistrict. After calculation of weighting and scoring the value of each indicator, then known value the feasibility of the main district and new district to split. The result is “Mampu” to become the main district and “Mampu” to become the new district.

Keywords : Splitting Sub District, The Aspirations Of Society, Feasibility

“Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot”

ABSTRAKSI

Berbagai usaha meningkatkan kualitas layanan publik antara lain dengan pendekatan jarak antara pelayanan publik dan masyarakat serta pembagian beban kerja yang proporsional merupakan salah satu syarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai alasan yang mendorong meningkatnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Secara formal keinginan itu dipicu guna meningkatkan jangkauan pelayanan publik, terutama untuk daerah dengan luas cukup besar. Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah.

Selain aspirasi masyarakat sebagai salah satu syarat untuk suatu proses pemekaran, dilakukan perhitungan pembobotan dalam menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah dimekarkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : Kependudukan, Luas Daerah, Rentang Kendali, Aktivitas Perekonomian dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Perhitungan pembobotan dan skoring tersebut mengacu pada pedoman PP No 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan. Setelah dilakukan perhitungan pembobotan dan skoring terhadap nilai tiap indikator, maka diketahui nilai kelayakan dari kecamatan induk dan calon kecamatan baru untuk berpisah atau mekar. Dengan hasil “Mampu” untuk tetap menjadi kecamatan induk dan “Mampu” menjadi calon kecamatan baru.

Kata Kunci : Pemekaran Kecamatan, Aspirasi Masyarakat, Kelayakan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir dengan judul “ Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot” dapat diselesaikan. Laporan tugas akhir merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang dalam menyelesaikan program S-1.

Tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah menyangkut keinginan masyarakat terhadap pemekaran kecamatan Tanah Grogot yaitu :

1. Adanya ketimpangan pembangunan disetiap desa yang terdapat di Kecamatan Tanah Grogot.
2. Kualitas pelayanan yang kurang maksimal dan tidak merata disetiap desa yang membuat masyarakat menginginkan adanya pemekaran kecamatan.
3. Adanya keinginan masyarakat untuk dilakukan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

Dengan terselesainya penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Maria C Enderwati, ST, MIUEM selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan dan dorongan serta petunjuk dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Agung Witjaksono, ST, MT., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir.
3. Ibu Ida Soewarni ST, MT., selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang yang selalu memberikan dukungan dan spirit dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Dosen-dosen Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang membantu proses perkuliahan dan pembelajaran selama di jurusan PWK ITN Malang.
5. Orang tua, dan keluarga yang telah memberikan dukungan materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini.
6. Teman-teman Plano Revolution Angkatan 2010 yang banyak mendukung selama proses perkuliahan dan tugas akhir ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya kepada saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, studi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi tambahan pengalaman dalam menulis karya ilmiah di waktu yang akan datang. Akhir kata semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Terimakasih.

Malang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAS ISI

Abstraction.....	i
Abstraksi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	viii
Daftar Diagram.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	6
1.3.1. Tujuan.....	6
1.3.2. Sasaran.....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	7
1.4.2. Ruang Lingkup Materi.....	7
1.5. Keluaran dan Manfaat yang diharapkan.....	8
1.5.1. Keluaran yang diharapkan.....	8
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Wilayah.....	13
2.2. Pemekaran Wilayah Kecamatan.....	13
2.3. Aspirasi Masyarakat.....	15
2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Wilayah.....	17
2.4.1. Kependudukan.....	17
2.4.2. Luas Daerah.....	18
2.4.3. Rentang Kendali.....	18
2.4.4. Aktivitas Perekonomian.....	19
2.4.5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	20
2.5. Landasan Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data	28
3.1.1. Survey Data Primer.....	28
3.1.2. Survey Data Sekunder.....	29
3.2. Metode Analisa	29
3.2.1. Metode Analisa Karakteristik Wilayah	29
3.2.2. Metode Analisa Aspirasi Masyarakat.....	30
3.2.3. Metode Analisa Kelayakan Pemekaran Kecamatan	31

BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANAH GROGOT

4.1. Kependudukan Kecamatan Tanah Grogot.....	35
4.2. Geografis Kecamatan Tanah Grogot.....	36
4.2.1. Luas Wilayah Kecamatan Tanah Grogot.....	36
4.2.2. Rentang Kendali	39
4.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanah Grogot.....	40
4.3.1. Sarana Pendidikan	40
4.3.2. Sarana Kesehatan.....	41
4.3.3. Sarana Peribadatan.....	42
4.3.4. Sarana Pelayanan Umum.....	43
4.3.5. Utilitas	44
4.4. Perekonomian.....	46
4.4.1. Lembaga Keuangan dan Non Keuangan	46
4.4.2. Perdagangan dan Jasa.....	46
4.5. Penjaringan Aspirasi Masyarakat	47

BAB V ANALISA DAN HASIL

5.1. Analisa Karakter Wilayah	58
5.1.1. Kependudukan.....	59
5.1.2. Luas Wilayah.....	63
5.1.3. Rentang Kendali	64
5.1.4. Sarana dan Prasarana	67
5.1.5. Perekonomian.....	79
5.2. Analisa Aspirasi Masyarakat.....	81
5.2.1. Keinginan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	81
5.2.2. Design Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	88
5.3. Analisa Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	103
5.3.1. Perhitungan Indikator Tiap Desa	103
5.3.2. Perhitungan Kelayakan Pemekaran Kecamatan.....	112

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	122
6.1.1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot.....	122
6.1.2. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	123
6.1.3. Menguji kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot..	123
6.2. Rekomendasi.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Pikir.....	10
--------------------------------	----

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	36
Diagram 5.1. Pendapat Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Batas Administrasi Kabupaten Paser.....	11
Gambar 1.2. Batas Administrasi Kecamatan Tanah Grogot.....	12
Gambar 4.1. Batas Administrasi Kecamatan Tanah Grogot.....	38
Gambar 5.1. Diagram Indeks Kepadatan Penduduk Kecamatan Tanah Grogot.....	61
Gambar 5.2. Kepadatan Penduduk.....	62
Gambar 5.3. Rentang Kendali di Kecamatan Tanah Grogot.....	65
Gambar 5.4. Kondisi Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Grogot.....	69
Gambar 5.5. Radius Sarana Pendidikan (SD).....	70
Gambar 5.6. Radius Sarana Pendidikan (SMP).....	71
Gambar 5.7. Radius Sarana Pendidikan (SMA).....	72
Gambar 5.8. Kondisi Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot.....	75
Gambar 5.9. Persebaran Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot....	76
Gambar 5.10. Perbandingan Kondisi Jalan Kecamatan Tanah Grogot.....	76
Gambar 5.11. Tahapan Perbaikan Ruas Jalan.....	77
Gambar 5.12. Proses Perhitungan Distribusi Frekuensi.....	94
Gambar 5.13. Pembagian Kecamatan Tanah Grogot (Setelah Pemekaran).....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penentuan Variabel.....	20
Tabel 2.2	Variabel Penelitian.....	23
Tabel 3.1	Penentuan Bobot untuk Setiap Indikator Pembentukan Kecamatan.....	32
Tabel 3.2	Tingkat Kelayakan Pemekaran Kecamatan	33
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	35
Tabel 4.2	Luas Wilayah Kecamatan Tanah Grogot.....	37
Tabel 4.3	Rentang Kendali Kecamatan Tanah Grogot	39
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	41
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	42
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	43
Tabel 4.7	Jumlah Sarana Lapangan Olahraga Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013.....	44
Tabel 4.8	Jumlah Sarana Balai Pertemuan Kecamatan Tanah Grogot.....	45
Tabel 4.9	Jumlah Pelanggan Listrik Kecamatan Tanah Grogot	45
Tabel 4.10	Jumlah Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013.....	46
Tabel 4.11	Jumlah Sarana Perdagangan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	47
Tabel 4.12	Pendapat dan Alasan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	54
Tabel 5.1	Persebaran Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	60
Tabel 5.2	Indeks Kepadatan Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013	61
Tabel 5.3	Tingkat Aksesibilitas Kecamatan Tanah Grogot.....	66
Tabel 5.4	Indeks Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Grogot.....	68
Tabel 5.5	Indeks Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot	73
Tabel 5.6	Indeks Sarana Perdagangan Kecamatan Tanah Grogot	80
Tabel 5.7	Faktor Pendorong Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot Berdasarkan Aspirasi Masyarakat.....	82
Tabel 5.8	Keinginan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	86
Tabel 5.9	Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.....	89
Tabel 5.10	Pemilihan Kecamatan Menurut Masyarakat	93

Tabel 5.11	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Janju.....	94
Tabel 5.12	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sempulang.....	95
Tabel 5.13	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tepian Batang.....	95
Tabel 5.14	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Tanah Grogot.....	95
Tabel 5.15	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanah Periuk	96
Tabel 5.16	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Pepara	96
Tabel 5.17	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Tuak.....	97
Tabel 5.18	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Rantau Panjang.....	97
Tabel 5.19	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Jone.....	97
Tabel 5.20	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Padang Pengrapat.....	98
Tabel 5.21	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Muara Pasir	98
Tabel 5.22	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Perepat	99
Tabel 5.23	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Pulau Rantau	99
Tabel 5.24	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Langir.....	99
Tabel 5.25	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Senaken.....	100
Tabel 5.26	Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tapis	100
Tabel 5.27	Design Penataan dan Pemekaran Kecamatan.....	101
Tabel 5.28	Indikator Kependudukan Kecamatan Induk.....	103
Tabel 5.29	Indikator Kependudukan Calon Kecamatan Baru	104
Tabel 5.30	Indikator Luas Wilayah Kecamatan Induk	105
Tabel 5.31	Indikator Luas Wilayah Calon Kecamatan Baru.....	105
Tabel 5.32	Indikator Rentang Kendali Kecamatan Induk.....	106
Tabel 5.33	Indikator Rentang Kendali Calon Kecamatan Baru.....	106
Tabel 5.34	Indikator Aktivitas Perekonomian Kecamatan Induk.....	107
Tabel 5.35	Indikator Aktivitas Perekonomian Calon Kecamatan Baru	107
Tabel 5.36	Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana	

	Kecamatan Induk	108
Tabel 5.37	Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana Calon Kecamatan Baru	110
Tabel 5.38	Perhitungan Kelayakan Pemekaran Kecamatan Induk	115
Tabel 5.39	Perhitungan Kelayakan Pemekaran Calon Kecamatan Baru	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai usaha meningkatkan kualitas layanan publik antara lain dengan pendekatan jarak antara pelayanan publik dan masyarakat serta pembagian beban kerja yang proporsional merupakan salah satu syarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk pembentukan kecamatan harus memenuhi syarat dasar, syarat teknis dan syarat administratif. Secara administratif, pembentukan kecamatan dan kabupaten baru akan mengafirmasi salah satu tujuan penting dari keseluruhan proses pemekaran yakni pendekatan layanan publik dengan pembagian beban kerja yang proporsional dan tidak mendiskriminasikan masyarakat ke dalam sekat layanan jauh atau dekat.

Luasnya wilayah pemerintahan dalam suatu pemerintahan daerah setingkat kabupaten menjadi persoalan sendiri dalam hal pemerataan pelayanan terhadap masyarakat. Kegiatan pemerintahan yang terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu cenderung membuat akses pelayanan terabaikan pada daerah tertentu, bahkan cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun pendidikan masyarakat. Kondisi ini memicu kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan akses pembangunan yang merata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang¹.

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah.

¹ Ratty Puspitasari, 2014, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah baru, Jom FISIP Vol. 1 No. 2, Hlm 2.

“Untuk melakukan sebuah pemekaran wilayah kecamatan baru, nilai-nilai historis dan sosial menjadi salah satu pertimbangan serta perlu ada sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dengan kajian teknis” ungkap Asisten I Sekkab Bidang Pemerintahan Heriansyah Idris (Kaltimpost, Kab.Paser, 14 April 2014)”

Keinginan dalam mempermudah peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan kehidupan demokrasi, memperpendek rentang kendali pelayanan, percepatan pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan keamanan dan ketertiban, perlu adanya pemekaran wilayah. Secara lebih rinci, pada umumnya pemekaran (tentu juga penghapusan dan penggabungan) daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan keterlibatan; dan
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Kabupaten Paser merupakan salah satu wilayah potensial dengan luas wilayah daratan dan tingkat populasi penduduk yang tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Rentang wilayah yang cukup luas, dengan kondisi sumber daya alam yang cukup memadai menjadikan kajian pemekaran di Kabupaten ini merupakan sesuatu yang niscaya. Luas Wilayah Kabupaten Paser adalah seluas 11.603,94 Km². Luas ini terdistribusi ke 10 (sepuluh) kecamatan dengan 141 desa/kelurahan. Selain itu konsentrasi pusat administrasi Kecamatan yang memiliki rentang wilayah yang cukup luas menjadikan layanan publik tidak maksimal. Diferensiasi luas wilayah yang diperparah dengan konsentrasi populasi dan juga kondisi sebaran potensi sumber daya alam turut memiriskan pemerataan kesejahteraan di wilayah ini.

“Latar belakang pemekaran dan penataan kecamatan ini, selain untuk mendekatkan pelayanan, karena adanya desa-desa yang terisolir, juga sebagai upaya memajukan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan desa,” ungkap Asisten I Sekkab Bidang Pemerintahan Heriansyah Idris (Kaltimpost, Kab.Paser, 14 April 2014)”

Beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah Kecamatan Kabupaten Paser sekarang menjadi isu penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yakni:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berdasarkan potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

“Masyarakat di empat kecamatan sudah sejak dari tahun 2006 lalu menuntut pemekaran menjadi Kabupaten Paser Tengah,” kata Ketua Harian Dewan Presidium dan Humas Tim Sukses Pemekaran Ardiansyah (Kamis, 20 Desember 2012: Empat Kecamatan Paser Tuntut Pemekaran: Kaltimpost)”

Hal terakhir yang menjadi pra-syarat utama terbentuknya sebuah wilayah pemekaran baru adalah syarat fisik. Untuk membentuk sebuah Provinsi baru minimal ada 5 (lima) Kabupaten, dan selanjutnya untuk membentuk sebuah Kabupaten baru minimal ada 5 (lima) Kecamatan. Untuk membentuk sebuah Kota minimal ada 4 (empat) Kecamatan termasuk lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan, dan pembagian struktur layanan yang jelas².

Pembentuk wilayah baru dalam rangka memenuhi syarat pemekaran Kabupaten baru, maka dilakukan pemekaran kecamatan. Kondisi yang ada saat ini adalah terjadi kesenjangan wilayah antara desa di Kecamatan Tanah Grogot, sehingga pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan luasnya wilayah topografi, sehingga butuh penambahan wilayah administrasi di kecamatan ini untuk memaksimalkan pelayanan. Salah satunya adalah Kecamatan Tanah Grogot sebagai ibukota Kabupaten Paser yang terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa. Kecamatan Tanah Grogot sebagai ibukota

² Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 8

Kabupaten Paser memiliki fungsi pusat pelayanan skala kabupaten dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik dan lengkap. Kecamatan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena terletak pada lokasi yang sangat strategis dan didukung dengan kondisi topografi yang datar. Kondisi seperti ini menjadi daya tarik penduduk untuk bermukim dan melakukan segala aktivitas di Kecamatan Tanah Grogot. Potensi ekonomi yang berkembang di Kecamatan Tanah Grogot berupa perdagangan dan jasa di Kelurahan Tanah Grogot, Desa Senaken, dan Desa Jone, selain itu sebagian besar masih berupa lahan pertanian di beberapa desa seperti Desa Sungai Tuak, Desa Rantau Panjang, Desa Pulau Rantau, dan Desa Pepara.

Namun sebagai ibukota kabupaten, kondisi pemerataan pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot masih terlihat timpang, terutama di desa-desa tertinggal dan kurang tersentuh pembangunan, biasanya desa-desa ini sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian. Menurut Laminudin sebagai kepala Desa Jone, daerah yang dianggapnya terisolir atau jauh dari pembangunan ada 5 desa, yaitu Desa Perepat, Desa Sungai Lait, Desa Pulau Rantau, Desa Surobat dan Desa Lori. Kelima desa ini adalah desa yang berada di kawasan pesisir. Desa Perepat dan Desa Pulau Rantau merupakan desa yang berada di Kecamatan Tanah Grogot, hal ini menunjukkan masih ada desa yang terisolir di ibukota Kabupaten Paser. Adanya ketimpangan pembangunan khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Grogot dengan kecamatan lainnya menjadikan alasan untuk berpisah dengan wilayah yang lain.

Ketimpangan antar wilayah di Kecamatan Tanah Grogot ditunjukkan dengan kurang ketersediaan pelayanan publik seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, jaringan jalan yang baik, utilitas seperti listrik dan air bersih. Jika meninjau pada permasalahan aksesibilitas, masyarakat dari desa-desa tertinggal, memiliki jarak yang relatif dekat dengan pusat Kecamatan Tanah Grogot, namun harus menempuh waktu yang cukup lama kurang lebih 60 menit untuk menjangkau akses pelayanan publik. Terlihat bahwa adanya jaringan jalan yang sangat buruk di beberapa desa yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan. Fakta yang terjadi yaitu di Desa Perepat melihat kondisi jalan yang rusak akibat diguyur hujan, mengakibatkan jalan tersebut sulit untuk dilalui kendaraan, sehingga memakan waktu yang lama untuk mendapatkan akses pelayanan publik di pusat kota.

Ketimpangan juga terlihat dari ketersediaan sarana pendidikan belum menunjukkan persebaran yang sesuai dengan jumlah penduduk baik antar desa maupun antar kecamatan. Selain itu juga, penyebaran sarana

pendidikan belum merata antar desa maupun antar kecamatan. Masih banyak desa-desa yang belum memiliki SLTP dan SLTA. Saat ini sarana pendidikan hanya terpusat di Kelurahan Tanah Grogot, sehingga siswa dari desa-desa sekitar yang masih masuk dalam Kecamatan Tanah Grogot, melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya harus menuju ke pusat Kecamatan Tanah Grogot. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sarana pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi selain TK dan SD.

Setelah dilakukannya pemekaran kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai usaha meningkatkan kualitas layanan publik antara lain dengan pendekatan jarak untuk kemudahan dalam wilayah pelayanan sehingga cakupan menjadi lebih sempit antara pelayanan publik dan masyarakat serta pembagian beban kerja yang proporsional merupakan salah satu syarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara administratif, pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser akan mengafirmasi salah satu tujuan penting dari keseluruhan proses pemekaran tersebut yakni pendekatan layanan publik dengan pembagian beban kerja yang proporsional dan tidak mendiskriminasikan masyarakat ke dalam skat layanan jauh atau dekat.

Suara dan peran masyarakat sangat penting dalam hal pembangunan karena masyarakat merupakan objek dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan agar memahami kebutuhan mereka sehingga masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan program pemerintah, penjangkauan aspirasi dan lain-lain. Selain itu dengan keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan pemerintah, maka masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam program pemerintah, sehingga timbul rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya. Sehingga masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai objek pembangunan melainkan masyarakat sebagai pelaku utamanya.

Dari permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut, perlu adanya pemerataan pembangunan dan ketersediaan pelayanan publik yang memadai. Jika dilihat dari luas wilayah di Kecamatan Tanah Grogot yang masih sangat luas, perlu adanya pemekaran kecamatan dengan melepas

beberapa desa di Kecamatan Tanah Grogot dan bergabung dengan sebagian wilayah Kecamatan Kuaro. Desa Padang Pengrapat yang masih memiliki wilayah yang luas dan dapat dijadikan sebagai calon pusat pelayanan kecamatan baru bergabung dengan desa-desa di kecamatan sekitarnya.

Dari penjelasan diatas di simpulkan masalah-masalah yang terjadi di Kecamatan Tanah Grogot antara lain ketimpangan pembangunan di tiap desa-desa, pelayanan yang kurang optimal dan aksesibilitas yang kurang baik dalam menghubungkan antar desa menuju ke pusat pemerintahan. Sehingga dalam hal ini peneliti ingin melihat dengan uji kelayakan dan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Grogot.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam suatu penelitian perlu adanya tujuan yang ingin dicapai dan sasaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut akan dijabarkan mengenai tujuan dari penelitian serta sasaran yang akan dicapai untuk menjawab tujuan penelitian.

1.3.1. Tujuan

Penelitian dan kajian secara umum bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Grogot.

1.3.2. Sasaran

Adapun sasaran-sasaran yang mendukung tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot.
2. Menentukan keinginan pengembangan wilayah kecamatan baru dan design penataan pemekaran berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Menguji kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam memenuhi rencana pencapaian tujuan, kegunaan dan target/hasil yang diharapkan, maka ruang lingkup kajian penelitian diarahkan sebagai berikut :

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi adalah lokasi dilakukannya sebuah penelitian. Lingkup wilayah studi dalam penelitian adalah Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kecamatan Tanah Grogot adalah ibu kota kabupaten yang mempunyai fungsi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Paser, sehingga kegiatan ekonomi lebih besar di Kecamatan Tanah Grogot.

Luas Wilayah Kecamatan Tanah Grogot 335,58 km² yang terbagi atas 1 Kelurahan dan 15 desa dengan Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kuaro;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pasir Belengkong;
- Sebelah Timur : Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat : Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Kuaro.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi merupakan batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Lingkup materi yang akan dibahas pada penelitian yakni :

1. Materi yang dibahas untuk melihat kondisi wilayah pemekaran yaitu dari aspek kependudukan, luas wilayah, rentang kendali, ketersediaan sarana dan prasarana serta perekonomian.
2. Keinginan terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dan design pembagian wilayah pemekaran berdasarkan aspirasi masyarakat
3. Menguji kelayakan pemekaran dengan menggunakan acuan dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan memperhatikan aspek kependudukan, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perkonomanian dan ketersediaan sarana dan prasarana.

1.5 Keluaran dan Manfaat yang Diharapkan

Pada bagian ini dibagi dalam dua bagian pembahasan yaitu keluaran yang diharapkan dan manfaat. Keluaran yang diharapkan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran. adapun manfaatnya adalah bagaimana keluaran yang dihasilkan benar-benar mempunyai manfaat lebih baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang lain.

1.5.1. Keluaran yang diharapkan

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui studi kelayakan dan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Dengan tujuan tersebut, maka keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot yaitu melihat kondisi wilayah dari aspek penduduk, luas wilayah, rentang kendali, perekonomian serta sarana dan prasarana.
2. Tujuan dari aspirasi masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot yaitu keinginan masyarakat terhadap pengembangan wilayah baru atau pemekaran wilayah dan design pembagian wilayah pemekaran.
3. Kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi yang dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pemekaran daerah.
2. Dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai gambaran dan informasi mengenai wilayah hasil dari pemekaran
3. Diharapkan hasil dari penelitian dapat sebagai acuan atau perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam proses penyusunan penelitian ini terbagi menjadi enam (6) bab, dimana setiap bab merupakan tahapan kerja pada proses penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup studi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan teori ataupun referensi yang menjadi acuan dalam mendukung materi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berkaitan dengan materi-materi atau penjabaran yang akan dibahas dan dijadikan sebagai bahan analisa. Landasan penelitian akan mengarah kepada pokok yang akan dibahas untuk kemudian dapat membantu dalam analisa.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab 4 membahas mengenai gambaran tentang Kecamatan Tanah Grogot yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktifitas perekonomian serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tanah Grogot.

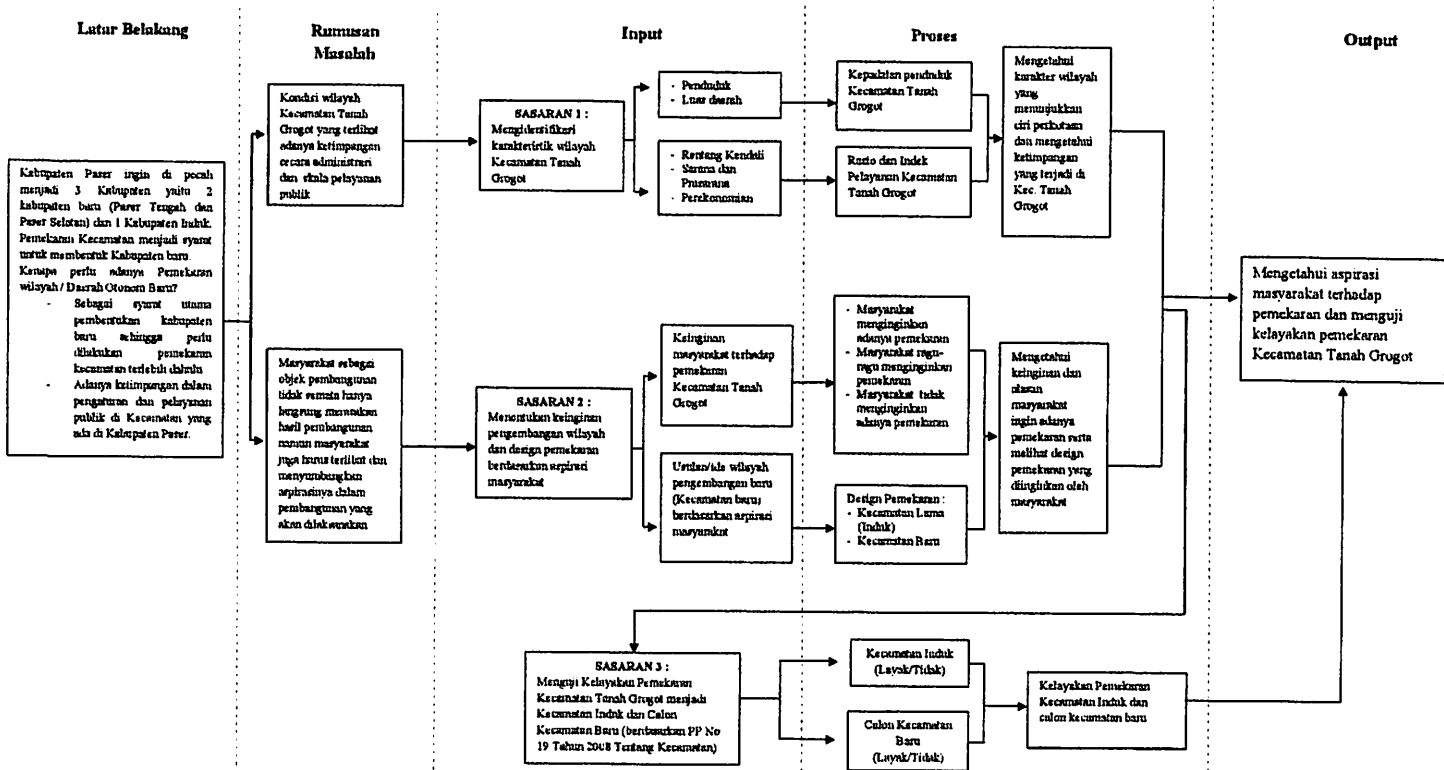
BAB V ANALISA DAN HASIL

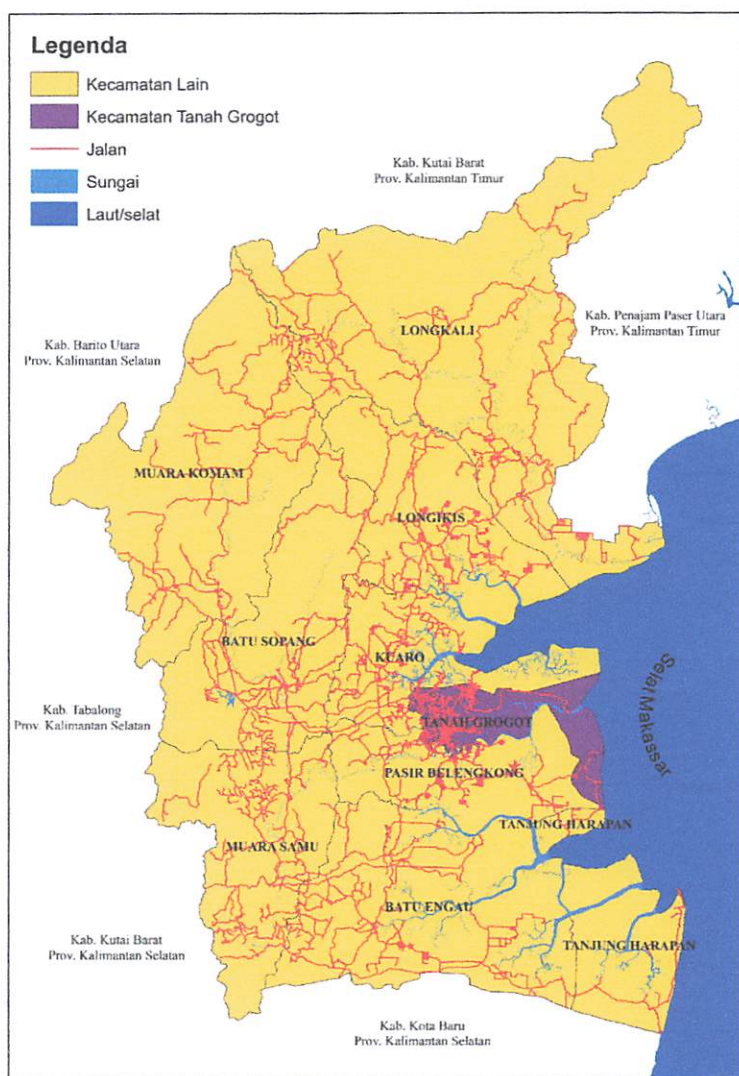
Dalam bab ini berisi tentang materi hasil analisa dari aspirasi masyarakat terhadap pemekaran dan kajian kelayakan pemekaran kecamatan Tanah Grogot.

BAB VI PENUTUP

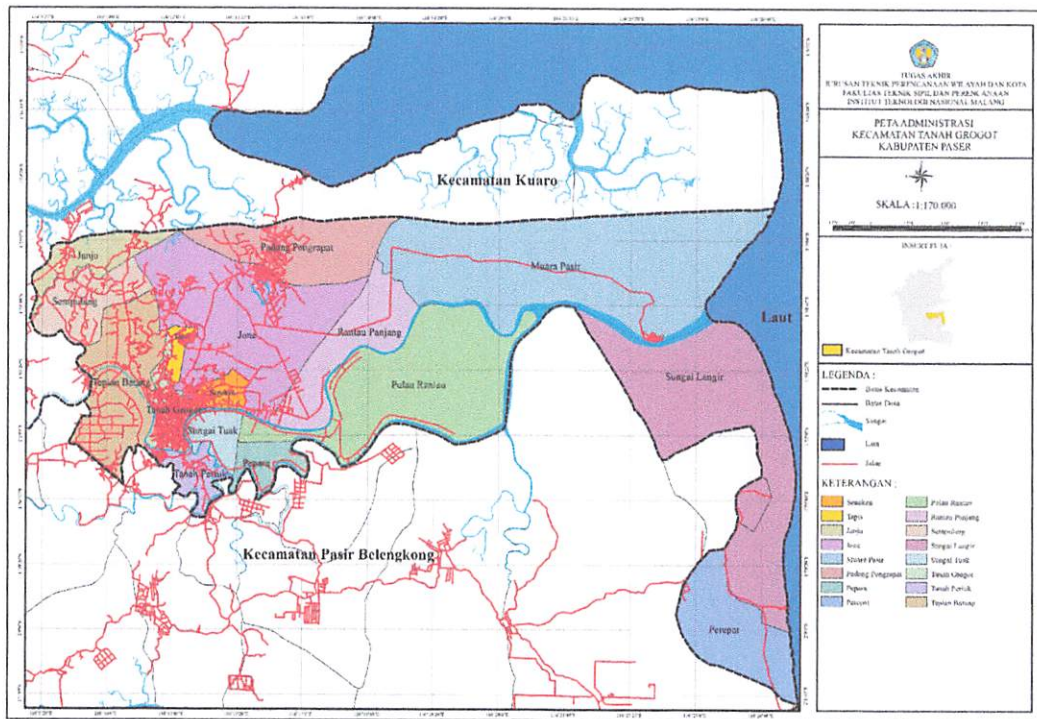
Pada bab penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi untuk studi lanjutan.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir





Gambar 1.1. Batas Administrasi Kabupaten Paser



Gambar 1.2. Batas Administrasi Kecamatan Tanah Grogot

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik Wilayah

Menurut Kamus Penataan Ruang, wilayah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional³. Karakteristik suatu daerah di artikan sebagai ciri atau kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut⁴. Menurut Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota, karakteristik tata ruang wilayah meliputi: karakteristik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, potensi rawan bencana alam, potensi sumber daya alam), karakteristik sosial kependudukan (sebaran penduduk dan kualitas SDM), dan karakteristik ekonomi wilayah (basis ekonomi wilayah, sarana dan prasarana penunjang ekonomi).

2.2. Pemekaran Wilayah Kecamatan

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat⁵.

Menurut Sjafrizal (2008), pemekaran wilayah adalah pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk daerah suatu administratif baru. Perluasan biasanya terjadi pada daerah perkotaan bila perkembangan pembangunan sudah meluas sehingga daerah yang semula (rural area) mulai berubah struktur perekonomiannya menjadi daerah

³ Maman Djumantri, 2009, Kamus Penataan Ruang, Jakarta, DirJen Penataan Ruang, Hlm 283

⁴ Ibid, Hlm 112

⁵ Ratty Puspitasari, *op.cit.*, Hlm. 3.

perkotaan (urban area). Istilah pemekaran daerah dimaknai sebagai proses pertambahan daerah yang terjadi sebagai dampak dari pertumbuhannya⁶.

Dalam bahasa Inggris kata kecamatan seringkali diterjemahkan kepada sub-distrik, meskipun tidak sedikit pula dokumen pemerintah Indonesia menerjemahkannya sebagai Daerah (distrik), ini karena kabupaten sebagai pembagian administratif negara Indonesia di bawah provinsi diterjemahkan sebagai regency. Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah secara resmi mengganti penyebutan kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah penerjemahan yang lebih sesuai dari kecamatan ke dalam bahasa Inggris adalah distrik.

Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Sebuah kecamatan itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa administratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kecamatan adalah:

1. Daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahi beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang camat;
2. Bagian pemerintahan daerah yang dikepalai seorang camat;
3. Kantor camat

Jadi berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah kecamatan merupakan pemisahan diri suatu wilayah menjadi 2 atau lebih dari daerah administrasi (kecamatan) lama membentuk daerah administrasi (kecamatan) yang baru dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Wilayah diartikan sebagai permukaan (daratan atau perairan) yang memiliki batas-batasnya yang telah ditetapkan, dimana di dalamnya terdapat (terjadi) interaksi antara sumberdaya manusia (SDM) dengan sumberdaya alam (SDA), sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumber-sumberdaya pembangunan lainnya⁷.

Wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu⁸:

⁶ Ibnu Kanaha, 2014, Efektifitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Pulau Morotai, Jurnal UNIERA Vol. 3 No.1, Hlm 24

⁷ Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec, 2014, Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm 25

⁸ Dr. Ir. Sugeng Budiharsono, 2005, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Hlm 18

1. **Wilayah Homogen**
Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.
2. **Wilayah Nodal**
Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya(hinterland).
3. **Wilayah Perencanaan**
Boudeville (dalam Glasson, 1978) mendefinisikan wilayah perencanaan sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
4. **Wilayah Administratif**
Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan,desa/keurahan, dan RT/RW.

2.3. Aspirasi Masyarakat

Menurut kamus penataan ruang, aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, seperti pelaksanaan rencana tata ruang. Aspirasi dapat diartikan sebagai konsep terintegrasi yang mencakup segala bentuk keinginan baik yang realistis maupun tidak realistis, didasari secara jelas maupun samar-samar yang dipikirkan untuk kehidupan jangka pendek maupun panjang seorang individu. Aspirasi merupakan suatu bahasan yang berkaitan dengan cita-cita, tujuan, rencana, serta dorongan untuk bertindak dan berkarya. Aspirasi sebagai integrasi dari impian-impian, harapan-harapan, keinginan, cita-cita dan tujuan mengenai kehidupan khususnya kehidupan dimasa depan. Aspirasi adalah keinginan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi bagi seseorang yaitu kemajuan fisik mental serta lingkungannya yang bersifat realistis dan masuk akal untuk mencapai keinginan tersebut, setiap individu mewujudkan dalam bentuk tindakan maupun pikiran(Pudibuyono, 1980). Secara definitif aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas yang dituangkan

dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran struktural, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan⁹.

Menurut Hurlock (1999:23) aspirasi adalah keinginan akan sesuatu yang lebih tinggi dengan kemajuan sebagai tujuannya, sedangkan Slameto (2003:182) mengemukakan aspirasi sebagai harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu. Ahmadi (2009:134) menjelaskan aspirasi sama dengan kemauan yaitu dorongan kehendak yang terarah pada tujuan-tujuan hidup tertentu, dan dikendalikan oleh pertimbangan akal budi. Dimiyati & Mudjiono (1999:97) menyamakan aspirasi dengan cita-cita, yaitu keinginan yang ingin dicapai dan dapat berpengaruh pada kemauan dan semangat belajar. Aspirasi merupakan harapan individu akan sesuatu, dan individu akan berusaha untuk mencapai hal-hal yang diharapkan¹⁰.

Menurut Hurlock (1999:24) mengemukakan, berdasarkan sifatnya aspirasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Aspirasi Positif

Aspirasi positif adalah keinginan meraih kemampuan. Orang yang memiliki aspirasi positif adalah mereka yang ingin mendapatkan yang lebih baik atau lebih tinggi daripada keadaannya sekarang.

2. Aspirasi Negatif

Aspirasi negatif adalah keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini, tanpa keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapainya.

Berdasarkan tujuannya, Hurlock (1999:24) membedakan aspirasi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Aspirasi Langsung (Immediate Aspiration)

Aspirasi langsung ini merupakan aspirasi yang tujuan/ cita-cita yang ingin dicapai seseorang pada waktu yang dekat atau tidak terlalu lama (sekarang, besok, minggu depan, atau bulan depan).

2. Aspirasi Jauh (Remote Corporation)

Aspirasi jauh merupakan aspirasi dengan tujuan yang ingin dicapai untuk masa mendatang.

Jadi aspirasi masyarakat yang mendasari penelitian ini yaitu keinginan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi bagi seseorang yaitu

⁹ Zulkifli, A. Margono, Suarta Djaja, 2014, analisis penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun anggaran 2012, eJournal Administrative Reform, Volume 2, Nomor 1, Hlm 1051

¹⁰ Praharesti Eriany, Lucia Hemawati dan Haryo Goeritno, 2014, studi deskriptif mengenai faktor-faktor yang Mempengaruhi motivasi mengikuti kegiatan Bimbingan belajar pada siswa smp di semarang, Psikodimensia, Vol. 13 No.1, Hlm 119

kemajuan fisik mental serta lingkungannya yang bersifat realistis dan masuk akal dan untuk mencapai keinginan tersebut, setiap individu mewujudkan dalam bentuk tindakan maupun pikiran. Secara definitif aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan. Di tingkat peran struktural, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

2.4. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Wilayah

Dalam melakukan pemekaran suatu wilayah perlu melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemekaran wilayah tersebut. Daerah otonom dibentuk adalah untuk alasan efektifitas/efisiensi pemerintahan (pelayanan publik), kesejahteraan masyarakat, mendekatkan yang memerintah dengan yang diperintah, kesetaraan politik, pendidikan politik, dan untuk mengembangkan demokrasi di aras lokal. Pemekaran daerah itu akan berkorelasi secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut¹¹. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan beberapa syarat dalam membentuk daerah baru. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk daerah atau kecamatan baru meliputi penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana.

2.4.1. Kependudukan

Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan ukuran pemerintah daerah. Keadaan geografis suatu wilayah akan menentukan karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan perluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah¹². Pembangunan dan perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah kependudukan yang terjadi di suatu wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlampau

¹¹ Syamsiah, 2013, dampak pemekaran kabupaten tana tidung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, *eJournal Pemerintahan Integratif* , Volume 1, No.4, Hlm. 224

¹² Ardiyanto Maksimilianus Ga'i, Wahyu Hidayat dan Endratno Budi Santoso, 2010, Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom, *Jurnal Tata Kota dan Daerah* Vol. 2, No.1, Hlm 7

besar dan terkonsentrasi pada suatu wilayah dapat membawa akibat-akibat yang kurang diharapkan.

Persoalan ketidakmerataan persebaran penduduk merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah terutama terkait dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hubungan antara persebaran penduduk dengan tingkat pembangunan wilayah ini dikemukakan oleh Everett S. Lee yang mengatakan bahwa volume migrasi di dalam suatu wilayah tertentu bervariasi sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah-daerah di dalam wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat pembangunan di suatu wilayah maka frekuensi migrasi yang terjadi di dalam dan menuju wilayah tersebut semakin tinggi¹³.

2.4.2. Luas Daerah

Menurut Syafrizal (2008) dalam Ventauli (2009), ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah yaitu luas daerah. Luas daerah dapat memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata keseluruh pelosok daerah. Sementara tugas pokok pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat didaerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah sehingga luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi lebih efektif.

2.4.3. Rentang Kendali

Menurut Zulkarnain Lubis (2009) bahwa pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempersempit rentang

¹³ Lutfi Muta'ali, 2011, *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*, Yogyakarta, BPFQ Universitas Gadjja Mada, Hlm 241

kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan¹⁴.

a. Faktor Jangkauan Pelayanan

Dengan pemekaran seharusnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat harus semakin efisien dan efektif karena masyarakat dapat langsung mendapatkan layanan oleh aparat setempat (di daerahnya). Inilah makna desentralisasi dalam perpektif pelayanan publik, dimana ada otonomi daerah untuk mengadakan dan memenuhi kebutuhan warganya.

b. Faktor Kualitas Pelayanan Publik

Setelah jangkauan pelayanan semakin dekat, maka kualitas pelayanan harus meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi yang dimiliki daerah otonomi baru. Ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan dan lainnya harus secara kualitatif dan kuantitatif mengalami peningkatan. Pemekaran yang tidak memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat harus menjadi tanda tanya besar bagi indikator keberhasilan pemekaran.

2.4.4. Aktivitas Perekonomian

Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan rangsangan perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut¹⁵. Pemekaran harus memberikan dampak pada peningkatan perkapita dan PDRB. Peningkatan itu bisa dilakukan secara bertahap dengan parameter yang bisa dibuat secara cermat dengan memperhitungkan potensi ekonomi daerah. Prioritas pembangunan harus disusun secara cermat mulai dari pembangunan infraskruktur dasar dan seterusnya.

¹⁴ Zulkamain Lubis, 2009, Pemekaran Untuk Kesejahteraan: Antara Solusi dan Imajinasi, <https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-solusi-dan-imajinasi/>

¹⁵ Puji Suprajito, 2003, Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah, Semarang, Tesis Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, Hlm 34

2.4.5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor – faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas – fasilitas masyarakat umum, serta hal – hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah¹⁶. Sarana pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dimana pendidikan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu negara dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Keinginan yang dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat dalam kehidupan yang sehat dengan perilaku hidup yang bersih dan sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Usaha untuk memperbaiki kondisi suatu wilayah sebagai tempat hidup dan bersosial manusia yang layak, akan bertitik tolak pada pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Karena kurangnya penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ini, maka diperlukan adanya peningkatan mutu dan jumlah prasarana dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang perlu diperhatikan untuk mencapai standart kebutuhan yang layak meliputi : perumahan, air minum, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas sosial lainnya(kesehatan, rekreasi dan peribadatan) serta jaringan jalan¹⁷.

Tabel 2.1 Penentuan Variabel

Sumber teori	Teori	Variabel
PP 78 tahun 2007	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan faktor-faktor yang membentuk suatu daerah baru yaitu : kependudukan, luas daerah, dan rentang kendali.	1. Penduduk 2. Aktivitas perekonomian
PP 19 tahun 2008	Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk daerah atau kecamatan baru meliputi: penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana.	3. Luas daerah

¹⁶ Syamsiah, *op.cit.*, Hlm 221

¹⁷ Drs. Ilhami, 1990, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional, Hlm 63

Lanjutan tabel 2.1

Sumber teori	Teori	Variabel
Zulkarnain Lubis	Pemekaran wilayah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan	4. Rentang kendali
Syafrizal	Faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah adalah luas daerah. Luas daerah dapat memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata keseluruh pelosok daerah	5. Ketersediaan sarana dan prasarana

Sumber : Kajian Sintesa Tahun 2015

2.5. Landasan Penelitian

Landasan penelitian merupakan hasil sintesa atau kesimpulan-kesimpulan dari teori-teori yang telah dijelaskan di atas, dan dapat dijadikan dasar atau batasan-batasan dalam objek penelitian. Pemekaran kecamatan merupakan pemisahan suatu wilayah dari daerah administratif lama untuk membentuk suatu daerah administratif baru dalam hal ini yaitu dari administrasi desa membentuk daerah administrasi kecamatan. Pada lokasi penelitian, pemekaran kecamatan diartikan dalam satu kecamatan lama akan membentuk beberapa administratif kecamatan baru. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan menyebutkan bahwa pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan landasan peraturan tersebut karena pemekaran di Kecamatan Tanah Grogot berasal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan kesejahteraan bukan dilihat dari perkembangan pembangunan yang sudah meluas seperti teori yang diungkapkan oleh Syafrizal (2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran kecamatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu Kependudukan, Luas Daerah, Rentang Kendali, Aktivitas Perekonomian dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Luasnya suatu daerah dapat memicu terjadinya pemekaran karena wilayah yang luas akan cenderung menyebabkan tidak efektif dan meratanya pelayanan publik.

Sehingga dengan adanya pemekaran maka luas daerah menjadi lebih kecil dan jangkauan pelayanan publik menjadi efektif dan merata. Pemekaran bertujuan mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya pemekaran kecamatan dapat memperpendek rentang kendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pelayanan publik terabaikan, bahkan cenderung terjadi ketidakadilan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan mutu dan pelayanannya yaitu penyediaan air minum dan jaringan listrik, karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dalam mencapai standard kebutuhan yang layak. Fasilitas pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan balai pertemuan diperlukan adanya peningkatan mutu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan yang layak.

Aspirasi adalah keinginan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi bagi seseorang yaitu kemajuan fisik mental serta lingkungannya yang bersifat realistis dan masuk akal dan untuk mencapai keinginan tersebut, setiap individu mewujudkan dalam bentuk tindakan maupun pikiran. Dalam penelitian ini penulis melihat aspirasi masyarakat dari pikiran masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam penentuan pemekaran wilayah dikarenakan masyarakat sebagai subjek dari penyelenggaraan pembangunan. Selain itu masyarakat juga menjadi objek yang akan merasakan hasil dari pembangunan. Masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan pembangunan (stakeholder).

Kelayakan pemekaran yaitu melihat layak atau tidaknya suatu wilayah untuk dimekarkan atau dipisahkan dari daerah induknya. Kecamatan Tanah Grogot merupakan ibukota Kabupaten yang akan diuji kelayakan pemekaran sebagai salah satu syarat dari pelaksanaan pemekaran Kabupaten Paser.

Pembentukan daerah mengandung arti bahwa daerah tersebut harus mampu melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kondisi, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan beberapa syarat dalam membentuk daerah baru. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk daerah atau kecamatan baru meliputi :penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 variabel penelitian.

Tabel 2.2 Variabel Penelitian

Sasaran	Teori	Variabel	Indikator	
1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot dalam penentuan pemekaran wilayah	Menurut Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kota, karakteristik tata ruang wilayah meliputi: karakteristik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, potensi rawan bencana alam, potensi sumber daya alam), karakteristik sosial kependudukan (sebaran dan kepadatan penduduk serta kualitas SDM), dan karakteristik ekonomi wilayah (basis ekonomi wilayah, sarana dan prasarana penunjang ekonomi).	1. Kondisi Geografis	1.a Luas wilayah keseluruhan	Minimal 12,5 Km ² (Kepmendagri No 4 Tahun 2000)
		2. Sosial Kependudukan	2.a Jumlah Penduduk	Minimal 5000 Jiwa (Kepmendagri No 4 Tahun 2000)
		3. Perekonomian	3.a Jumlah Bank	Tinggi, sedang, rendah
			3.b Jumlah Lembaga Keuangan Non Bank	Tinggi, sedang, rendah
			3.c Kelompok Pertokoan	Tinggi, sedang, rendah
			3.d Jumlah Pasar	Tinggi, sedang, rendah
		4. Sarana dan Prasarana	4.a Jumlah Fasilitas Pendidikan	Tinggi, sedang, rendah
			4.b Jumlah Fasilitas Kesehatan	Tinggi, sedang, rendah
			4.c Jarak Tempuh	Jauh, sedang, dekat
			4.d Waktu Tempuh	Lama, sedang, cepat

Lanjutan tabel 2.2

Sasaran	Teori	Variabel	Indikator
2. Mengidentifikasi Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot	(Pudibuyono, 1980) Aspirasi adalah keinginan untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi bagi seseorang yaitu kemajuan fisik mental serta lingkungannya yang bersifat realistis dan masuk akal untuk mencapai keinginan tersebut, setiap individu mewujudkan dalam bentuk tindakan maupun pikiran.	1. Keinginan/Kemauan	Setuju, Tidak Setuju, Ragu-Ragu
		2. Usulan/Ide	Kecamatan Induk, Kecamatan Baru
<i>Lanjutan tabel 2.2</i>	Menurut Hurlock (1999:23) aspirasi adalah keinginan akan sesuatu yang lebih tinggi dengan kemajuan sebagai tujuannya.		
	Aspirasi menurut Purwoko (2008), secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dalam suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan		

Lanjutan tabel 2.2

Sasaran	Teori		Variabel	Indikator
	pembangunan. Di tingkat peran struktural, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.			
3. Menguji kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot	PP Nomor 78 Tahun 2007 : kependudukan, kemampuan ekonomi.potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali.	1. Penduduk	1.a.Jumlah Penduduk	1. Sangat Mampu (Jika nilai variabel $\geq 80\%$ dari nilai rata-rata)
		2. Luas Daerah	2.n Luas wilayah keseluruhan 2.b Luas wilayah efektif yang dapat di manfaatkan	
		3. Rentang Kendali	3.a Rata-rata jarak dari Kelurahan/desa ke pusat pemerintahan (Kecamatan)	2 Mampu (Jika nilai variabel $\geq 60\%$ dari nilai rata-rata)
			3.b Rata-rata waktu perjalanan dari Kelurahan/desa ke pusat pemerintahan (Kecamatan)	
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Faktor-faktor meliputi :penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana	4. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	4.a Rasio sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar 4.b Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama		

Lanjutan tabel 2.2

Sasaran	Teori	Variabel	Indikator
		4.c Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	3. Kurang Mampu (Jika nilai variabel $\geq 40\%$ dari nilai rata-rata)
		4.d Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	
		4.e Rasio tenaga medis per penduduk	
		4.f Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	
		4.g Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	4. Tidak Mampu (Jika nilai variabel $\geq 20\%$ dari nilai rata-rata)
		4.h Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	
		4.i Rasio sarana peribadatan per penduduk	
		4.j Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	
	Menurut Zulkarnain Lubis yaitu faktor ekonomi, sosial politik, kemandirian daerah, organisasi dan manajemen, jangkauan pelayanan, kualitas pelayanan publik, tata pemerintahan yang baik, dan responsiveness		

Lanjutan tabel 2.2

Sasaran	Teori	Variabel	Indikator
		4.k Rasio Jumlah balai pertemuan	
		5.a Jumlah Bank	5.Sangat Tidak Mampu
		5.b Jumlah Lembaga Keuangan	(Jika nilai variabel <20% dari nilai rata-rata)
		5.c Jumlah Pertokoan	
		5.d.Jumlah Pasar	
Menurut Sjafrizal yaitu Perbedaan Agama, Perbedaan Etnis dan Budaya, Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Daerah, dan Luas Daerah	5. Aktivitas Perekonomian		

Sumber: Kajian Sintesa Tahun 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian disusun untuk proses pembahasan studi yang dilakukan lebih terstruktur dan terarah. Metode yang digunakan dalam studi ini terbagi menjadi tiga yaitu metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa.

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu prosedur untuk mendapatkan kondisi nyata pada suatu penelitian. Metode pengumpulan data digunakan dengan dua cara untuk yaitu data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3.1.1. Survey Data Primer

Survey data primer merupakan kegiatan memperoleh data lapangan secara langsung dengan mengamati kondisi lokasi studi yaitu di Kecamatan Tanah Grogot. Adapun kegiatan survey data primer yang dilakukan, yaitu:

1. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dalam penelitian ini menggunakan participant observation yang artinya peneliti juga merupakan sebagai pelaku didalam observasi yang dilakukan pada wilayah penelitian, dengan melakukan pengamatan terhadap beberapa aspek :

- a. Pencatatan hasil pengamatan untuk kemudian diolah menjadi informasi atau data yang disesuaikan dengan variabel yang telah ditentukan.
- b. Melakukan dokumentasi dengan media foto atau gambar sebagai pertimbangan untuk pembuktian kondisi yang ada di lapangan yang nantinya juga digunakan sebagai bahan analisis.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi¹⁸. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan¹⁹.

Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik non-probability sampling memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Tjiptono,dkk 2001). Purposive Sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu²⁰. Dengan demikian, dari populasi yang ada dipilih kelompok yang memenuhi syarat tertentu yang selanjutnya memiliki peluang untuk menjadi sampel.

3.1.2. Survey Data Sekunder

Survey sekunder adalah survey yang dilakukan dengan tidak terjun langsung ke lapangan melainkan mengumpulkan data atau informasi dari beberapa sumber, seperti: instansi terkait seperti instansi yang berwenang dalam pendataan dan koordinasi seperti BAPPEDA, BPS dan instansi yang terkait dan literatur. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

3.2. Metode Analisa

Metode analisa merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis data di lapangan dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

3.2.1. Metode Analisa Karakteristik Wilayah

Tahap analisa awal pada penelitian ini yaitu peneliti mencari karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot dengan menggunakan

¹⁸ Irawati Singarimbun, 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, Hlm 192

¹⁹ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, Bandung, Alfabeta, Hlm 140

²⁰ Riduwan, 2009, Dasar-dasar statistika, Bandung, CV. Alfabeta, Hlm 20

analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & Biklen, 1982).

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data yaitu penyusunan lembar rangkuman kontak (contact summary sheet), pembuatan kode-kode, pengkodean pola (pattern coding) dan pemberian memo.

Hasil dari analisa kualitatif adalah untuk mengetahui ketimpangan pembangunan dari wilayah penelitian yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Tujuan dari mengetahui ketimpangan pembangunan tersebut adalah mengetahui pemerataan pembangunan dan mengukur sejauhmana pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot.

3.2.2. Metode Analisa Aspirasi Masyarakat

Tahapan analisa berikutnya adalah analisa terhadap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah keinginan akan sesuatu yang lebih tinggi dengan kemajuan sebagai tujuannya. Keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot tersebut akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif dan selanjutnya untuk mengetahui perbandingan jumlah masyarakat yang menginginkan atau setuju adanya pemekaran dengan jumlah masyarakat yang tidak setuju adanya pemekaran dianalisa menggunakan analisa distribusi frekuensi.

Distribusi Frekuensi yang digunakan adalah distribusi frekuensi sederhana adalah pengelompokan data dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat terlihat. Tabel frekuensi merupakan tabel yang menunjukkan sebaran atau distribusi frekuensi data yang dimiliki, yang tersusun atas frekuensi tiap-tiap kelas atau kategori²¹. Daftar distribusi frekuensi menunjukkan rincian skor dari suatu perangkat data beserta

²¹ Ir. Suntoyo Yitnosumarto, 1990, Dasar-dasar Statistika, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm 13

frekuensinya masing-masing dalam suatu pengukuran. Daftar distribusi frekuensi menggambarkan seberapa banyak masing-masing variabel tersebut dipilih²².

3.2.3. Metode Kelayakan Pemekaran Kecamatan

Penilaian syarat teknis pemekaran kecamatan menggunakan sistem skoring yang terdiri dari 2 macam metode penilaian yaitu metode rata-rata dan metode kuota²³.

1. Metode Rata-rata

Metode rata-rata adalah suatu metode yang membandingkan besaran/nilai calon kecamatan pemekaran (baru) dan kecamatan induknya terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di Kabupaten Paser. Semakin dekat nilai rata-rata tertimbang keseluruhan kecamatan semakin besar nilai skornya yang berarti kesenjangan antar kecamatan semakin berkurang.

2. Metode Kuota

Metode kuota adalah suatu metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan baru maupun kecamatan induk. Metode kuota digunakan untuk menilai indikator jumlah penduduk.

Skala penilaian dan pemberian skor yaitu sebagai berikut :

a. Skala Penilaian :

- Skor 5 = Kategori sangat mampu
- Skor 4 = Kategori mampu
- Skor 3 = Kategori kurang mampu
- Skor 2 = Kategori tidak mampu
- Skor 1 = Kategori sangat tidak mampu

b. Pemberian Skor :

- Skor 5 jika besaran /nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata.
- Skor 4 jika besaran /nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata.
- Skor 3 jika besaran /nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata.
- Skor 2 jika besaran /nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata.
- Skor 1 jika besaran /nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

²² Furqon, Ph.d, 2004, Statistika Terapan untuk Penelitian, Bandung, CV. Alfabeta, Hlm 22

²³ Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Lampiran

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase tiap indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Indikator \%} = \frac{\text{Nilai dari Indikator (A)}}{\text{Nilai Rata-rata Pembanding Indikator}} \times 100\%$$

Keterangan :

- "A" = Indikator pembentukan kecamatan
- Nilai rata-rata pembanding adalah jumlah keseluruhan kabupaten dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada dalam kabupaten tersebut.
- Nilai indikator adalah jumlah dari tiap indikator.

Setiap indikator mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel penentuan bobot untuk setiap indikator pembentukan kecamatan.

Tabel 3.1 Penentuan bobot untuk setiap indikator pembentukan kecamatan sesuai PP No 19 Tahun 2008

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
1.	Penduduk	20
1.	Jumlah penduduk	20
2.	Luas daerah	10
1.	Luas wilayah keseluruhan	5
2.	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5
3.	Rentang Kendali	20
1.	Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10
2.	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	10
4.	Aktivitas perekonomian	10
1.	Jumlah Bank	2
2.	Jumlah lembaga keuangan bukan bank	2
3.	Jumlah kelompok pertokoan	2
4.	Jumlah pasar	4
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	40
1.	Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	4
2.	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4
3.	Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4
4.	Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4
5.	Rasio tenaga medis per penduduk	4
6.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3

Lanjutan tabel 3.1

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR	BOBOT
7.	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3
8.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	3
9.	Rasio sarana peribadatan per penduduk	4
10.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3
11.	Jumlah balai pertemuan	4
Total		100

Sumber : PP No 19 Tahun 2008

Suatu kecamatan direkomendasikan untuk mekar apabila kecamatan induk dan calon kecamatan baru (hasil pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu dan mampu. Sebaliknya, usulan pembentukan kecamatan tidak direkomendasikan apabila calon kecamatan baru atau kecamatan induknya mempunyai total nilai seluruh indikatornya dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator²⁴. Untuk mengetahui bahwa kecamatan yang akan dimekarkan tersebut dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemekaran atau ditolak maka ditotalkan hasil perhitungan dari setiap indikatornya.

Tabel 3.2 Tingkat Kelayakan Pemekaran Kecamatan

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Tanah Grogot merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Paser yang terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa. Kecamatan Tanah Grogot sebagai ibukota kabupaten paser memiliki fungsi pusat pelayanan skala kabupaten yang dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang baik dan lengkap dibanding kecamatan lain yang ada di Kabupaten Paser. Kecamatan Tanah Grogot sebagai ibukota kabupaten masih terdapat ketimpangan dalam hal pembangunan. Dengan adanya ketimpangan antar wilayah tersebut, muncul lah isue pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Adapun materi yang akan dibahas pada gambaran umum Kecamatan Tanah Grogot yaitu kependudukan, luas wilayah, rentang kendali, ketersediaan sarana dan prasarana serta aktivitas perekonomian.

4.1. Kependudukan Kecamatan Tanah Grogot

Penduduk merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi potensi maupun masalah dalam perkembangan suatu wilayah. Data jumlah penduduk ini akan menunjukkan persebaran penduduk antar unit wilayah.

Jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Grogot adalah sebesar 81.323 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar ada di Kelurahan Tanah Grogot sebesar 39.551 jiwa. Sebaliknya wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sungai Langir yaitu 406 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Grogot dapat di lihat pada tabel 4.1 jumlah penduduk Kecamatan Tanah Grogot.

Tingkat konsentrasi penduduk terpusat di Kelurahan Tanah Grogot sebesar 49%, hal ini disebabkan oleh terpusatnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang ada di Kelurahan Tanah Grogot, sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk bertempat tinggal di kelurahan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 4.1 persentase jumlah penduduk Kecamatan Tanah Grogot.

Kondisi Kecamatan Tanah Grogot semakin ramai setelah dihuni oleh orang Bugis, selanjutnya datang juga orang Banjar, Jawa, dan sebagainya yang menyebabkan penduduk di Kecamatan Tanah Grogot semakin banyak. Penduduk tersebut lebih dominan berasal dari Bugis dan

Banjar, sehingga kebudayaan mereka cepat membar dengan penduduk asli Suku Paser. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pada saat ini dapat dijumpai perpaduan budaya pada orang Paser di Kecamatan Tanah Grogot. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penduduk yang datang hingga Kecamatan Tanah Grogot terus berkembang pesat. Namun perkembangan yang terjadi di Kecamatan Tanah Grogot tidak merata karena perkembangan terpusat hanya pada kelurahan Tanah Grogot.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah (KK)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah penduduk (Jiwa)
1	Kelurahan Tanah Grogot	12.056	20.745	18.806	39.551
2	Desa Janju	808	1.418	1.195	2.613
3	Desa Sempulang	630	1.022	943	1.965
4	Desa Tepian Batang	1.473	2.566	2.402	4.968
5	Desa Tanah Periuk	1.007	1.896	1.742	3.638
6	Desa Pepara	194	325	306	631
7	Desa Sungai Tuak	485	842	821	1.663
8	Desa Rantau Panjang	340	676	564	1.240
9	Desa Jone	1.357	2.641	2.437	5.078
10	Desa Padang Pengrapat	1.202	2.193	1.933	4.126
11	Desa Muara Pasir	1.076	2.000	1.816	3.816
12	Desa Perepat	144	246	233	479
13	Desa Pulau Rantau	206	429	408	837
14	Desa Sungai Langir	118	207	199	406
15	Desa Tapis	809	1.478	1.311	2.789
16	Desa Senaken	2.205	4.012	3.511	7.523
	Jumlah	24.110	42.696	38.627	81.323

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

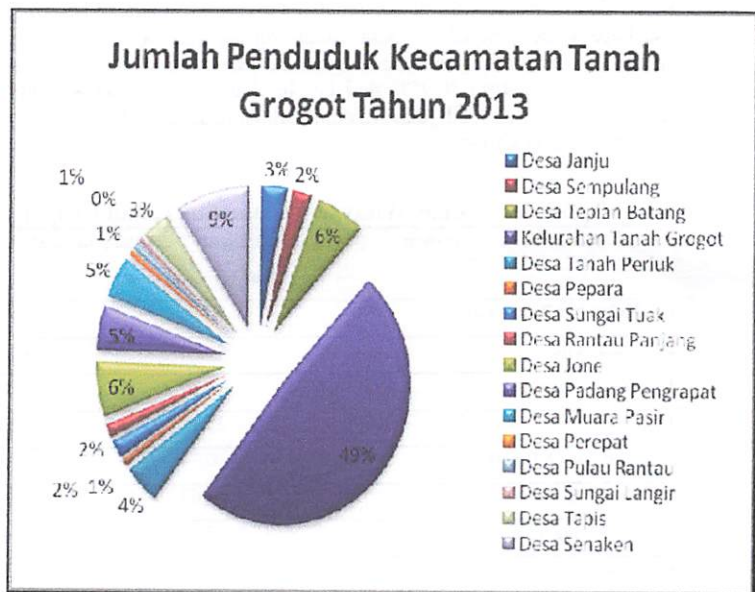


Diagram 4.1. Persentase Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

4.2. Geografis Kecamatan Tanah Grogot

Secara geografis Kecamatan Tanah Grogot terletak pada koordinat $116^{\circ}11'53,41''\text{BT}$ dan $01^{\circ}54,45,9''\text{LS}$. Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas wilayah $398,08 \text{ Km}^2$, terdiri atas 1 kelurahan dan 15 desa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 batas administrasi Kecamatan Tanah Grogot.

4.2.1. Luas Wilayah Kecamatan Tanah Grogot

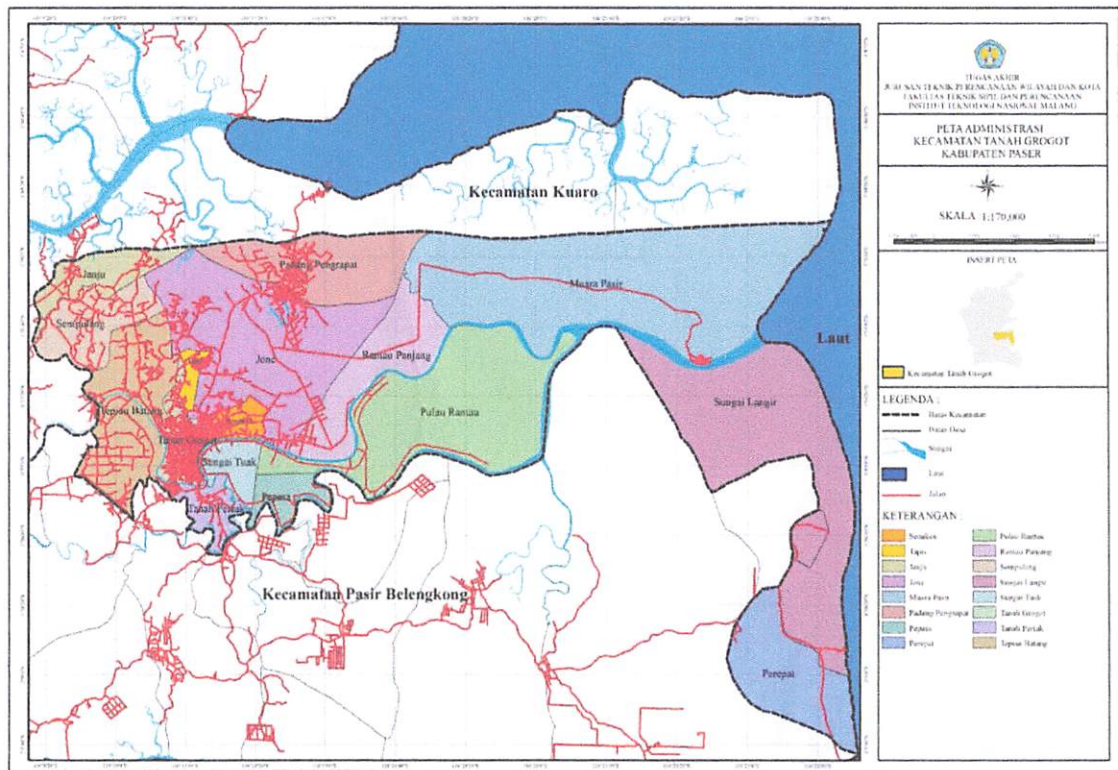
Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Grogot yaitu: Kelurahan Tanah Grogot, Desa Janju, Desa Padang Pengrapat, Desa Muara Pasir, Desa Perepat, Desa Sungai Langir, Desa Tapis, Desa Senaken, Desa Tepian Batang, Desa Sungai Tuak, Desa Rantau Panjang, Desa Pulau Rantau, Desa Jone, Desa Pepera, Desa Sempulang, dan Desa Tanah Periuik.

Pada Kecamatan Tanah Grogot yang memiliki luas wilayah kurang dari 2% dari total luas wilayah Kecamatan Tanah Grogot adalah Desa Tapis, Desa Pepara, Desa Senaken, Desa Tanah Periuk, dan Desa Sungai Tuak. Berbanding terbalik dengan Desa Muara Pasir yang memiliki wilayah paling luas dengan persentase 20,95% dari keseluruhan luas wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 luas wilayah Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kelurahan Tanah Grogot	10,36	2,60
2	Desa Janju	40,08	10,07
3	Desa Sempulang	8,20	2,06
4	Desa Tepian Batang	25,97	6,52
5	Desa Tanah Periuk	6,74	1,69
6	Desa Pepara	5,69	1,43
7	Desa Sungai Tuak	7,31	1,84
8	Desa Rantau Panjang	42,44	10,66
9	Desa Jone	46,78	11,75
10	Desa Padang Pengrapat	14,60	3,67
11	Desa Muara Pasir	83,41	20,95
12	Desa Perepat	24,00	6,03
13	Desa Pulau Rantau	44,00	11,05
14	Desa Sungai Langir	28,00	7,03
15	Desa Tapis	4,50	1,13
16	Desa Senaken	6,00	1,51
Jumlah		398,08	100

Sumber : BAPPEDA Kab. Paser



Gambar 4.1 Batas Administrasi Kecamatan Tanah Grogot

4.2.2. Rentang Kendali

Menjangkau pusat pemerintahan yang berpusat di Kelurahan Tanah Grogot, desa-desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot dapat menggunakan kendaraan bermotor dan sebagian desa harus menggunakan perahu atau kapal seperti Desa Muara Pasir, Desa Perepat, Desa Pulau Rantau, dan Desa Sungai Langir.

Jarak yang relatif jauh menyebabkan terhambatnya akses penduduk dalam menjangkau pelayanan publik, seperti halnya Desa Muara Pasir, Desa Pulau Rantau, Desa Rantau Panjang, Desa Perepat. Sebagai contoh Desa Muara Pasir merupakan desa dengan jarak tempuh yang kecil namun harus menempuh waktu yang lama, jarak tempuh kurang lebih 25 km harus menghabiskan waktu 90 menit, yang seharusnya dalam ukuran normal dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang masih buruk, ditambah ketika masuk musim penghujan, jalan tersebut sangat sulit untuk dilalui. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.3 Rentang kendali di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.3 Rentang Kendali di Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jarak Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Km)	Waktu Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Menit)	Jalan yang dilalui	Sarana Transportasi yang digunakan
1	Kelurahan Tanah Grogot	0	0	Darat	Kendaraan bermotor
2	Desa Janju	10	30	Darat	Kendaraan bermotor
3	Desa Sempulang	9	15	Darat	Kendaraan bermotor
4	Desa Tepian Batang	4	10	Darat	Kendaraan bermotor
5	Desa Tanah Periuk	2	10	Darat	Kendaraan bermotor
6	Desa Peparra	25	30	Darat	Kendaraan bermotor
7	Desa Sungai Tuak	2	15	Darat	Kendaraan bermotor

Lanjutan tabel 4.3

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jarak Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Km)	Waktu Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Menit)	Jalan yang dilalui	Sarana Transportasi yang digunakan
8	Desa Rantau Panjang	7	25	Darat	Kendaraan bermotor
9	Desa Jone	5	20	Darat	Kendaraan bermotor
10	Desa Padang Pengrapat	10	15	Darat	Kendaraan bermotor
11	Desa Muara Pasir	25	90	Darat & Sungai	Kendaraan bermotor & Perahu/Kapal
12	Desa Perepat	52	120	Darat & Laut	Kendaraan bermotor & Perahu/Kapal
13	Desa Pulau Rantau	7	60	Darat & Sungai	Kendaraan bermotor & Perahu/Kapal
14	Desa Sungai Langir	56	150	Darat & Laut	Kendaraan bermotor & Perahu/Kapal
15	Desa Tapis	4	10	Darat	Kendaraan bermotor
16	Desa Senaken	2	10	Darat	Kendaraan bermotor

Sumber : BPS Kab. Paser 2014

4.3. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tanah Grogot

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dan diperlukan dalam suatu wilayah. Keberadaan sarana dan prasarana dapat menunjang berbagai macam aktifitas masyarakat. Ketersediaan sarana di masing-masing desa untuk memenuhi kebutuhan penduduk sangat penting sebagai wadah untuk menampung kegiatan penduduk.

4.3.1. Sarana Pendidikan

Dari sisi ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Tanah Grogot sangat lengkap mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Untuk jenjang

pendidikan TK dan SD, hampir seluruh desa memilikinya berkisar antara 1-2 unit setiap desa. Untuk jenjang SLTP dan SLTA hanya beberapa desa yang memiliki kedua sarana pendidikan ini seperti Desa Janju, Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tanah Periuk, dan Desa Senaken. Untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi hanya terdapat di Desa Tanah Periuk dan Kelurahan Tanah Grogot. Dari setiap jenjang pendidikan, proporsi jumlah sarana pendidikan terbanyak terdapat di Kelurahan Tanah Grogot. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana Pendidikan (Unit)				
		TK	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Kelurahan Tanah Grogot	15	22	12	3	2
2	Desa Janju	1	1	2	1	0
3	Desa Sempulang	1	1	0	0	0
4	Desa Tepian Batang	2	1	0	3	0
5	Desa Tanah Periuk	2	2	1	3	1
6	Desa Peparu	1	1	0	0	0
7	Desa Sungai Tuak	0	1	0	0	0
8	Desa Rantau Panjang	1	1	1	0	0
9	Desa Jone	2	1	0	0	0
10	Desa Padang Pengrapat	4	4	2	0	0
11	Desa Muara Pasir	1	1	1	0	0
12	Desa Perepat	0	1	0	0	0
13	Desa Pulau Rantau	0	0	0	0	0
14	Desa Sungai Langir	0	1	0	0	0
15	Desa Tapis	1	1	2	0	0
16	Desa Senaken	1	1	1	1	0
	Jumlah	32	40	22	11	3

Sumber : BPS Kab. Paser 2014

4.3.2. Sarana Kesehatan

Jika dilihat dari bidang kesehatan jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Tanah Grogot terdiri dari puskesmas sebanyak 2 unit, puskesmas pembantu sebanyak 11 unit, polindes sebanyak 5 unit, dan

posyandu sebanyak 59 unit dengan jumlah sarana kesehatan terbanyak berada pada Kelurahan Tanah Grogot sebanyak 28 unit. Sarana kesehatan yang ada dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang disebar di masing-masing desa, adapun jumlah tenaga medis terbanyak ada di Kelurahan Tanah Grogot dan Desa Padang Pengrapat, sedangkan desa lainnya hanya memiliki tenaga kesehatan sebanyak 1 sampai 2 orang. Uraianya dapat dilihat pada tabel 4.5 jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana Kesehatan (Unit)				Jumlah
		Puskesmas	Pusban	Polindes	Posyandu	
1	Kelurahan Tanah Grogot	1	0	0	27	28
2	Desa Janju	0	1	0	2	3
3	Desa Sempulang	0	1	1	3	5
4	Desa Tepian Batang	0	1	1	4	6
5	Desa Tanah Periuk	0	1	1	4	6
6	Desa Peparu	0	1	0	1	2
7	Desa Sungai Tuak	0	1	1	2	4
8	Desa Rantau Panjang	0	1	1	2	4
9	Desa Jone	0	1	0	5	6
10	Desa Padang Pengrapat	1	0	0	3	4
11	Desa Muara Pasir	0	1	0	3	4
12	Desa Perepat	0	1	0	1	2
13	Desa Pulau Rantau	0	1	0	1	2
14	Desa Sungai Langir	0	0	0	1	1
15	Desa Tapis	0	0	0	0	0
16	Desa Senaken	0	0	0	0	0
Jumlah		2	11	5	59	77

Sumber : BPS Kab. Paser 2014

4.3.3. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan adalah sebagai tempat beribadah umat beragama. Di Kecamatan Tanah Grogot terdapat sarana peribadatan seperti masjid,

mushallah, gereja katolik dan gereja protestan. Adapun persebaran sarana peribadatan di Kecamatan Tanah Grogot dapat di lihat pada tabel 4.7 jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Sarana Peribadatan (Unit)				Jumlah
		Masjid	Mushalla	Gereja Katolik	Gereja Protestan	
1	Kelurahan Tanah Grogot	8	31	1	2	42
2	Desa Janju	4	7	0	0	11
3	Desa Sempulang	2	7	0	1	10
4	Desa Tepian Batang	2	5	0	0	7
5	Desa Tanah Periuk	3	7	0	0	10
6	Desa Pepera	3	0	0	0	3
7	Desa Sungai Tuak	5	1	0	0	6
8	Desa Rantau Panjang	2	2	0	0	4
9	Desa Jone	6	13	0	0	19
10	Desa Padang Pengrapat	3	6	0	0	9
11	Desa Muara Pasir		0	0	0	0
12	Desa Perepat	1	0	0	0	1
13	Desa Pulau Rantau	3	0	0	0	3
14	Desa Sungai Langir	1	0	0	0	1
15	Desa Tapis	2	0	0	0	2
16	Desa Senaken	1	0	0	0	1
Jumlah		46	79	1	3	129

Sumber : BPS Kab. Paser 2014

4.3.4. Sarana Pelayanan Umum

1. Sarana Lapangan Olahraga

Sarana lapangan olahraga merupakan salah satu sarana yang sangat penting dan sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan jasmani masyarakat. Kecamatan Tanah Grogot memiliki sarana lapangan olahraga seperti lapangan sepak bola, bulutangkis dan lapangan volly dan di setiap desa memiliki lapangan olahraga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 jumlah sarana lapangan olahraga.

**Tabel 4.7 Jumlah Sarana Lapangan Olahraga
Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013**

No	Nama Desa/Kelurahan	Sarana Lapangan Olahraga (Unit)			
		Lap. Sepak Bola	Lap. Bulutangkis	Lap. Volly	Taman Lingkungan
1	Kelurahan Tanah Grogot	2	1	1	1
2	Desa Janju	1	2	1	0
3	Desa Sempulang	1	3	1	0
4	Desa Tepian Batang	0	1	1	1
5	Desa Tanah Periuk	1	0	1	0
6	Desa Pepara	1	1	1	0
7	Desa Sungai Tuak	1	0	0	0
8	Desa Rantau Panjang	1	0	0	0
9	Desa Jone	0	1	1	0
10	Desa Padang Pangrapat	2	0	2	0
11	Desa Muara Pasir	1	0	0	0
12	Desa Perepat	1	0	0	0
13	Desa Pulau Rantau	1	1	0	0
14	Desa Sungai Langir	1	0	0	0
15	Desa Tapis	1	1	1	0
16	Desa Senaken	1	2	1	0

Sumber: BPS Kab. Paser 2014

2. Sarana Balai Pertemuan

Sarana balai pertemuan merupakan salah satu tempat berkumpul masyarakat atau aparat desa baik melakukan musyawarah desa maupun kegiatan lainnya serta sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan interaksi sosial. Dapat dilihat pada tabel 4.8 jumlah balai pertemuan Kecamatan Tanah Grogot.

4.3.5. Utilitas

1. Jaringan Jalan

Jaringan jalan merupakan akses atau penghubung suatu wilayah menuju wilayah lain. Berikut akan dijabarkan terkait panjang jalan tiap desa yang berada di Kecamatan Tanah Grogot. Dapat dilihat pada tabel 4.9 panjang jalan tiap desa di Kecamatan Tanah Grogot.

2. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat baik sebagai sarana penerangan maupun sebagai sumber energy penunjang kegiatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya infrastruktur ini juga bermanfaat sebagai sarana untuk menjaga dan meningkatkan keamanan wilayah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10 jumlah pelanggan listrik.

Tabel 4.8 Jumlah Balai Pertemuan Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Balai Pertemuan (Unit)
1	Kelurahan Tanah Grogot	1
2	Desa Janju	1
3	Desa Sempulang	1
4	Desa Tepian Batang	1
5	Desa Tanah Periuk	1
6	Desa Pepera	0
7	Desa Sungai Tuak	0
8	Desa Rantau Panjang	1
9	Desa Jone	1
10	Desa Padang Pengrapat	1
11	Desa Muara Pasir	1
12	Desa Perepat	0
13	Desa Pulau Rantau	1
14	Desa Sungai Langir	0
15	Desa Tapis	0
16	Desa Senaken	0

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

Tabel 4.9 Jumlah Pelanggan Listrik Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Pelanggan Listrik (KK)
1	Kelurahan Tanah Grogot	7.743
2	Desa Janju	487
3	Desa Sempulang	334
4	Desa Tepian Batang	632
5	Desa Tanah Periuk	679
6	Desa Pepera	117
7	Desa Sungai Tuak	293
8	Desa Rantau Panjang	184
9	Desa Jone	2.526
10	Desa Padang Pangrapat	1.235
11	Desa Muara Pasir	1.433
12	Desa Perepat	79
13	Desa Pulau Rantau	164
14	Desa Sungai Langir	67
15	Desa Tapis	464
16	Desa Senaken	1.253

Sumber : PLN Tanah Grogot, Tahun 2014

4.4. Perekonomian

Perekonomian adalah salah satu faktor yang sangat menunjang dan berpengaruh terhadap arah dan perkembangan suatu wilayah. Beberapa indikator aktifitas perekonomian yang perlu dikaji berkaitan dengan pemebentukan kecamatan baru adalah jumlah bank, lembaga keuangan non bank, kelompok pertokoan dan pasar.

4.4.1. Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan bank di Kecamatan Tanah Grogot hanya terdapat di Kelurahan Tanah Grogot sedangkan di desa lain tidak satupun yang memiliki lembaga keuangan bank. Lemabaga Keuangan non bank meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi. Untuk penjabarannya dapat dilihat pada tabel 4.12 jumlah lembaga keuangan dan non keuangan.

Tabel 4.10 Jumlah Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Lembaga Keuangan (Unit)	Lembaga Keuangan Non Bank (Unit)
1	Kelurahan Tanah Grogot	8	70
2	Desa Janju	0	4
3	Desa Sempulang	0	4
4	Desa Tepian Batang	0	2
5	Desa Tanah Periuk	0	10
6	Desa Peparu	0	1
7	Desa Sungai Tuak	0	1
8	Desa Rantau Panjang	0	5
9	Desa Jone	0	10
10	Desa Padang Pengrapat	0	2
11	Desa Muara Pasir	0	1
12	Desa Perepat	0	1
13	Desa Pulau Rantau	0	2
14	Desa Sungai Langir	0	1
15	Desa Tapis	0	5
16	Desa Senaken	0	24
Jumlah		8	143

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

4.4.2. Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang ada di Kecamatan Tanah Grogot berupa pasar sebanyak 11 unit dan minimarket sebanyak 15 unit. Pasar yang ada di Desa Senaken yang bernama pasar senaken yang melayani skala kabupaten. Untuk mendapatkan kebutuhan tersier, masyarakat desa yang ada di

Kecamatan Tanah Grogot harus mencapai ke pusat kota yaitu kelurahan Tanah Grogot, karena di desa mereka hanya terdapat pasar mingguan (pasar yang di adakan setiap 1 kali seminggu). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 jumlah sarana perdagangan di Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Perdagangan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

No	Nama Desa/Kelurahan	Pasar (Unit)	Minimarket (Unit)
1	Desa Janju	1	0
2	Desa Sempulang	1	0
3	Desa Tepian Batang	1	1
4	Kelurahan Tanah Grogot	2	12
5	Desa Tanah Periuk	0	0
6	Desa Pepara	1	0
7	Desa Sungai Tuak	0	0
8	Desa Rantau Panjang	0	0
9	Desa Jone	1	0
10	Desa Padang Pengrapat	1	0
11	Desa Muara Pasir	1	0
12	Desa Perepat	0	0
13	Desa Pulau Rantau	0	0
14	Desa Sungai Langir	0	0
15	Desa Tapis	1	1
16	Desa Senaken	1	1
Jumlah		11	15

Sumber : BPS Kab. Paser 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan Tanah Grogot merupakan pusat pelayanan publik. Untuk mendapatkan kebutuhan sekunder dan tersier, masyarakat desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot harus menuju ke pusat kota yaitu kelurahan Tanah Grogot karena pasar yang terdapat di desa hanya untuk melayani skala desa saja.

4.5. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan wilayah karena yang merasakan dampak dari pembangunan, dampak dari kebijakan adalah masyarakat. Masyarakat yang diambil dalam sample di penelitian ini adalah masyarakat umum yang merupakan penduduk asli yang di ambil dari tiap-tiap desa. Berikut adalah rekapan atau salinan dari beberapa hasil wawancara yaitu :

➤ Kelurahan Tanah Grogot

1. Bapak Arief Budiman

Setuju adanya pemekaran karena desa-desa yang letaknya jauh dari Pusat Pemerintahan, dan prasarana jalan yang kurang mendukung atau menyulitkan bagi masyarakat pelosok. Sehingga dengan pemekaran maka luasan wilayah Kecamatan Tanah Grogot akan dipersempit, diharapkan dengan cakupan wilayah yang semakin sempit mempercepat progress perkembangan Kota Tanah Grogot baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Saya memilih tetap di Kecamatan induk karena saya berdiam (bertempat tinggal) di pusat kota (Kecamatan) sehingga memudahkan akses ke segala urusan.

2. Ibu Rindayani

Setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot agar dalam urusan administrasi warga desa tidak jauh dari pusat kecamatan yang sekarang. Jika terjadi pemekaran Kecamatan Tanah Grogot, memilih tetap di Kecamatan Induk karena saya tinggal di Kecamatan tanah Grogot dan lebih dekat dengan pusat kecamatan.

➤ Desa Janju

1. Bapak Hendra

Setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena selama ini dengan luas wilayah yang luas dan akses yang buruk menyebabkan waktu tempuh ke pusat kecamatan sangat lama, bisa 2 – 3 jam jika sedang musim kemarau. Namun untuk di Desa Janju selama ini tidak ada masalah dalam mencapai pelayanan pemerintahan di pusat kota karena jaraknya hanya 5 km saja, jadi Desa Janju tetap di kecamatan induk.

2. Bapak Romi

Tidak setuju karena dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan Tanah Grogot akan semakin kecil, lalu adanya perubahan-perubahan administrasi di Kecamatan Tanah Grogot.

➤ Desa Sempulang

1. Bapak Supryanto

Setuju dengan adanya pemekaran namun tetap ikut dalam kecamatan induk yaitu Kecamatan Tanah Grogot, karena untuk urusan dengan pemerintahan masih dirasa terlayani. Jika jauh dari induk nanti maka lebih sulit untuk pelayanannya karena akan butuh biaya yang lebih besar lagi. Sehingga untuk saat ini Desa Sempulang masih merasa terlayani oleh Kecamatan Tanah Grogot.

2. Bapak Sukayat



Pemekaran sangat dibutuhkan untuk Kecamatan Tanah Grogot karena pembangunan yang tidak merata, hanya di pusat kecamatan dan sekitarnya. Walaupun fasilitas disini masih mencukupi namun ketimpangan tetap terasa karena lambannya

pembangunan di daerah sini. Desa Sempulang sampai saat ini belum merasakan pelayanan air bersih dari pemerintah. Kami selama ini hanya menggunakan air sumur dan ketika kemarau selalu terjadi kekeringan. Jika pemekaran Kecamatan Tanah Grogot terealisasi, saya lebih memilih keluar dari Kecamatan Tanah Grogot agar lebih diperhatikan oleh pemerintah yang baru.

➤ Tepian Batang

1. Bapak Saprullah

Isue pemekaran sudah ada dari tahun 2006, sehingga kalau ditanya sekarang pasti banyak masyarakat setuju dengan rencana ini, karena munculnya issue ini dari masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan beberapa desa di wilayah utara sangat susah dalam menjangkau pelayanan umum di pusat kecamatan karena jarak desa mereka yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama hingga 2 jam.

2. Bapak Syahmiki

Tidak setuju, karena jika dimekarkan nanti akan jauh dari induknya dan akan butuh biaya yang banyak lagi. Lebih baik seperti sekarang saja.

➤ Desa Tanah Periuk

1. Ibu Siti Aisyah

Setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena wilayah Kecamatan Tanah Grogot terlalu luas untuk 1 kecamatan. Untuk memilih kecamatan, saya lebih memilih kecamatan induk karena desa tanah periuk sudah dekat dengan pusat pemerintahan

2. Bapak Bakri



Masyarakat mengikuti yang terbaik saja dari pemerintahan, karena selama ini tidak merasa ada masalah apapun di desa kami, akses sudah bagus dan dengan jarak yang dekat dengan pusat kecamatan.

➤ Desa Pepara

1. Bapak Jusman

Saya sangat menginginkan pemekaran kecamatan Tanah Grogot karena Jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Grogot sangatlah banyak, sehingga pemerintah tidak terlalu fokus masyarakat mana yang mereka harus urusi. Sehingga kalau ada pemekaran, maka pemerintah akan lebih fokus mengurus wargax yang sedikit. Desa Pepara keluar dari Kec. Tanah Grogot karena ingin bergabung dengan desa yang lain yang berada di utara sungai untuk membentuk kecamatan sendiri.

2. Bapak Pitde

Jika pemekaran dapat menjamin mensejahterakan masyarakat saya sangat mendukung, namun jika yang terjadi malah sebaliknya, mending tetap seperti ini, cukup jangkauan pelayanannya saja yang perlu diperluas atau ditambah agar bisa menjangkau seluruh masyarakat sampai di ujung Kecamatan. Jika pemekaran itu tetap terjadi, saya lebih berharap desa Pepara tetap berada di Kecamatan Induk karena kami sudah merasa nyaman, tidak ada masalah.

➤ Desa Sungai Tuak

1. Bapak Ahmad

Mendukung adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena wilayahnya yang luas. Jika dibandingkan dengan wilayah yang ada di Pulau Jawa, satu kecamatan di Paser sama seperti satu kabupaten di Pulau Jawa.

2. Bapak Ahsan



Kami mengikuti yang terbaik saja dari pemerintahan, karena selama ini tidak merasa ada masalah apapun di desa kami, akses sudah bagus dan jarak yang dekat dengan pusat kecamatan.

➤ Rantau Panjang

1. Bapak Amir

Sudah lama adanya isu pemekaran di Kecamatan Tanah Grogot, Desa Rantau Panjang keluar dari kecamatan induk dan bergabung dengan desa-desa lain. Alasan ingin di mekarkan yaitu luasnya wilayah yang tidak dimanfaatkan. Jika dimekarkan mungkin banyak penduduk-penduduk pendatang dari sulawesi yang mungkin bertempat tinggal disini sehingga lahan yang awalnya kosong bisa terisi dengan adanya pembangunan rumah-rumah penduduk

2. Bapak Sarifudin
Setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot agar pemerintahan yang baru dapat dan mudah dijangkau oleh warga dan masyarakat.

➤ Desa Jone

1. Bapak Lamaluddin
Setuju dengan adanya pemekaran karena jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Grogot sudah semakin banyak sehingga perlu adanya pemekaran kecamatan. Penduduk desa Jone sudah bisa memenuhi untuk jadi satu kecamatan baru. Selain itu jarak dan waktu tempuh menuju pusat pemerintahan relatif jauh.
2. Bapak Rudi
Setuju jika Kecamatan Tanah Grogot akan dimekarkan dengan syarat terjaminnya pemerataan pembangunan dan tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh kesusahan dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dari kecamatan induk maupun kecamatan baru. Selain itu pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tanah Grogot semakin meningkat sehingga dapat mendukung pemekaran ini terjadi. Untuk Desa Jone tetap pada kecamatan yang sekarang.

➤ Desa Padang Pengrapat

1. Ibu Asmawati
Setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot agar meningkatkan taraf hidup masyarakat. Memilih keluar dari Kecamatan Tanah Grogot agar segala urusan lebih mudah atau cepat.
2. Bapak Natakusuma
Setuju dengan adanya pemekaran kecamatan Tanah Grogot karena jumlah penduduk dan SDM masih kurang, sarana dan prasarana belum memadai. Jika terjadi pemekaran di Kecamatan Tanah Grogot saya lebih memilih keluar dari Kecamatan Tanah Grogot.

➤ Desa Muara Pasir

1. Pak Udin



Sangat setuju dengan adanya pemekaran, karena wilayah kecamatan Tanah Grogot yang luas. Selain luas, pemerataan pembangunan juga kurang dirasakan yaitu aksesibilitasnya. Masih 25% tidak diperhatikan atau tidak direspon oleh pemerintah serta belum mendapatkan bantuan dari kabupaten.

2. Bu Andi Rosnani
Sangat mendukung pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena kurangnya fasilitas pendidikan untuk persiapan anak-anak kami yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat

bekerja dan tidak menjadi pengangguran. Sarana kesehatan yang ada tidak memenuhi syarat.

➤ Desa Perepat

1. Bapak Darwan

Saya setuju dan mendukung adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena di Desa Perepat sendiri belum tersentuh pelayanan secara maksimal. Sehingga kami kesulitan dalam hal aksesibilitas. Setuju jika Desa Perepat membentuk kecamatan baru.

2. Bapak Noor Amin

Mendukung pemekaran Kecamatan Tanah Grogot agar kami bisa mendapatkan pelayanan publik yang cukup dekat dan pembagian dana bantuan lebih merata. Saya lebih memilih Desa Perepat keluar dari kecamatan yang sekarang.

➤ Desa Pulau Rantau

1. Bapak Awalludin

Setuju jika Kecamatan Tanah Grogot dimekarkan karena masalah aksesibilitas dan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal. Jarak tempuh dari desa menuju pusat kecamatan melalui darat sekitar 8 Km dan 10 Km melalui sungai dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam melalui Desa Rantau Panjang. Saya setuju jika Desa Pulau Rantau keluar dari kecamatan induk asalkan pemerintahan kecamatan yang baru dapat dijangkau.

2. Bapak Kasim

Setuju sekali dengan adanya pemekaran karena kami kesulitan menjangkau pusat pemerintahan. Jarak dari desa kami ke Tanah Grogot sekitar 8 Km dan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke Kecamatan Tanah Grogot. Lebih baik Desa Pulau Rantau gabung dengan kecamatan baru saja.

➤ Desa Sungai Langir

1. Bapak H. Kasran

Masyarakat desa sungai langir sangat berharap adanya pemerataan pembangunan, peningkatan akses menuju pusat kecamatan, jika dengan kondisi sekarang tidak dapat memenuhi hal tersebut, menurut saya memang lebih baik kecamatan Tanah Grogot dimekarkan agar pemerintah bisa fokus menangani wilayahnya yang lebih kecil.

2. Bapak Sihabudin

Kami setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena masalah akses didesa kami yang rusak dan bergelombang. Dari rencana pertemuan 10 kali dengan pihak pemerintah namun hanya sekali saja diadakannya pertemuan. Jika musim hujan kami kesulitan untuk tembus menuju kecamatan.

➤ Desa Tapis

1. Bapak Rudi

Kami sangat mendukung pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Alasannya untuk percepatan pembangunan. Kalau untuk memilih kecamatan, Desa Tapis keluar dari kecamatan induk agar lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah yang baru.

2. Ibu Fazlena



Saya mendukung adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot, alasannya agar pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot bisa merata. Apalagi khusus desa-desa yang jauh belum tersentuh pembangunan. Desa Tapis lebih baik tetap di Kecamatan Induk karena dirasa masih terjangkau untuk aksesibilitasnya.

➤ Desa Senaken

1. Bapak Amsah

Setuju saja kalau masalah pemekaran asalkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kalau untuk memilih kecamatan, tergantung pusat pemerintahannya saja. Kalau pusat kecamatan yang baru lebih dekat lebih baik pilih ikut kecamatan yang baru.

2. Aida

Tidak setuju, alasannya karena Desa Senaken baru saja dimekarkan dari Desa Jone, jadi repot untuk pembagian administrasinya nanti.

Penjabaran hasil wawancara diatas menggambarkan hasil survey peneliti, namun yang ditampilkan hanya sebagian dari hasil wawancara yang dilakukan. Sehingga tidak semua hasil wawancara dijabarkan dalam penulisan ini mengingat jumlah responden yang banyak. Namun dari hasil wawancara diatas sudah dapat dilihat kondisi lapangan di Kecamatan Tanah Grogot. Berikut akan simpulkan melalui tabel 4.14 pendapat dan alasan masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Tabel berikut ini merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 4.12 Pendapat dan alasan masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama	Pendapat		Alasan Masyarakat
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan	
1	Kelurahan Tanah Grogot	Arief Budiman	Setuju	Kecamatan Induk	Karena prasarana jalan menyulitkan bagi desa-desa pelosok untuk mendapatkan pelayanan
2	Kelurahan Tanah Grogot	Ridayani	Setuju	Kecamatan Induk	Supaya urusan administrasi desa lebih mudah dan dekat
3	Desa Janju	Hendra	Setuju	Kecamatan Induk	Karena luas wilayah dan akses yang buruk menyebabkan jarak dan waktu tempuh relatif lama
4	Desa Janju	Romi	Tidak Setuju	Kecamatan Induk	Karena adanya pemekaran, kecamatan tanah grogot semakin kecil
5	Desa Sempulang	Sukayat	Setuju	Kecamatan Induk	Pelayanan yang tidak merata di setiap desa
6	Desa Sempulang	Supryanto	Setuju	Kecamatan Induk	Pelayanan terhadap desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan masih belum terlayani dengan baik
7	Desa Tepian Batang	Syuhmiki	Tidak Setuju	Kecamatan Induk	Karena kesulitan untuk menjangkau kecamatan baru dan butuh biaya yang lebih lagi jika dimerkarkan
8	Desa Tepian Batang	Saprullah	Setuju	Kecamatan Induk	Karena beberapa desa sangat susah menjangkau pelayanan umum

Lanjutan tabel 4.12

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama	Pendapat		Alasan Masyarakat
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan	
9	Desa Tanah Periuik	Siti Aisyah	Setuju	Kecamatan Induk	Karena luas wilayah, terlalu luas untuk satu kecamatan
10	Desa Tanah Periuik	Bakri	Tidak Setuju	Kecamatan Induk	Tidak merasa ada masalah dan akses di desa kami bagus dan jarak dekat dengan pusat
11	Desa Pepar	Jusman	Setuju	Kecamatan Baru	Karena jumlah penduduk yang padat
12	Desa Pepar	Pitde	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk	Harapan dari pemekaran adalah jangkauan pelayanan terhadap masyarakat
13	Desa Sungai Tuak	Ahmad	Setuju	Kecamatan Induk	Karena wilayahnya terlalu luas
14	Desa Sungai Tuak	Ahsan	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk	Mengikuti yang terbaik dari pemerintah karena tidak merasa ada masalah
15	Desa Rantau Panjang	Sarifudin	Setuju	Kecamatan Baru	Berharap pusat pemerintahan baru mudah dijangkau oleh masyarakat
16	Desa Rantau Panjang	Amir	Setuju	Kecamatan Baru	Karena wilayahnya terlalu luas
17	Desa Jone	Lamaluddin	Setuju	Kecamatan Baru	Jumlah penduduk semakin banyak
18	Desa Jone	Rudi	Setuju	Kecamatan Induk	Karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat
19	Desa Padang Pengrapat	Asmawati	Setuju	Kecamatan Baru	Supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat

Lanjutan tabel 4.12

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama	Pendapat		Alasan Masyarakat
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan	
					sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat dipenuhi
20	Desa Padang Pengrapat	Natakusuma	Setuju	Kecamatan Baru	Karena jumlah penduduk dan SDM masih kurang
21	Desa Muara Pasir	Andi Rosnani	Setuju	Kecamatan Baru	Karena kurangnya fasilitas-fasilitas di desa-desa pelosok
22	Desa Muara Pasir	Udin	Setuju	Kecamatan Baru	Karena wilayahnya terlalu luas dan aksesibilitas yang kurang baik
23	Desa Perepat	Darwan	Setuju	Kecamatan Baru	Karena belum tersentuh pelayanan dan kesulitan dalam aksesibilitas
24	Desa Perepat	Noor Amin	Setuju	Kecamatan Baru	Agar mendapatkan pelayanan yang dekat dan pembagian dana bantuan merata
25	Desa Pulau Rantau	Kasim	Setuju	Kecamatan Baru	Kesulitan menjangkau pusat pemerintahan karena jarak dan waktu yang relatif lama
26	Desa Pulau Rantau	Awalludin	Setuju	Kecamatan Baru	Karena masalah aksesibilitas dan pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal
27	Desa Sungai Langir	H. Kasran	Setuju	Kecamatan Baru	Berharap adanya pemerataan pembangunan, dan peningkatan akses
28	Desa Sungai Langir	Sihabudin	Setuju	Kecamatan Baru	Karena masalah akses yang rusak

Lanjutan tabel 4.12

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama	Pendapat		Alasan Masyarakat
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan	
29	Desa Tapis	Rudi	Setuju	Kecamatan Baru	Alasannya untuk mempercepat pembangunan
30	Desa Tapis	Fazlena	Setuju	Kecamatan Induk	Alasannya agar pembangunan bisa merata baik kecamatan induk maupun kecamatan baru
31	Desa Senaken	Amsah	Setuju	Kecamatan Baru	Harapan dari pemekaran yaitu kesejahteraan masyarakat dan jangkauan pelayanan
32	Desa Senaken	Aida	Tidak Setuju	Kecamatan Induk	Karena desa senaken baru dimekarkan dan khawatir kendala dalam pembagian wilayah

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

BAB V

ANALISA DAN HASIL

Dalam bab analisa dan hasil akan menjabarkan hasil analisa dari setiap sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu analisa karakter wilayah, analisa aspirasi masyarakat dan menguji kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

5.1. Analisa Karakter Wilayah

Kecamatan Tanah Grogot adalah Ibukota Kabupaten Paser, sebagai ibukota kabupaten tentunya ketersediaan sarana, prasarana serta infrastruktur yang ada lebih memadai dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Perkembangan pembangunan di Kecamatan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat mengingat lokasi yang strategis dan didukung dengan kondisi topografi yang datar. Dengan demikian, kondisi seperti ini menjadi daya tarik bagi penduduk untuk bermigrasi dan melakukan segala bentuk aktivitas di Kecamatan Tanah Grogot. Potensi ekonomi yang berkembang pesat di wilayah ini yaitu perdagangan dan jasa di wilayah Kelurahan Tanah Grogot, Desa Senaken, dan Desa Jone. Pusat pemerintahan juga terkonsentrasi di Kelurahan Tanah Grogot. Selain itu, terdapat potensi pertanian di Desa Sungai Tuak, Desa Rantau Panjang, Desa Pulau Rantau, dan Desa Pepara. Mengingat lokasi Kecamatan Tanah Grogot yang sangat luas dan pembangunan terpusat di beberapa wilayah saja, pemerataan pembangunan dirasakan belum merata untuk bagian wilayah Kecamatan Tanah Grogot yang lain.

Ketimpangan pemerataan pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot masih terlihat sekali terutama di desa-desa tertinggal dan kurang tersentuh pembangunan. Biasanya desa-desa ini sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian. Daerah yang terisolir atau jauh dari pembangunan, yaitu Desa Perepat, Desa Sungai Langir, Desa Pulau Rantau dan Desa Muara Pasir. Keempat desa ini berada di kawasan pesisir. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kecamatan Tanah Grogot ini ditunjukkan dengan minimnya ketersediaan pelayanan publik seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih.

Jika meninjau permasalahan aksesibilitas, masyarakat dari desa-desa tertinggal, memiliki jarak yang relatif dekat dengan pusat Kecamatan Tanah Grogot, namun harus menempuh waktu yang lama untuk menjangkau akses pelayanan publik. Terlihat bahwa adanya

jaringan jalan yang sangat buruk di beberapa desa yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan. Misalnya, di Desa Perepat melihat kondisi jalan yang rusak akibat diguyur hujan, mengakibatkan jalan tersebut sulit untuk dilalui kendaraan. Akibatnya, membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk mendapatkan akses pelayanan publik di pusat kota.

5.1.1. Kependudukan

Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan spasial berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pola seperti ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan di suatu wilayah.

Pada tabel persebaran penduduk dapat dilihat jumlah penduduk paling banyak berada di Kelurahan Tanah Grogot, kemudian disusul Desa Senaken 7523 jiwa penduduk. Jumlah penduduk dalam jumlah kecil terdapat di Desa Sungai Langir sebanyak 406 jiwa dan Desa Perepat sebanyak 479 jiwa. Persebaran penduduk ditampilkan dalam bentuk persentase, semakin besar persentase memperlihatkan semakin memusatnya penduduk di wilayah tersebut. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada setiap desa dibanding total keseluruhan populasi di Kecamatan Tanah Grogot dikali 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran penduduk di Kecamatan Tanah Grogot dapat di lihat pada tabel 5.1 persebaran penduduk.

Perhitungan yang digunakan untuk mendapatkan persentase persebaran penduduk sebagai berikut :

$$\text{Persebaran Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Keseluruhan}} \times 100\%$$

Jika di perhatikan pada tabel 5.1 persebaran penduduk Kecamatan Tanah Grogot masih mengelompok pada wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibukota kabupaten terutama pada Kelurahan Tanah Grogot sebagai wilayah pusat kota. Hampir 49% penduduk Kecamatan Tanah Grogot bertempat tinggal di pusat kota yaitu kelurahan Tanah Grogot, sedangkan sisanya penduduk tersebar di 15 desa yang lain. Tidak meratanya persebaran penduduk menyebabkan luas lahan di pusat kota menjadi sempit, sedangkan di wilayah lainnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan spasial berkaitan dengan pemerataan pembangunan akan mengarah kepada wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih besar. Mengingat kebutuhan akan prasarana, sarana serta utilitas penunjang kota akan menunjang wilayah dengan penduduk yang terbesar.

**Tabel 5.1. Persebaran Penduduk Kecamatan Tanah Grogot
Tahun 2013**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah (KK)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1	Kelurahan Tanah Grogot	12.056	39.551	48,6
2	Desa Janju	808	2.613	3,2
3	Desa Sempulang	630	1.965	2,4
4	Desa Tepian Batang	1.473	4.968	6,1
5	Desa Tanah Periuk	1.007	3.638	4,5
6	Desa Peparu	194	631	0,8
7	Desa Sungai Tuak	485	1.663	2,0
8	Desa Rantau Panjang	340	1.240	1,5
9	Desa Jone	1.357	5.078	6,2
10	Desa Padang Pengrapat	1.202	4.126	5,1
11	Desa Muara Pasir	1.076	3.816	4,7
12	Desa Perepat	144	479	0,6
13	Desa Pulau Rantau	206	837	1,0
14	Desa Sungai Langir	118	406	0,5
15	Desa Tapis	809	2.789	3,4
16	Desa Senaken	2.205	7.523	9,3
Jumlah		24.110	81.323	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014

Ciri-ciri wilayah yang berkembang yaitu memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Kepadatan penduduk dipengaruhi dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Kepadatan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

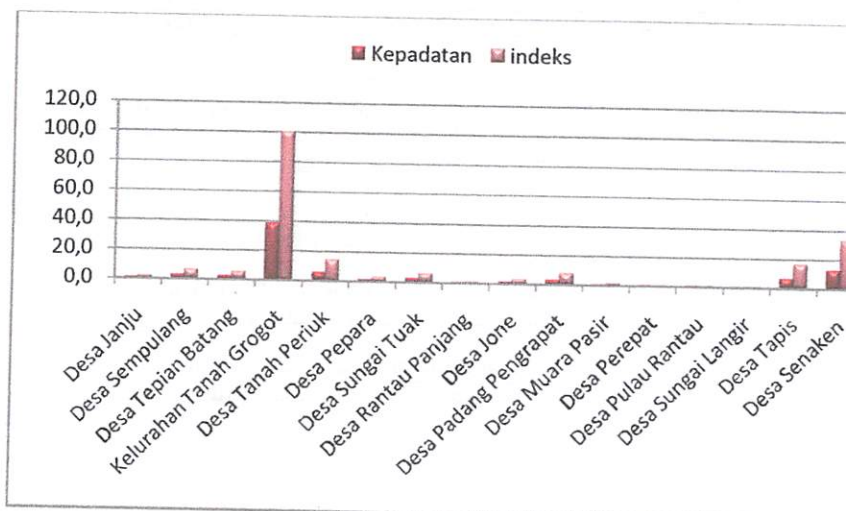
Selanjutnya untuk mengetahui indeks menurut kepadatan penduduk dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Jumlah kepadatan yang indeksnya dicari}}{\text{Jumlah kepadatan yang indeksnya tertinggi}} \times 100\%$$

Tabel 5.2. Indeks Kepadatan Penduduk Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2013

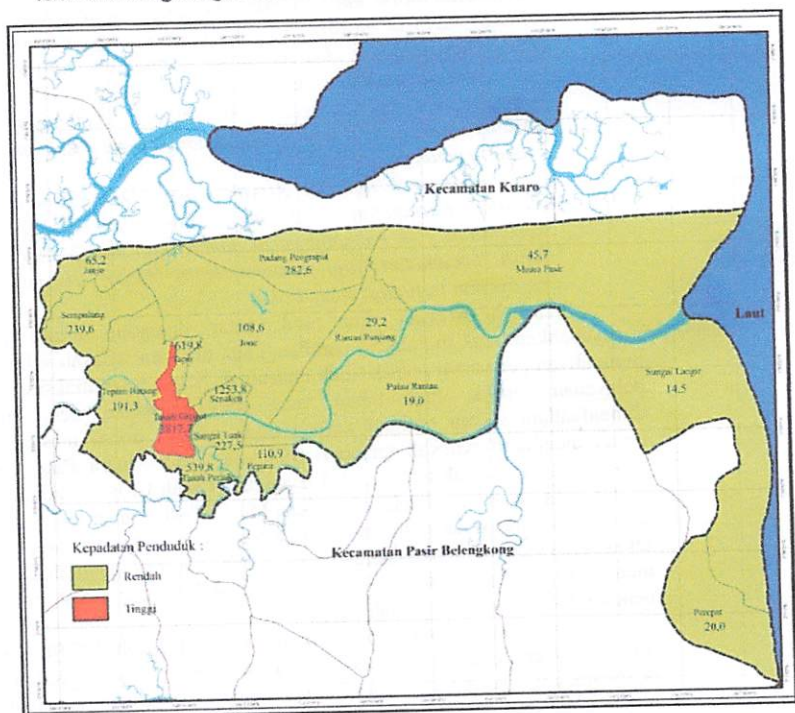
No	Nama Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Indeks	Kategori
1	Kelurahan Tanah Grogot	10,36	3.817,7	100,0	Tinggi
2	Desa Janju	40,08	65,2	1,7	Rendah
3	Desa Sempulang	8,20	239,6	6,3	Rendah
4	Desa Tepian Batang	25,97	191,3	5,0	Rendah
5	Desa Tanah Periuk	6,74	539,8	14,1	Rendah
6	Desa Peparu	5,69	110,9	2,9	Rendah
7	Desa Sungai Tuak	7,31	227,5	6,0	Rendah
8	Desa Rantau Panjang	42,44	29,2	0,8	Rendah
9	Desa Jone	46,78	108,6	2,8	Rendah
10	Desa Padang Pengrapat	14,60	282,6	7,4	Rendah
11	Desa Muara Pasir	83,41	45,7	1,2	Rendah
12	Desa Perepat	24,00	20,0	0,5	Rendah
13	Desa Pulau Rantau	44,00	19,0	0,5	Rendah
14	Desa Sungai Langir	28,00	14,5	0,4	Rendah
15	Desa Tapis	4,50	619,8	16,2	Rendah
16	Desa Senaken	6,00	1.253,8	32,8	Rendah

Sumber : Hasil Analisa, Tahun 2015



Gambar 5.1 Diagram Indeks Kepadatan Penduduk Kecamatan Tanah Grogot
Sumber : Hasil Analisa

Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah mengindikasikan semakin tinggi kriteria/tingkat kekotaan kawasan tersebut. Dari tabel kepadatan penduduk diatas menunjukkan bahwa desa/kelurahan yang memiliki indeks tertinggi adalah Kelurahan Tanah Grogot sedangkan indeks yang terendah adalah Desa Sungai Langir. Hal tersebut dapat terlihat bahwa ciri perkotaan terlihat di kelurahan Tanah Grogot dimana kelurahan Tanah Grogot telah menjadi ibukota Kecamatan Tanah Grogot sejak Kecamatan ini dibentuk, sedangkan Desa Sungai langir sangat jauh dari ciri perkotaan. Hasil analisa ini juga telah didukung dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan.



Gambar 5.2 Kepadatan Penduduk
Sumber : Hasil Analisa

5.1.2. Luas wilayah

Luasnya wilayah dan jarak antar desa di Kecamatan Tanah Grogot makin menguatkan alasan penataan dan pemekaran kecamatan. Ditunjang pula dengan keinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga dan pemerataan pembangunan merupakan alasan mendasar diperlukannya penataan dan pemekaran kecamatan.

Menurut Pak Amir warga Desa Rantau Panjang
"Sudah lama adanya isu pemekaran di Kecamatan Tanah Grogot, Desa Rantau Panjang keluar dari kecamatan induk dan bergabung dengan desa-desa lain. Alasan ingin di mekarkan yaitu luasnya wilayah yang tidak dimanfaatkan. Jika dimekarkan mungkin banyak penduduk-penduduk pendatang dari sulawesi yang mungkin bertempat tinggal disini sehingga lahan yang awalnya kosong bisa terisi dengan adanya pembangunan rumah-rumah penduduk"

Menurut Ibu Siti Aisyah warga Desa Tanah Periuk "Kecamatan Tanah Grogot sangat luas untuk 1 kecamatan, jadi memang perlu dimekarkan jadi 2 atau lebih kecamatan lagi supaya lebih efektif dalam pelayanan terhadap masyarakat"

Luasnya wilayah dan jarak antar desayang relatif jauh menyebabkan tidak meratanya pembangunan di suatu wilayah sehingga menjadikan pelayanan publik tidak maksimal. Selain tidak maksimalnya pelayanan publik, luas lahan yang dimiliki suatu desa tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya minat masyarakat untuk mendiami wilayah tersebut. Misalnya Desa Muara Pasir yang memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Tanah Grogot yaitu 20,9 % dari luas kecamatan. Kondisi di Desa Muara Pasir sangat terbelakan, namun memiliki potensi sumber daya alam dari segi perikanan karena lokasi desa yang berada di daerah pesisir. Namun jumlah penduduk yang mendiami di desa tersebut hanya sebesar 4,7 % dari total jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Grogot.

Kecamatan Tanah Grogot memiliki luas wilayah 398,08 Km². Menurut Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan menyebutkan pembentukan kecamatan berdasarkan luas daerah untuk wilayah Kalimantan minimal 12,5 Km². Dengan demikian, jika Kecamatan Tanah Grogot dilakukan pemekaran kecamatan baru tidak menjadi masalah mengingat luas wilayah Kecamatan Tanah Grogot 30 kali lipat dari standar yang di tentukan oleh kepmendagri tersebut.

5.1.3. Rentang Kendali

Kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana (aksesibilitas) dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat tersebut sangat berjauhan, maka aksesibilitas antara keduanya rendah. Untuk menjangkau pusat pemerintahan yang berpusat di Kelurahan Tanah Grogot, desa-desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot dapat menggunakan kendaraan bermotor dan sebagian desa harus menggunakan perahu atau kapal seperti Desa Pepara, Desa Pulau Rantau, Desa Sungai Langir. Jarak yang relatif jauh menyebabkan terhambatnya akses penduduk dalam menjangkau pelayanan publik. Sebagai contoh Desa Pulau Rantau merupakan desa dengan jarak tempuh yang relatif dekat namun harus menempuh waktu yang lama, jarak tempuh kurang lebih 8 Km harus menghabiskan waktu 60 menit, yang seharusnya dalam ukuran normal dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Untuk analisis jarak antar pusat pelayanan menggunakan waktu tempuh sebagai pembanding. Analisis ini menggunakan data waktu tempuh dengan kecepatan normal dibanding dengan waktu tempuh eksisting (hasil observasi dan wawancara). Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbandingan antara desa/kelurahan dalam menjangkau pusat pelayanan di Kelurahan Tanah Grogot. Biasanya jarak yang relatif jauh menyebabkan terhambatnya akses penduduk dalam menjangkau pelayanan publik. Dengan menggunakan gambar, dapat dilihat kondisi dilapangan berdasarkan rentang kendalinya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.2 rentang kendali di Kecamatan Tanah Grogot.

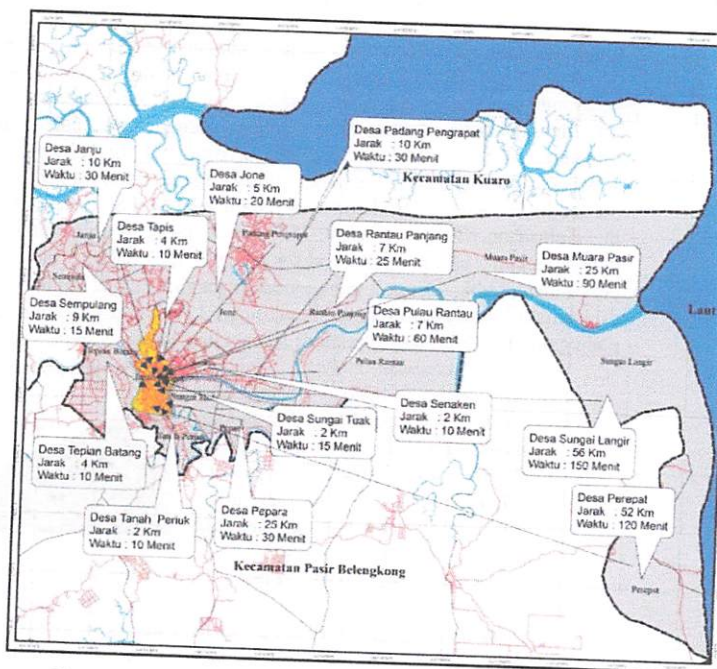
Menurut Pak Sukayat masyarakat Desa Sempulang "Jarak tempuh Desa Sempulang menuju Pusat Pemerintahan sekitar 9 Km, kalau waktu tempuhnya sekitar 15 menitan. Masalah jarak dan waktu tidak menjadi kendala karena jalan sudah di aspal.



Menurut Pak Latif Desa Muara Pasir "Masyarakat Desa Muara Pasir setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot karena dari Desa Muara Pasir menuju pusat pemerintahan yang ada di Kelurahan Tanah Grogot sangat jauh dengan jarak tempuh sekitar 25 Km dan butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai pusat kecamatan yang berada di Kelurahan Tanah Grogot disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak. Jika pada saat musim hujan masyarakat

kesulitan untuk melewati jalan tersebut bahkan bisa terjadi banjir karena posisi jalan yang lebih rendah dari pada sungai serta belum adanya perkerasan jalan.”

Menurut Pak Awaluddin Kepala Desa Pulau Rantau “ jarak tempuh dari desa menuju pusat kecamatan melalui darat sekitar 8 Km dan 10 Km melalui sungai dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam melalui Desa Rantau Panjang. Untuk masyarakat di RT 7 yang berada di ujung desa butuh waktu setengah jam untuk mendapatkan pelayanan kantor desa dan menempuh waktu hampir 1,5 jam hingga sampai ke kantor camat yang berada di Kelurahan Tanah Grogot.”



Gambar 5.3 Rentang Kendali di Kecamatan Tanah Grogot

Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2015

Adapun rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung indeks tingkat aksesibilitas yaitu :

$$\text{Rata - rata} = \frac{\text{Total jarak atau waktu tempuh}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}}$$

Setelah mendapatkan rata-rata dari jarak tempuh dan waktu tempuh menuju pusat kecamatan, selanjutnya mencari tingkat aksesibilitas tiap desa/kelurahan. Di asumsikan bahwa tingkat aksesibilitas dikatakan tinggi jika jarak/waktu tempuhnya \leq nilai rata-rata dan sebaliknya tingkat aksesibilitas dikatakan rendah jika jarak/waktu tempuhnya \geq nilai rata-rata. Semakin semakin dekat jarak tempuh suatu desa/kelurahan maka semakin tinggi tingkat aksesibilitasnya dan sebaliknya semakin jauh jarak tempuh suatu desa maka semakin rendah tingkat aksesibilitasnya.

Tabel 5.3. Tingkat Aksesibilitas Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Jarak Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Km)	Tingkat Aksesibilitas	Waktu Tempuh Dari Ibukota Kecamatan (Menit)	Tingkat Aksesibilitas
1	Kelurahan Tanah Grogot	0	Tinggi	0	Tinggi
2	Desa Janju	10	Tinggi	30	Tinggi
3	Desa Sempulang	9	Tinggi	15	Tinggi
4	Desa Tepian Batang	4	Tinggi	10	Tinggi
5	Desa Tanah Periuk	2	Tinggi	10	Tinggi
6	Desa Pepara	25	Rendah	30	Tinggi
7	Desa Sungai Tuak	2	Tinggi	15	Tinggi
8	Desa Rantau Panjang	7	Tinggi	25	Tinggi
9	Desa Jone	5	Tinggi	20	Tinggi
10	Desa Padang Pengrapat	10	Tinggi	15	Tinggi
11	Desa Muara Pasir	25	Rendah	90	Rendah
12	Desa Perepat	52	Rendah	120	Rendah
13	Desa Pulau Rantau	7	Tinggi	60	Rendah
14	Desa Sungai Langir	56	Rendah	150	Rendah
15	Desa Tapis	4	Tinggi	10	Tinggi
16	Desa Senaken	2	Tinggi	10	Tinggi
	Rata-rata	15		41	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan perhitungan jarak tempuh dari desa-desa menuju pusat kecamatan, rata-rata jarak tempuhnya yaitu 15 Km. Dari rata-rata jarak tempuh tersebut terdapat desa-desa yang memiliki jarak tempuh di atas rata-rata, sehingga menyebabkan desa-desa tersebut sukar menjangkau pusat kecamatan. Dengan demikian, desa-desa yang memiliki jarak tempuh diatas rata-rata dapat dikategorikan bahwa desa-desa tersebut memiliki aksesibilitas yang rendah. Adapun desa-desa yang dikategorikan diluar jangkauan pusat pemerintahan yaitu Desa Pepara, Desa Muara Pasir, Desa Perepat dan Desa Sungai Langir. Desa-desa tersebut dikategorikan diluar jangkauan karena memiliki jarak tempuh yang melebihi rata-rata yaitu diatas 15 Km. Sedangkan untuk rata-rata waktu tempuhnya yaitu 41 menit. Desa-desa yang memiliki aksesibilitas rendah yaitu Desa Muara Pasir, Desa Perepat, Desa Pulau Rantau dan Desa Sungai Langir.

Dari data jarak tempuh dan gambar rentang kendali, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan rata-rata jarak tempuh dan waktu tempuh menuju pusat kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi yaitu desa-desa yang relatif dekat dengan pusat kecamatan seperti Desa Janju, Desa Sempulang, Desa Tepian Batang, Desa Tapis, Desa Senaken, Desa Jone, Desa Rantau Panjang, Desa Sungai Tuak, Desa Padang Pangrapat dan Desa Tanah Priuk. Sedangkan desa lainnya memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah.

5.1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana suatu wilayah baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan jaminan suatu wilayah untuk berkembang. Di asumsikan bahwa semakin memusat pembangunan sarana publik, maka semakin memusat pertumbuhan suatu wilayah dan semakin memusatnya aktivitas penduduk, sehingga menyebabkan ketimpangan semakin besar.

Cara Menghitung Rasio dan Indeks dapat dilihat dari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 2010 TANGGAL : 21 OKTOBER 2010. Rasio Fasilitas adalah perbandingan jumlah fasilitas terhadap jumlah penduduk.

$$Rasio = \frac{\text{Jumlah Fasilitas}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

$$Indeks = \frac{\text{nilai rasio}}{\text{nilai rasio tertinggi}} \times 100\%$$

Tabel 5.4. Indeks Sarana Pendidikan Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Kelurahan/Desa	Σ Sarana Pendidikan				Σ Penduduk	Rasio				Indeks				Klasifikasi			
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	1	2	3	4
1	Kelurahan Tanah Grogot	15	22	12	3	39551	3.79	5.56	3.03	0.76	24	23	38	9	R	R	S	R
2	Desa Janju	1	1	2	1	2613	3.83	3.83	7.65	3.83	24	16	95	46	R	R	T	S
3	Desa Sempulang	1	1	0	0	1965	5.09	5.09	0.00	0.00	32	21	0	0	R	R	R	R
4	Desa Tepian Batang	2	1	0	3	4968	4.03	2.01	0.00	6.04	25	8	0	73	R	R	R	T
5	Desa Tanah Periuk	2	2	1	3	3638	5.50	5.50	2.75	8.25	35	22	34	100	S	R	S	T
6	Desa Peparu	1	1	0	0	631	15.8	15.85	0.00	0.00	100	64	0	0	T	S	R	R
7	Desa Sungai Tuak	0	1	0	0	1663	0.00	6.01	0.00	0.00	0	24	0	0	R	R	R	R
8	Desa Rantau Panjang	1	1	1	0	1240	8.06	8.06	8.06	0.00	51	33	100	0	S	R	T	R
9	Desa Jone	2	1	0	0	5078	3.94	1.97	0.00	0.00	25	8	0	0	R	R	R	R
10	Desa Padang Pengrapat	4	4	2	0	4126	9.69	9.69	4.85	0.00	61	39	60	0	S	S	S	R
11	Desa Muara Pasir	1	1	1	0	3816	2.62	2.62	2.62	0.00	17	11	32	0	R	R	R	R
12	Desa Perepat	0	1	0	0	479	0.00	20.88	0.00	0.00	0	85	0	0	R	T	R	R
13	Desa Pulau Rantau	0	0	0	0	837	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	R	R	R	R
14	Desa Sungai Langir	0	1	0	0	406	0.00	24.63	0.00	0.00	0	100	0	0	R	T	R	R
15	Desa Tapis	1	1	2	0	2789	3.59	3.59	7.17	0.00	23	15	89	0	R	R	T	R
16	Desa Senaken	1	1	1	1	7523	1.33	1.33	1.33	1.33	8.38	5.3	16.4	16	R	R	R	R

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Keterangan : T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah



SMP Desa Pepara

SMP Desa Rantau Panjang

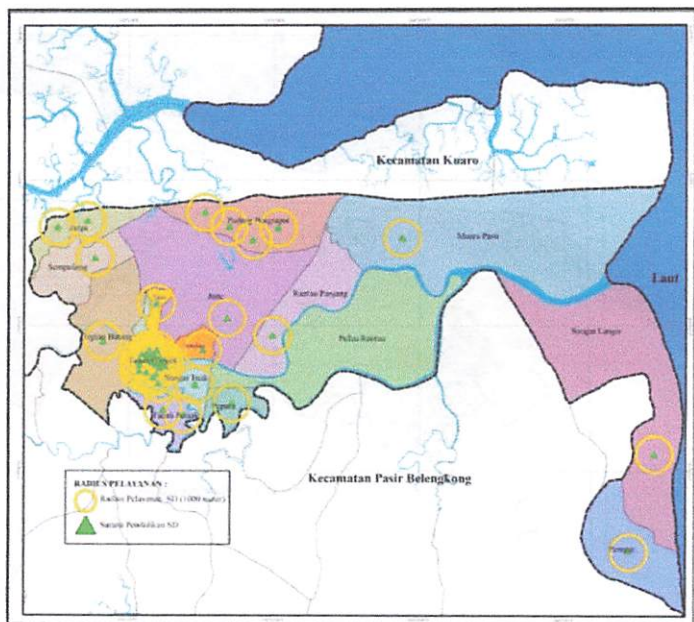
SD Desa Muara Pasir

Gambar 5.4 Kondisi Sarana Pendidikan di Kecamatan Tanah Grogot

Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Analisa data ketersediaan sarana dan prasarana menunjukkan tingkat ketersediaan masing-masing sarana pada suatu lokasi, sehingga bisa dilihat desa/kelurahan mana yang mempunyai fasilitas lengkap dan begitupula sebaliknya. Uraian tabel ketersediaan sarana di atas menunjukkan ada beberapa sarana yang belum tersedia pada setiap desa/kelurahan. Konsentrasi sarana hanya di pusat kota yaitu Kelurahan Tanah Grogot yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemerataan pembangunan walaupun rasionya juga menunjukkan rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan muncul informasi bahwa masyarakat masih belum mendapatkan akses pendidikan yang maksimal karena terbatasnya sarana pendidikan. Misalnya di Desa Muara Pasir sarana pendidikan yang tersedia yaitu 1 unit SD dan 1 unit SMP sedangkan untuk tingkat SMA masyarakat setempat harus melanjutkan ke Kelurahan Tanah Grogot bahkan adapula masyarakat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA dengan alasan tidak memiliki biaya transportasi dan penginapan untuk di Kelurahan Tanah Grogot. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.3 persebaran sarana pendidikan dimana titik persebarannya tidak merata dan berpusat atau berkumpul di Kelurahan Tanah Grogot.

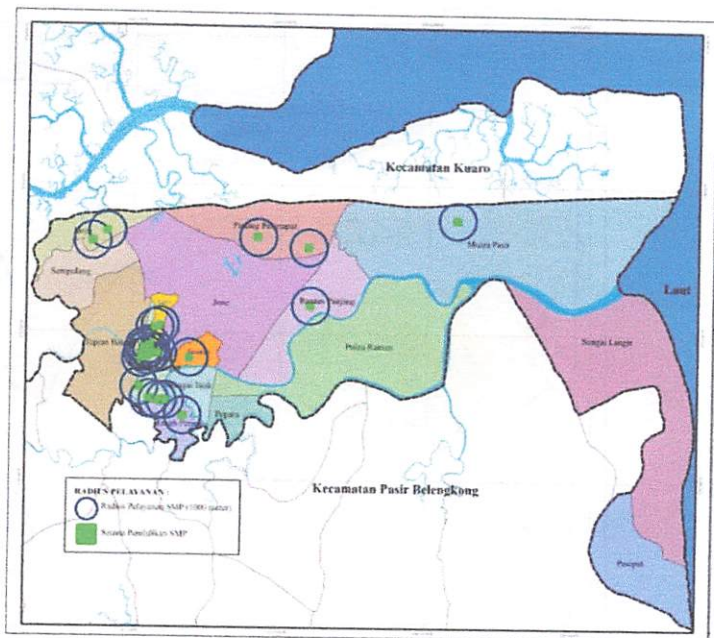
Ketersediaan sarana pendidikan belum menunjukkan persebaran yang sesuai dengan jumlah penduduk dan belum merata antar desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot. Masih banyak desa-desa yang belum memiliki SLTP dan SLTA. Saat ini sarana pendidikan hanya terpusat di Kelurahan Tanah Grogot, sehingga siswa dari desa-desa sekitar yang masih masuk dalam Kecamatan Tanah Grogot, melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya harus menuju ke pusat Kecamatan Tanah Grogot. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sarana pendidikan yang jenjangnya lebih tinggi selain TK dan SD.



Gambar 5.5 Radius Pelayanan Sarana Pendidikan (SD)

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Dari Gambar 5.5 menjelaskan bahwa persebaran sarana pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar) di Kecamatan Tanah Grogot tidak merata. Sarana pendidikan lebih banyak tersebar di bagian barat Kecamatan Tanah Grogot, terutama di Kelurahan Tanah Grogot yang masyarakatnya telah terlayani secara penuh oleh sarana pendidikan SD. Sedangkan untuk desa lain mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan akibat kurangnya jumlah sarana dan jauhnya jarak yang harus ditempuh.

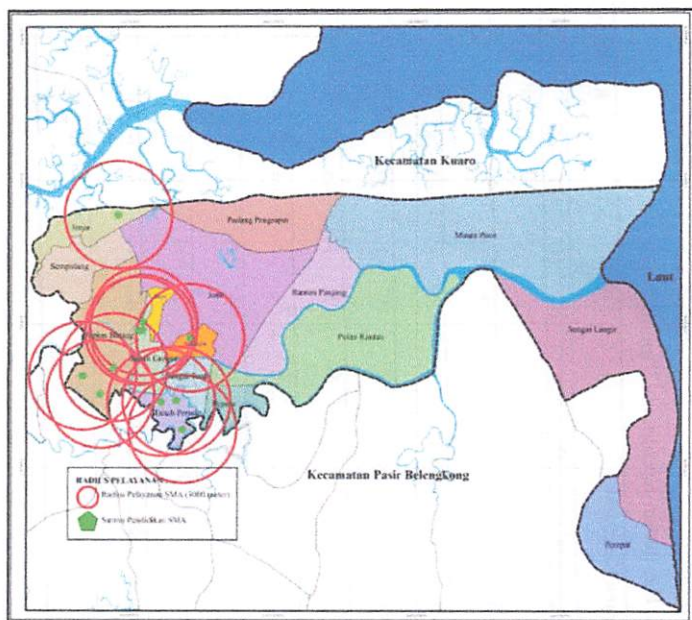


Gambar 5.6 Radius Pelayanan Sarana Pendidikan (SMP)

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Dari Gambar 5.6 menjelaskan tentang persebaran sarana pendidikan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kecamatan Tanah Grogot dimana dapat diketahui persebarannya tidak merata dan masyarakat banyak yang tidak terlayani oleh sarana ini, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari SD, hanya sebagian kecil saja yang harus keluar dari desa ke desa-desa yang memiliki sarana SMP, terutama ke Kelurahan Tanah Grogot yang memiliki sarana yang sangat banyak di Kecamatan Tanah Grogot.

Hal tersebut menyebabkan penambahan penduduk di Kelurahan Tanah Grogot akibat adanya factor penarik yaitu sarana pendidikan. Namun untuk Desa langir dan Desa Perepat lebih memilih desa yang berada lebih dekat dari desa mereka yaitu desa yang berada di Kecamatan Belengkong.



Gambar 5.7 Radius Pelayanan Sarana Pendidikan (SMA)

Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2015

Dari Gambar 5.7 menjelaskan tentang persebaran sarana pendidikan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kecamatan Tanah Grogot dimana dapat diketahui persebarannya tidak merata. Selain itu masyarakat yang terlayani hanya yang berada di desa yang memiliki sarana SMA yaitu Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tanah Periuk, Desa Tepian batang, Desa Janju. Hal ini menunjukkan daerah yang berada di pusat kota dan sekitarnya sangat didukung oleh sarana pendidikan sehingga mutu masyarakatnya lebih maju dibandingkan masyarakat yang berada di desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan.

Tabel 5.5. Indeks Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Kelurahan /Desa	Σ Penduduk (Jiwa)	Σ Sarana Kesehatan (Unit)				Rasio Sarana Kesehatan				Indeks				Klasifikasi			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Kelurahan Tanah Grogot	39.551	1	0	0	27	0,25	0,00	0,00	6,83	10	0	0	28	T	R	R	T
2	Desa Janju	2.613	0	1	0	2	0,00	3,83	0,00	7,65	0	18	0	31	R	S	R	T
3	Desa Sempulang	1.965	0	1	1	3	0,00	5,09	5,09	15,27	0	24	63	62	R	S	S	S
4	Desa Tepian Batang	4.968	0	1	1	4	0,00	2,01	2,01	8,05	0	10	25	33	R	T	T	T
5	Desa Tanah Periuk	3.638	0	1	1	4	0,00	2,75	2,75	11,00	0	13	34	45	R	T	T	S
6	Desa Peparu	631	0	1	0	1	0,00	15,85	0,00	15,85	0	76	0	64	R	R	R	S
7	Desa Sungai Tuak	1.663	0	1	1	2	0,00	6,01	6,01	12,03	0	29	75	49	R	R	R	S
8	Desa Rantau Panjang	1.240	0	1	1	2	0,00	8,06	8,06	16,13	0	39	100	65	R	R	R	S
9	Desa Jone	5.078	0	1	0	5	0,00	1,97	0,00	9,85	0	9	0	40	R	R	R	T
10	Desa Padang Pengrapat	4.126	1	0	0	3	2,42	0,00	0,00	7,27	100	0	0	30	R	R	R	T

No	Nama Kelurahan /Desa	Σ Penduduk (Jiwa)	Σ Sarana Kesehatan (Unit)				Rasio Sarana Kesehatan				Indeks				Klasifikasi			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
11	Desa Muara Pasir	3.816	0	1	0	3	0,00	2,62	0,00	7,86	0	13	0	32	R	R	R	T
12	Desa Perepat	479	0	1	0	1	0,00	20,88	0,00	20,88	0	100	0	85	R	R	R	R
13	Desa Pulau Rantau	837	0	1	0	1	0,00	11,95	0,00	11,95	0	57	0	49	R	R	R	S
14	Desa Sungai Langir	406	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	24,63	0	0	0	100	R	R	R	R
15	Desa Tapis	2.789	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R	R	R	R
16	Desa Senaken	7.523	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	R	R	R	R

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Keterangan :

A= Puskesmas, B= Pusban, C= Polindes, D= Posyandu

T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah

Di bidang kesehatan, problema isolasi akibat lemahnya infrastruktur juga telah melemahkan akses masyarakat. Masyarakat hanya mampu mengakses pelayanan yang sangat mendasar. Apabila masyarakat membutuhkan pelayanan lebih, maka mereka harus ke kecamatan yang memiliki puskesmas (rawat inap) atau rumah sakit di Kelurahan Tanah Grogot dengan jarak tempuh yang jauh dan tingkat kesulitan yang tinggi.

Masyarakat akan mencari sarana pelayanan terdekat dari lingkungannya. Keberadaan sarana yang mengumpul pada pusat kota saja yaitu Kelurahan Tanah Grogot memberi peluang bagi lahan berubah fungsi konsumtif ke fungsi produktif. Sebaran sarana yang belum merata mengindikasikan bahwa tidak optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Tanah Grogot.

Setiap desa di Kecamatan Tanah Grogot memiliki sarana pelayanan kesehatan. Namun secara pelayanan dirasa masih kurang optimal bagi desa-desa yang relatif jauh dari pusat kota sehingga jika suatu saat membutuhkan penanganan darurat maka desa-desa tersebut kesulitan untuk mendapatkan penanganan secara cepat. Kondisi tersebut dirasakan oleh masyarakat Desa Muara Pasir, Desa Sungai Langir dan Desa Perepat.

Dari tabel 5.4 dapat terlihat bahwa hampir pelayanan setiap sarana kesehatan rendah, hal ini diakibatkan kurangnya sarana yang memadai untuk melayani masyarakat tiap desa. Untuk wilayah yang masih bisa dilayani secara optimal hanya dirasakan oleh Desa Tepian Batang, Kelurahan Tanah Grogot dan Desa Tanah Periuk. Hal ini memperlihatkan lagi bahwa sarana hanya terpusat di pusat kecamatan dan sekitarnya dan menjadi salah satu faktor ketimpangan pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot.



Posyandu Desa Muara Pasir

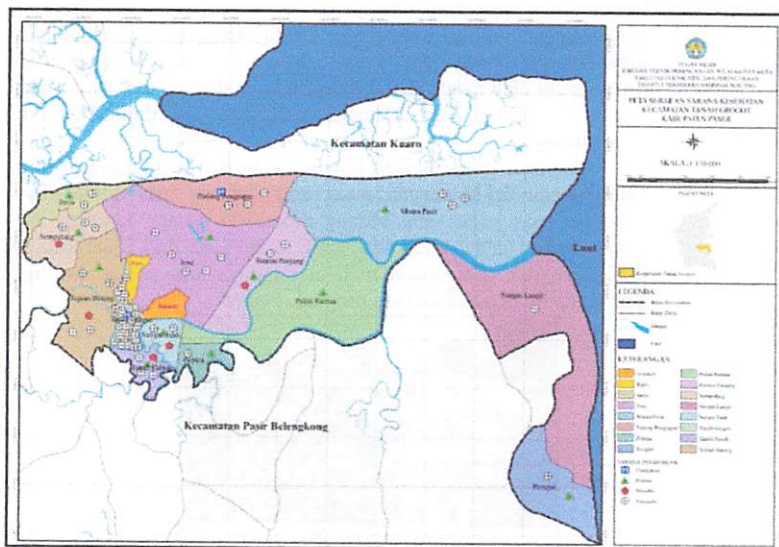
Pusban Desa Perepat

Pusban Desa Perepat

Gambar 5.8 Kondisi Sarana Kesehatan Kecamatan Tanah Grogot

Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Ketersediaan prasarana yang paling penting dalam melihat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah meliputi : jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih. Jaringan jalan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan suatu wilayah, karena jaringan jalan merupakan urat nadi yang menentukan arah perkembangan. Dengan adanya jaringan jalan, maka pergerakan penduduk dan pergerakan barang yang dihasilkan akan dapat terlayani dan terdistribusi secara merata.



Gambar 5.9 Persebaran Sarana Kesehatan di Kecamatan Tanah Grogot

Sumber : Hasil Olah Data Tahun 2015



Kondisi jalan buruk
Rantau Panjang)

Kondisi jalan baik
(Kelurahan Tanah Grogot)

Kondisi jalan buruk(Desa
(Desa Pepera)

Gambar 5.10 Perbandingan Kondisi Jalan di Kecamatan Tanah Grogot

Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Jika dilihat dari gambar diatas, kondisi jalan yang ada di Kecamatan Tanah Grogot cenderung baik jika berada di kawasan pusat

kota, berbeda dengan daerah yang relatif jauh dari pusat kota. Selain memiliki jaringan jalan yang terbatas, di Kecamatan Tanah Grogot juga memiliki kondisi jalan yang sangat buruk. Kondisi jalan seperti ini terdapat di Desa Rantau Panjang, Desa Muara Pasir, Desa Pepara, Desa Perepat dan Desa Sungai Langir.

Wilayah yang memiliki sifat kekotaan biasanya semakin banyak jaringan jalan dengan kondisi jalan yang baik serta terkonsentrasinya kegiatan perdagangan dan jasa. Desa yang berada dekat pusat pemerintahan yaitu Kelurahan Tanah Grogot relatif lebih maju dibandingkan dengan desa diluar kawasan pusat kota. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan jalan dan kondisi jalan yang ada. Kondisi ini timbul karena tingginya tingkat aksesibilitas serta lokasi yang strategis.

Selama ini perbaikan kondisi jalan hanya dilakukan pada desa yang berada dekat dengan pusat kota, hal ini bisa dilihat dari ada beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki secara bertahap. Namun pembangunan jalan untuk desa yang relatif jauh dari pusat kota hanya dilakukan oleh masyarakat melalui swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah pusat melalui program PNPM.



Gambar 5.11 Tahapan Perbaikan Ruas Jalan

Sumber : Dokumentasi Tahun 2015

Jadi wilayah yang dekat dengan pusat kota memiliki tingkat perhatian lebih dibanding dengan wilayah yang jauh dari pusat kota sehingga kondisi jalan yang berada di wilayah sekitar pusat kota minimal kategori perkerasan aspal sedangkan wilayah yang jauh dari pusat kota memiliki kondisi jalan yang buruk dan jarang diperhatikan oleh pemerintah dan juga hanya dilakukan perbaikan jalan melalui swadaya masyarakat dan bantuan dari pemerintah pusat melalui program PNPM.

Jaringan listrik salah satu kebutuhan utama pada saat ini karena keberadaannya sangat dibutuhkan baik sebagai sarana penerangan dan sumber energi untuk menunjang kegiatan ekonomi maupun sebagai sarana untuk meningkatkan pengembangan wilayah.

Menurut Pak Agung masyarakat Desa Sempulang "Pelayanan listrik di Desa Sempulang tidak ada masalah karena sudah terlayani semuanya."

Menurut Pak Latif masyarakat Desa Muara Pasir "Pelayanan listrik di Desa Muara Pasir ini baru masuk tahun 2015 dan itupun belum terlayani seluruhnya, dan untuk yang belum dapat aliran listrik, mereka menggunakan genset."



Pengelolaan air bersih di Kecamatan Tanah Grogot dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kandilo dengan jumlah unit pelayanan air bersih yang dikelola sebanyak 8 unit. Namun masih banyak desa yang belum terlayani baik pasokan listrik maupun air bersih, sehingga masyarakat masih menggunakan genset sebagai penerangan dan menggunakan air sungai maupun air hujan sebagai air bersih di desa mereka.

Menurut Pak Latif Masyarakat Desa Muara Pasir "Di desa Muara Pasir sendiri untuk pelayanan air bersih belum ada sama sekali, jadi untuk air bersih masyarakat disini mengkonsumsi air hujan. Kalau untuk air sungai sekarang sudah mulai keruh sehingga tidak dapat digunakan untuk air minum."

Masyarakat yang tinggal di dekat pusat pemerintahan sudah merasakan pelayanan listrik dan air bersih selama bertahun-tahun, berbeda yang dirasakan oleh masyarakat di desa-desa terpencil yang sejak dulu hidup tanpa aliran listrik dan air bersih. Masyarakat yang menggunakan genset hanya masyarakat yang mampu membeli, sedangkan masyarakat yang lainnya menumpang listrik dari tetangga yang memiliki genset. Untuk air bersih yang dulu mereka gunakan adalah air sungai, tapi sekarang air sungai sudah mulai keruh dan tidak dapat digunakan untuk air minum. Masyarakat menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan teori, ketersediaan infrastruktur yang lebih dan lengkap menjadi daya tarik penduduk untuk tinggal di suatu wilayah. Pengelompokan pembangunan sarana dan prasarana mengakibatkan pengelompokan aktivitas penduduk. Pada akhirnya terkonsentrasinya infrastruktur ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan antar wilayah, sehingga keberadaan infrastruktur mempengaruhi ketimpangan di Kecamatan Tanah Grogot.

Menurut Pak Udin Desa Muara Pasir "Masyarakat dari Desa Muara Pasir pernah mengajukan permohonan pembangunan di desanya, namun selalu direspon lambat bahkan seringkali tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, malah daerah-daerah terdekat saja yang selalu mendapat respon."



Jadi, perkembangan pembangunan sarana dan prasarana yang terjadi di desa-desa yang relatif dekat dengan pusat kota mempertajam adanya ketimpangan pembangunan dengan desa-desa yang relatif jauh dari pusat kota. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi pemerataan pembangunan suatu wilayah terutama bagi desa-desa yang jauh dari pusat kota. Sehingga menjadikan alasan bagi masyarakat yang kurang merasakan pembangunan di Kecamatan Tanah Grogot untuk berpisah dari kecamatan induk.

5.1.5. Perekonomian

Fasilitas perekonomian terdiri dari sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi aktifitas perekonomian wilayah. Sarana perekonomian yang tersedia di Kecamatan Tanah Grogot terdiri dari pasar umum, pasar desa dan pertokoan. Pasar merupakan kawasan ekonomi yang sangat penting keberadaannya untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pada tabel 5.6 indeks sarana perdagangan dapat dibaca bahwa keseluruhan sarana perdagangan ini berada di pusat kota yaitu Kelurahan Tanah Grogot, hal ini menunjukkan ketimpangan pergerakan ekonomi di Kecamatan Tanah Grogot. Perputaran uang terjadi hanya di pusat kecamatan, dari desa yang lain melakukan transaksi jual beli hanya di pusat kecamatan, pasar yang ada di desa pun hanya pasar yang aktif 1 kali dalam seminggu.

Tabel 5.6. Indeks Sarana Perdagangan Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Kelurahan/Desa	Σ Penduduk	Pertokoan		Rasio		Indeks		Klasifikasi	
			Pasar	Minimarket	Pasar	Minimarket	Pasar	Minimarket	Pasar	Minimarket
1	Kelurahan Tanah Grogot	39.551	2	12	19.776	3.296	100	44	T	S
2	Desa Janju	2.613	1	0	2.613	0	13	0	R	R
3	Desa Sempulung	1.965	1	0	1.965	0	10	0	R	R
4	Desa Tepian Batang	4.968	1	1	4.968	4.968	25	66	R	S
5	Desa Tanah Periuk	3.638	0	0	0	0	0	0	R	R
6	Desa Pepara	631	1	0	631	0	3	0	R	R
7	Desa Sungai Tuak	1.663	0	0	0	0	0	0	R	R
8	Desa Rantau Panjang	1.240	0	0	0	0	0	0	R	R
9	Desa Jone	5.078	1	0	5.078	0	26	0	R	R
10	Desa Padang Pengrapat	4.126	1	0	4.126	0	21	0	R	R
11	Desa Muara Pasir	3.816	1	0	3.816	0	19	0	R	R
12	Desa Perepat	479	0	0	0	0	0	0	R	R
13	Desa Pulau Rantau	837	0	0	0	0	0	0	R	R
14	Desa Sungai Langir	406	0	0	0	0	0	0	R	R
15	Desa Tapis	2.789	1	1	2.789	2.789	14	37	R	S
16	Desa Senaken	7.523	1	1	7.523	7.523	38	100	S	T

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2015

5.2. Analisa Aspirasi Masyarakat

Studi yang dilakukan oleh peneliti ini mencakup 1 kelurahan dan 15 Desa yang berada di kecamatan Tanah Grogot. Hasil studi tersebut berhasil memetakan aspirasi dan harapan masyarakat yang menghendaki pemekaran Kecamatan Tanah Grogot agar dapat mewujudkan kemandirian di berbagai bidang, meningkatkan pelayanan dan proses pembangunan serta perekonomian masyarakat, memperoleh keadilan sosial, serta meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

Analisa yang dibahas oleh peneliti yaitu menganalisa keinginan masyarakat akan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dan design pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Dalam mengidentifikasi keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dilakukan melalui wawancara langsung kepada masyarakat. Hasil dari wawancara mengenai keinginan masyarakat terhadap pemekaran adalah setuju atau tidaknya masyarakat terhadap issue pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

5.2.1. Keinginan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

Analisa keinginan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dihitung dari jumlah atau persentase masyarakat Kecamatan Tanah Grogot yang menyetujui wilayahnya untuk dimekarkan. Aspirasi dijangkau dengan wawancara langsung kepada masyarakat asli Kecamatan Tanah Grogot di tiap-tiap desa. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat dirumuskan dengan tabel 5.4 jejak pendapat pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 5.7. Faktor Pendorong Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Responden	Pendapat Pemekaran	Faktor Pendorong					
				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rentang Kendali	Sarana - Prasarana	Jangkauan pelayanan	Ketimpangan Pembangunan ekonomi
1	Desa Janju	Hendra	Setuju		x	x			
2	Desa Janju	Saharudin	Setuju		x	x			
3	Desa Janju	Mursaha	Setuju	x		x		x	
4	Desa Janju	Romi	Tidak Setuju						
5	Desa Janju	Indri	Setuju	x		x			
6	Desa Sempulang	Sukayat	Setuju			x			x
7	Desa Sempulang	Supryanto	Setuju			x			x
8	Desa Sempulang	Handoko	Setuju	x				x	x
9	Desa Sempulang	Rahmattullah	Setuju			x		x	
10	Desa Sempulang	Damis	Ragu-Ragu		x				
11	Desa Tepian Batang	Syahniki	Tidak Setuju						x
12	Desa Tepian Batang	Saprullah	Setuju					x	
13	Desa Tepian Batang	Ilyas	Setuju	x	x			x	
14	Desa Tepian Batang	Rahma	Setuju	x		x			x
15	Desa Tepian Batang	Nurul Inayah	Setuju	x					
16	Kel. Tanah Grogot	Arief Budiman	Setuju			x	x	x	x
17	Kel. Tanah Grogot	Hasan	Tidak Setuju						x
18	Kel. Tanah Grogot	Dzakirul	Setuju					x	
19	Kel. Tanah Grogot	Rindayani	Setuju			x		x	
20	Kel. Tanah Grogot	Santoso	Ragu-Ragu	x					
21	Desa Tanah Periuk	Sumargono	Setuju			x	x		
22	Desa Tanah Periuk	Muhakkim	Setuju			x		x	

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Responden	Pendapat Pemekaran	Faktor Pendorong					
				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rentang Kendali	Sarana - Prasarana	Jangkauan pelayanan	Ketimpangan Pembangunan ekonomi
23	Desa Tanah Periuk	Siti Aisyah	Setuju		x	x			
24	Desa Tanah Periuk	Bakri	Tidak Setuju						
25	Desa Tanah Periuk	Sajaruddin	Setuju						
26	Desa Pepara	Jusman	Setuju	x				x	
27	Desa Pepara	Sanuddin	Setuju						
28	Desa Pepara	Pitde	Ragu-Ragu		x			x	
29	Desa Pepara	Sanuri	Setuju	x				x	
30	Desa Pepara	Rahman	Setuju		x			x	
31	Desa Sungai Tuak	Ahmad	Setuju			x			x
32	Desa Sungai Tuak	Pide	Setuju					x	
33	Desa Sungai Tuak	Syahdan	Setuju	x	x	x			x
34	Desa Sungai Tuak	Ahsan	Ragu-Ragu	x					
35	Desa Sungai Tuak	Ketemin	Setuju	x		x	x		
36	Desa Rantau Panjang	Sarifudin	Setuju	x	x	x	x	x	
37	Desa Rantau Panjang	Amir	Setuju		x				
38	Desa Rantau Panjang	Dimas	Setuju					x	
39	Desa Rantau Panjang	Juriah	Setuju	x					
40	Desa Rantau Panjang	Mujadi	Setuju					x	x
41	Desa Jone	Lamaluddin	Setuju			x	x		

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Responden	Pendapat Pemekaran	Faktor Pendorong					
				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rentang Kendali	Sarana - Prasarana	Jangkauan pelayanan	Ketimpangan Pembangunan ekonomi
42	Desa Jone	Akbar	Setuju				x		
43	Desa Jone	Rudi	Setuju	x		x			x
44	Desa Jone	Sukardi	Setuju			x			
45	Desa Jone	M. Ismail	Setuju		x			x	
46	Desa Padang Pengrapat	Asmawati	Setuju						
47	Desa Padang Pengrapat	Natakusuma	Tidak Setuju	x			x		
48	Desa Padang Pengrapat	Heriansyah	Setuju				x	x	
49	Desa Padang Pengrapat	Sahrul	Setuju		x			x	
50	Desa Padang Pengrapat	Basrun	Setuju		x				
51	Desa Muara Pasir	H. Kambu	Setuju			x		x	
52	Desa Muara Pasir	Latif	Setuju					x	
53	Desa Muara Pasir	Andi Rosmani	Setuju					x	
54	Desa Muara Pasir	Asriah	Ragu-Ragu			x			
55	Desa Muara Pasir	Udin	Setuju	x	x				
56	Desa Perepat	Darwan	Setuju			x			x
57	Desa Perepat	Saripudin	Setuju					x	
58	Desa Perepat	Sunapiyo	Setuju		x			x	
59	Desa Perepat	Murjani	Setuju		x	x			
60	Desa Perepat	Noor Amin	Setuju					x	

No	Nama Desa/ Kelurahan	Nama Responden	Pendapat Pemekaran	Faktor Pendorong					
				Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Rentang Kendali	Sarana - Prasarana	Jangkauan pelayanan	Ketimpangan Pembangunan ekonomi
61	Desa Pulau Rantau	Dahlan	Setuju	x				x	
62	Desa Pulau Rantau	Kasim	Setuju					x	
63	Desa Pulau Rantau	Awalludin	Setuju				x	x	x
64	Desa Pulau Rantau	Ashad	Setuju		x	x			
65	Desa Pulau Rantau	Synawan	Setuju				x		
66	Desa Sungai Langir	H. Kasran	Setuju					x	
67	Desa Sungai Langir	Sahrani	Setuju	x					
68	Desa Sungai Langir	Fahruaji	Setuju		x				
69	Desa Sungai Langir	Sihabudin	Setuju			x			
70	Desa Sungai Langir	H. Mursid	Setuju					x	
71	Desa Tapis	Rudi	Setuju					x	
72	Desa Tapis	Abdul Rauf	Ragu-Ragu			x		x	
73	Desa Tapis	Rina	Tidak Setuju						
74	Desa Tapis	Harmoko	Setuju					x	
75	Desa Tapis	Fazlena	Setuju		x				x
76	Desa Senaken	Amsah	Setuju				x	x	x
77	Desa Senaken	Achmad Ansyari	Setuju			x		x	x
78	Desa Senaken	Eka Sri Rahavu	Setuju					x	x
79	Desa Senaken	Aida	Tidak Setuju			x			x
80	Desa Senaken	Hardianto	Setuju	x		x			
Jumlah				20	19	31	11	37	18

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat terkait dasar dari keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran Kecamatan tanah Grogot yaitu adanya faktor pelayanan terhadap masyarakat yang kurang maksimal serta tidak merata. Jangkauan pelayanan menjadi alasan masyarakat menginginkan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot meskipun ada pula faktor-faktor lain yang menjadi alasan masyarakat menginginkan pemekaran. Berdasarkan hasil survey lapangan yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yaitu infrastruktur jalan yang sangat buruk di beberapa desa di Kecamatan Tanah Grogot seperti Desa Muara Pasir, Desa Sungai Langir, Desa Pepara, Desa Perepat dan Desa Pulau Rantau.

Selain faktor pendorong atau dasar adanya keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran diatas, selanjutnya masyarakat sebagai obyek yang merasakan pembangunan di desa mereka masing-masing menentukan keinginan masyarakat setempat mendukung adanya pemekaran. Hasil wawancara masyarakat terkait kesediaan masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap pemekaran disajikan pada tabel 5.8 keinginan masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

Tabel 5.8. Keinginan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Pemekaran Kecamatan		
		Setuju	Tidak Setuju	Ragu-Ragu
1	Kelurahan Tanah Grogot	3	1	1
2	Desa Janju	4	1	0
3	Desa Sempulang	4	0	1
4	Desa Tepian Batang	4	1	0
5	Desa Tanah Periuk	4	1	0
6	Desa Pepara	4	0	1
7	Desa Sungai Tuak	4	0	1
8	Desa Rantau Panjang	5	0	0
9	Desa Jone	5	0	0
10	Desa Padang Pengrapat	5	0	0
11	Desa Muara Pasir	4	0	1
12	Desa Perepat	5	0	0
13	Desa Pulau Rantau	5	0	0
14	Desa Sungai Langir	5	0	0
15	Desa Tapis	3	1	1
16	Desa Senaken	4	1	0
Jumlah		68	6	6

Sumber : Hasil Wawancara



Diagram 5.1. Pendapat Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

Dari tabel 5.8 keinginan masyarakat terhadap pemekaran diatas dapat dilihat bahwa 68 responden atau 85 persen responden menginginkan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat banyak menginginkan pemekaran dengan alasan jangkauan pelayanan yang sangat rendah atau dapat dikatakan banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau pelayanan sarana publik di Kecamatan Tanah Grogot sebesar 37 suara. Alasan utama masyarakat tersebut menjadi kuat dengan analisa sarana prasarana pada sub bab 5.1.4 yang menyatakan sarana yang ada hanya menjangkau wilayah pusat kecamatan dan sekitarnya yang berada pada bagian timur Kecamatan Tanah Grogot. Masyarakat banyak menginginkan pemerataan pembangunan disetiap daerah, seperti yang di katakan oleh Kaur Pembangunan di Desa Muara Pasir

Memurut Pak Udin Desa Muara Pasir "Kalau masyarakat Muara Pasir setuju saja dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot yang penting akses jalan menuju pusat kecamatan lebih dekat dan nyaman. Pembangunan jalan di Desa Muara Pasir belum terlaksana. Selama ini masyarakat desa bergotong royong untuk memperbaiki jalan tersebut. Pelayanan listrik pun baru masuk desa tahun 2015 dan itupun belum semuanya terlayani."

Jadi berdasarkan hasil analisa terhadap aspirasi masyarakat terkait keinginan terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tanah Grogot menginginkan dan mendukung adanya pemekaran kecamatan karena beberapa faktor antara lain, jangkauan pelayanan yang tidak efektif dan efisien disebabkan kondisi jalan yang buruk, ketimpangan pembangunan di tiap

desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot. Desa yang berada di sekitar pusat kota cenderung lebih maju dibanding dengan desa-desa yang relatif jauh dari pusat kota.

5.2.2. Design pemekaran kecamatan Tanah Grogot

Setelah mengetahui pendapat masyarakat terhadap keinginan mereka mengenai pemekaran Kecamatan Tanah Grogot, tahap selanjutnya menentukan desa-desa yang ingin tetap berada di kecamatan induk dan desa-desa yang ingin bergabung membentuk kecamatan baru. Cara yang digunakan untuk menghasilkan design pemekaran tersebut yaitu dengan menggunakan alat bantu program SPSS untuk menghitung distribusi frekuensi. Dengan menggunakan alat bantu tersebut dapat membantu untuk mengetahui tingkat akurasi dari penentuan pemilihan kecamatan tersebut. Berikut ini merupakan tabel pemilihan kecamatan menurut masyarakat.

Tabel 5.9. Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Responden	Pendapat	
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan
1	Kelurahan Tanah Grogot	Arief Budiman	Setuju	Kecamatan Induk
2	Kelurahan Tanah Grogot	Hasan	Tidak Setuju	Kecamatan Induk
3	Kelurahan Tanah Grogot	Dzakirul	Setuju	Kecamatan Induk
4	Kelurahan Tanah Grogot	Rindayani	Setuju	Kecamatan Induk
5	Kelurahan Tanah Grogot	Santoso	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
6	Desa Janju	Hendra	Setuju	Kecamatan Induk
7	Desa Janju	Saharudin	Setuju	Kecamatan Induk
8	Desa Janju	Mursaha	Setuju	Kecamatan Induk
9	Desa Janju	Romi	Tidak Setuju	Kecamatan Induk
10	Desa Janju	Indri	Setuju	Kecamatan Induk
11	Desa Sempulang	Sukayat	Setuju	Kecamatan Induk
12	Desa Sempulang	Supryanto	Setuju	Kecamatan Induk
13	Desa Sempulang	Handoko	Setuju	Kecamatan Baru
14	Desa Sempulang	Rahmattullah	Setuju	Kecamatan Induk
15	Desa Sempulang	Dumis	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
16	Desa Tepian Batang	Syahmiki	Tidak Setuju	Kecamatan Induk
17	Desa Tepian Batang	Sapullah	Setuju	Kecamatan Induk
18	Desa Tepian Batang	Ilvas	Setuju	Kecamatan Baru
19	Desa Tepian Batang	Rahma	Setuju	Kecamatan Induk
20	Desa Tepian Batang	Nurul Inayah	Setuju	Kecamatan Induk
21	Desa Tanah Periuk	Sumargono	Setuju	Kecamatan Baru
22	Desa Tanah Periuk	Muhakkim	Setuju	Kecamatan Baru
23	Desa Tanah Periuk	Siti Aisyah	Setuju	Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Responden	Pendapat	
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan
24	Desa Tanah Periuk	Bakri	Tidak Setuju	Kecamatan Induk
25	Desa Tanah Periuk	Sajaruiddin	Setuju	Kecamatan Induk
26	Desa Pepara	Jusman	Setuju	Kecamatan Baru
27	Desa Pepara	Sanuddin	Setuju	Kecamatan Induk
28	Desa Pepara	Pitde	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
29	Desa Pepara	Sanuri	Setuju	Kecamatan Induk
30	Desa Pepara	Rahman	Setuju	Kecamatan Induk
31	Desu Sungai Tuak	Ahmad	Setuju	Kecamatan Induk
32	Desa Sungai Tuak	Pide	Setuju	Kecamatan Induk
33	Desa Sungai Tuak	Syahdan	Setuju	Kecamatan Baru
34	Desa Sungai Tuak	Ahsan	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
35	Desa Sungai Tuak	Ketemin	Setuju	Kecamatan Induk
36	Desa Rantau Panjang	Sarifudin	Setuju	Kecamatan Baru
37	Desa Rantau Panjang	Amir	Setuju	Kecamatan Baru
38	Desa Rantau Panjang	Dimas	Setuju	Kecamatan Induk
39	Desa Rantau Panjang	Juriah	Setuju	Kecamatan Baru
40	Desa Rantau Panjang	Mujadi	Setuju	Kecamatan Baru
41	Desa Jone	Lamaluddin	Setuju	Kecamatan Baru
42	Desa Jone	Akbar	Setuju	Kecamatan Induk
43	Desa Jone	Rudi	Setuju	Kecamatan Induk
44	Desa Jone	Sukardi	Setuju	Kecamatan Baru
45	Desa Jone	M. Ismail	Setuju	Kecamatan Baru
46	Desa Padang Pengrapat	Asmawati	Setuju	Kecamatan Baru
47	Desa Padang Pengrapat	Natakusuma	Setuju	Kecamatan Baru
48	Desa Padang Pengrapat	Heriansyah	Setuju	Kecamatan Baru

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Responden	Pendapat	
			Pemekaran	Pemilihan Kecamatan
49	Desa Padang Pengrapat	Sahrul	Setuju	Kecamatan Baru
50	Desa Padang Pengrapat	Basrun	Setuju	Kecamatan Baru
51	Desa Muara Pasir	H. Kambu	Setuju	Kecamatan Baru
52	Desa Muara Pusir	Latif	Setuju	Kecamatan Baru
53	Desa Muara Pasir	Andi Rosnani	Setuju	Kecamatan Baru
54	Desa Muara Pasir	Asriah	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
55	Desa Muara Pasir	Udin	Setuju	Kecamatan Baru
56	Desa Perepat	Darwan	Setuju	Kecamatan Baru
57	Desa Perepat	Saripudin	Setuju	Kecamatan Baru
58	Desa Perepat	Sunapiyo	Setuju	Kecamatan Baru
59	Desa Perepat	Murjani	Setuju	Kecamatan Baru
60	Desa Perepat	Noor Amin	Setuju	Kecamatan Baru
61	Desa Pulau Rantau	Dahlan	Setuju	Kecamatan Baru
62	Desa Pulau Rantau	Kasim	Setuju	Kecamatan Baru
63	Desa Pulau Rantau	Awalludin	Setuju	Kecamatan Baru
64	Desa Pulau Rantau	Ashad	Setuju	Kecamatan Baru
65	Desa Pulau Rantau	Synawan	Setuju	Kecamatan Induk
66	Desa Sungai Langir	H. Kasran	Setuju	Kecamatan Baru
67	Desa Sungai Langir	Sahrani	Setuju	Kecamatan Baru
68	Desa Sungai Langir	Fahruali	Setuju	Kecamatan Baru
69	Desa Sungai Langir	Sihabudin	Setuju	Kecamatan Baru
70	Desa Sungai Langir	H. Mursid	Setuju	Kecamatan Baru
71	Desa Tapis	Rudi	Setuju	Kecamatan Baru
72	Desa Tapis	Abdul Rauf	Ragu-Ragu	Kecamatan Induk
73	Desa Tupis	Rina	Tidak Setuju	Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Nama Responden	Pendapat	
			Pemekaran	Pemillhan Kecamatan
74	Desa Tapis	Harmoko	Setuju	Kecamatan Baru
75	Desa Tapis	Fazlena	Setuju	Kecamatan Induk
76	Desa Senaken	Amsah	Setuju	Kecamatan Baru
77	Desa Senaken	Achmad Ansyari	Setuju	Kecamatan Induk
78	Desa Senaken	Eka Sri Rahayu	Setuju	Kecamatan Baru
79	Desa Senaken	Aida	Tidak Setuju	Kecamatan Induk
80	Desa Senaken	Hardianto	Setuju	Kecamatan Baru

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

Tabel 5.10. Pemilihan Kecamatan Menurut Masyarakat

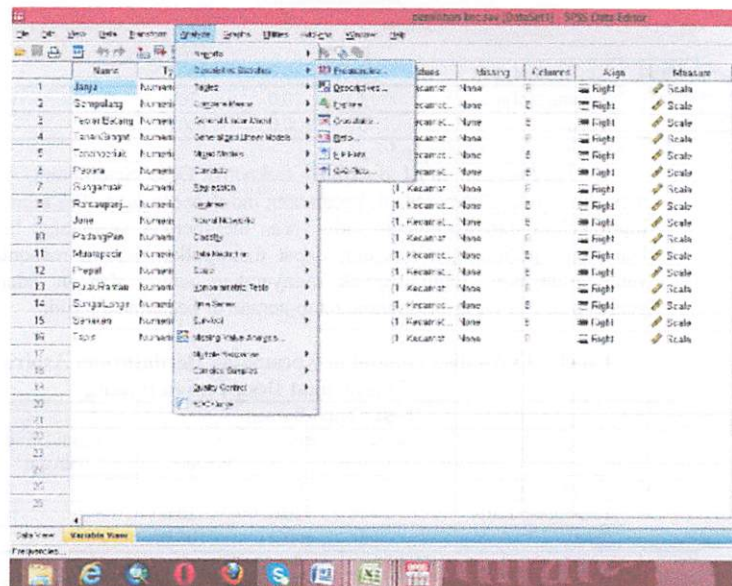
No	Nama Desa/Kelurahan	Pemilihan Kecamatan	
		Kecamatan Induk	Calon Kecamatan Baru
1	Kelurahan Tanah Grogot	5	0
2	Desa Janju	5	0
3	Desa Sempulang	4	1
4	Desa Tepian Batang	4	1
5	Desa Tanah Periuk	3	2
6	Desa Pepara	4	1
7	Desa Sungai Tuak	4	1
8	Desa Rantau Panjang	1	4
9	Desa Jone	2	3
10	Desa Padang Pengrapat	0	5
11	Desa Muara Pasir	1	4
12	Desa Perepat	0	5
13	Desa Pulau Rantau	1	4
14	Desa Sungai Langir	0	5
15	Desa Tapis	3	2
16	Desa Senaken	2	3

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2015

Berdasarkan tabel 5.10 pemilihan kecamatan menurut masyarakat, ada beberapa desa yang memilih tetap di kecamatan induk yaitu Kelurahan Tanah Grogot, Desa Janju, Desa Sempulang, Desa Tepian Batang, Desa Tanah Periuk, Desa Pepara, Desa Sungai Tuak dan Desa Tapis. Desa-desa tersebut memilih tetap di kecamatan induk karena selama ini desa-desa tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menjangkau pelayanan publik disebabkan lokasi desa berada dipusat kecamatan. Sedangkan untuk desa yang memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan ingin membentuk kecamatan baru dengan harapan desa mereka bisa lebih maju dan mandiri daripada saat ini.

Dari hasil tabel pemilihan kecamatan diatas akan di olah menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui validitas dari keterangan yang disampaikan oleh masyarakat melalui hasil wawancara. Adapun proses perhitungan menggunakan distribusi frekuensi yaitu data dari hasil wawancara tersebut dimasukkan dalam aplikasi SPSS. Setelah data-data tersebut dimasukkan, selanjutnya pilih tools *Analyze* lalu

Descriptive Statistics, kemudian pilih *Frequencies*. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar proses perhitungan distribusi frekuensi. Selanjutnya distribusi frekuensi disajikan dengan tabel sesuai dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Tanah Grogot.



Gambar 5.12 Proses perhitungan distribusi frekuensi

Tabel 5.11. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Janju

		Desa Janju			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kecamatan Induk	5	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Janju, 100% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk. Artinya dari responden yang ditanyakan menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Janju tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.12. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sempulang

		Desa Sempulang			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	4	80.0	80.0	80.0
	KecamatanBaru	1	20.0	20.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Sempulang, 80% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 20% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Sempulang tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.13. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tepian Batang

		Desa Tepian Batang			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	4	80.0	80.0	80.0
	Kecamatan Baru	1	20.0	20.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Tepian Batang, 80% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 20% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Tepian Batang tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.14. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Kelurahan Tanah Grogot

		Kelurahan Tanah Grogot			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	5	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Kelurahan Tanah Grogot, 100% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk. Artinya dari responden yang ditanyakan, seluruhnya menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Kelurahan Tanah Grogot tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.15. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanah Periuk

		Desa Tanah periuk			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	3	60.0	60.0	60.0
	KecamatanBaru	2	40.0	40.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Tanah Periuk, 60% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 40% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Tanah Periuk tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.16. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Pepara

		Desa Pepara			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	4	80.0	80.0	80.0
	KecamatanBaru	1	20.0	20.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Pepara, 80% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 20% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Pepara tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.17. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Tuak

		Desa Sungai tuak			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	4	80.0	80.0	80.0
	KecamatanBaru	1	20.0	20.0	100.0
Total		5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Sungai Tuak, 80% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 20% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Sungai Tuak tetap berada di kecamatan induk.

Tabel 5.18. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Rantau Panjang

		Desa Rantau panjang			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	1	20.0	20.0	20.0
	KecamatanBaru	4	80.0	80.0	100.0
Total		5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Rantau Panjang, 20% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 80% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Rantau Panjang keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.19. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Jone

		Desa Jone			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	2	40.0	40.0	40.0
	KecamatanBaru	3	60.0	60.0	100.0
Total		5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Jone, 40% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 60% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Jone keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.20. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Padang Pengrapat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanBaru	5	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Padang Pengrapat, 100% memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru. Artinya dari responden yang ditanyakan, seluruhnya menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Padang Pengrapat memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.21. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Muara Pasir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	1	20.0	20.0	20.0
	KecamatanBaru	4	80.0	80.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Muara Pasir, 20% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 80% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Muara Pasir keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.22. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Perepat

Desa Perepat					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	KecamatanBaru	5	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Perepat, 100% memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru. Artinya dari responden yang ditanyakan, seluruhnya menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Perepat memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.23. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Pulau Rantau

Desa Pulau Rantau					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	KecamatanInduk	1	20.0	20.0	20.0
	KecamatanBaru	4	80.0	80.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Pulau Rantau, 20% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 80% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Pulau Rantau keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.24. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Langir

Desa Sungai Langir					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	KecamatanBaru	5	100.0	100.0	100.0

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Sungai Langir, 100% memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru. Artinya dari responden yang ditanyakan, seluruhnya menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Sungai Langir

memilih untuk keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.25. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Senaken

Desa Senaken					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	2	40.0	40.0	40.0
	KecamatanBaru	3	60.0	60.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Senaken, 40% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 60% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Senaken keluar dari kecamatan induk dan membentuk kecamatan baru.

Tabel 5.26. Analisa Pemilihan Kecamatan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat Desa Tapis

Desa Tapis					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KecamatanInduk	3	60.0	60.0	60.0
	KecamatanBaru	2	40.0	40.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Desa Tapis, 60% memilih untuk tetap berada di kecamatan induk sedangkan 40% memilih ingin keluar dari kecamatan induk atau membentuk kecamatan baru. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang ditanyakan lebih banyak menyatakan setuju dengan adanya pemekaran dan Desa Tapis tetap berada di kecamatan induk.

Dapat dilihat dari tabel diatas yaitu hasil rumusan wawancara dan hasil observasi dari seluruh desa di Kecamatan Tanah Grogot, serta dengan hasil perhitungan analisa distribusi frekuensi, peneliti menyusun desain penataan dan pemekaran untuk Kecamatan Tanah Grogot yaitu dibagi menjadi 2 wilayah: Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Tanah Grogot Baru. Nama desa untuk calon Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat pada tabel 5.23 design penataan dan pemekaran kecamatan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 huruf c yaitu jumlah penduduk untuk di wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku dan Irian Jaya minimal 5.000 jiwa, pasal 5 huruf c dengan luas wilayah minimal 12,5 Km² dan pada pasal 6 menyebutkan jumlah desa/kelurahan minimal 4 desa/kelurahan²⁵.

Tabel 5.27. Design Penataan dan Pemekaran Kecamatan

Kecamatan Tanah Grogot (sebelum pemekaran)	Kecamatan Tanah Grogot (Induk)	Kecamatan Tanah Grogot Baru (Calon Kecamatan Baru)
Kelurahan Tanah Grogot	Kelurahan Tanah Grogot	Desa Rantau Panjang
Desa Janju	Desa Janju	Desa Padang Pengrapat
Desa Sempulang	Desa Sempulang	Desa Jone
Desa Tepian Batang	Desa Tepian Batang	Desa Muara Pasir
Desa Tanah Periuk	Desa Tanah Periuk	Desa Senaken
Desa Pepara	Desa Pepara	Desa Perepat
Desa Sungai Tuak	Desa Sungai Tuak	Desa Sungai Langir
Desa Rantau Panjang	Desa Tapis	Desa Pulau Rantau
Desa Jone		
Desa Padang Pengrapat		
Desa Muara Pasir		
Desa Perepat		
Desa Pulau Rantau		
Desa Sungai Langir		
Desa Tapis		
Desa Senaken		

Sumber : Hasil Penelitian, Tahun 2015

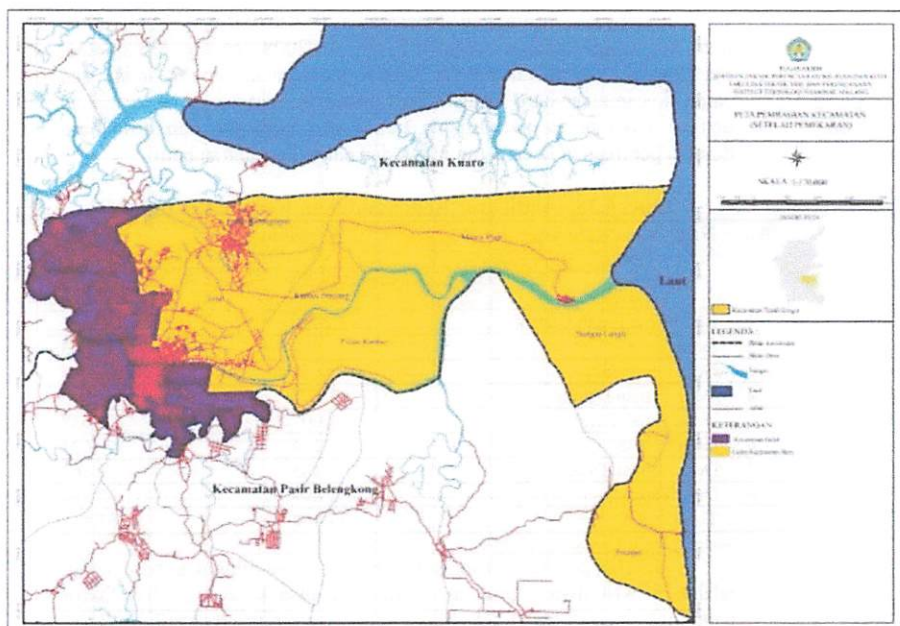
Kecamatan Tanah Grogot Induk terdiri dari 8 desa yaitu Janju, Sempulang, Tepian Batang, Tanah Grogot, Sungai Tuak, Tanah Periuk, Pepara dan Tapis. Mengingat Kelurahan Tanah Grogot adalah ibukota kecamatan sebelumnya, sehingga Kelurahan Tanah Grogot tetap menjadi ibukota Kecamatan Tanah Grogot. Kemudian untuk desa-desa di Kecamatan baru yaitu Rantau Panjang, Jone, Muara Pasir, Padang Pengrapat, Sungai Langir, Pulau Rantau, Perepat dan Senaken.

²⁵Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, calon ibukota kecamatan baru direkomendasikan berada di Desa Rantau Panjang karena posisi yang central sehingga mudah untuk dijangkau setiap desa yang ada di kecamatan baru.

Menurut Pak Alias Desa Rantau Panjang “ Desa Rantau Panjang kemungkinan direkomendasikan menjadi ibukota kecamatan baru karena di Desa Rantau Panjang akan dibangun beberapa fasilitas-fasilitas seperti bandara.”

Menurut Pak Udin Desa Muara Pasir “ Untuk calon ibukota kecamatan baru yang penting bagi kami dapat dijangkau. Mungkin Desa Rantau Panjang bisa jadi calon ibukota karena dekat dengan desa-desa lainnya.”



Gambar 5.13 Pembagian Kecamatan Tanah Grogot (Setelah Pemekaran)

5.3. Analisa Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tanah

Grogot

Analisa kelayakan merupakan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti. Aspirasi ini kemudian dilanjutkan untuk melakukan kajian terhadap kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot. Kajian ini terutama difokuskan untuk menganalisis potensi Desa-Desa yang diusulkan dibagi menjadi 2 kecamatan nantinya, sehingga dapat diketahui desa-desa tersebut memiliki cukup potensi untuk dimekarkan sebagai kecamatan baru atau belum.

5.3.1. Perhitungan indikator tiap desa

Agregat perhitungan Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan indikator yang terdapat dalam PP No. 19/2008 tentang Kecamatan. Perhitungan disesuaikan dengan desain penataan kecamatan induk dan calon kecamatan baru yang telah dibagi. Berikutnya akan disajikan dengan tabel untuk perhitungan faktor dan indikator tiap desa baru dengan pembagian kecamatan induk dan calon kecamatan baru.

Tabel 5.28. Indikator Kependudukan Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Kependudukan	
		Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kelurahan Tanah Grogot	1.2056	39.551
2	Desa Janju	808	2.613
3	Desa Sempulang	630	1.965
4	Desa Tepian Batang	1.473	4.968
5	Desa Tanah Periuk	1.007	3.638
6	Desa Peparu	194	631
7	Desa Sungai Tuak	485	1.663
8	Desa Tapis	809	2.789
	Total	17.462	57.818

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Jumlah penduduk kecamatan induk setelah dilakukan pemekaran adalah 57.818 jiwa. Untuk menghitung analisa kelayakan dari faktor penduduk, jumlah penduduk dibagi dengan rata-rata pembanding. Rata-rata pembanding dihasilkan dari jumlah penduduk Kabupaten Paser dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

Tabel 5.29. Indikator Kependudukan Calon Kecamatan Baru

No	Nama Desa	Kependudukan	
		Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Desa Rantau Panjang	340	1.240
2	Desa Jone	1.357	5.078
3	Desa Padang Pengrapat	1.202	4.126
4	Desa Muara Pasir	1.076	3.816
5	Desa Perepat	144	479
6	Desa Pulau Rantau	206	837
7	Desa Sungai Langir	118	406
8	Desa Senaken	2.205	7.523
	Total	6.648	23.505

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Jumlah penduduk calon kecamatan baru setelah dilakukan pemekaran adalah 23.505 jiwa. Untuk menghitung analisa kelayakan dari faktor penduduk, jumlah penduduk dibagi dengan rata-rata pembanding. Rata-rata pembanding dihasilkan dari jumlah penduduk Kabupaten Paser dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Paser.

Luas wilayah keseluruhan kecamatan induk setelah dilakukan pemekaran menjadi 108,85 Km². Sedangkan untuk luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan seluas 104 Km². Untuk menghitung analisa kelayakan dari faktor luas wilayah yaitu luas wilayah keseluruhan dibagi dengan rata-rata pembanding. Rata-rata pembanding dihasilkan dari total luas wilayah Kabupaten Paser dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut dan begitu pula dengan perhitungan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.26 indikator luas wilayah kecamatan induk.

Tabel 5.30. Indikator Luas Wilayah Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
		Luas Wilayah Secara Keseluruhan (Km ²)	Luas Wilayah Efektif (Km ²)
1	Kelurahan Tanah Grogot	10,36	10,05
2	Desa Janju	40,08	37,43
3	Desa Sempulang	8,20	8,20
4	Desa Tepian Batang	25,97	25,60
5	Desa Tanah Periuk	6,74	5,99
6	Desa Pepara	5,69	5,00
7	Desa Sungai Tuak	7,31	6,88
8	Desa Tapis	4,50	4,50
	Total	108,85	104

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.31. Indikator Luas Wilayah Calon Kecamatan Baru

No	Nama Desa	Luas Wilayah	
		Luas Wilayah Secara Keseluruhan (Km ²)	Luas Wilayah Efektif (Km ²)
1	Desa Rantau Panjang	42,44	41,57
2	Desa Jone	46,78	45,23
3	Desa Padang Pengrapat	14,60	13,99
4	Desa Muara Pasir	83,41	76,00
5	Desa Perepat	24,00	24,00
6	Desa Pulau Rantau	44,00	39,15
7	Desa Sungai Langir	28,00	26,57
8	Desa Senaken	6,00	5,94
	Total	289	272

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Dari tabel 5.27 indikator luas wilayah calon kecamatan baru, luas wilayah keseluruhan calon kecamatan baru setelah dilakukan pemekaran menjadi 289 Km². Sedangkan untuk luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan seluas 272 Km². Untuk menghitung analisa kelayakan dari faktor luas wilayah yaitu luas wilayah keseluruhan dibagi dengan rata-rata pembanding. Rata-rata pembanding dihasilkan dari total luas wilayah Kabupaten Paser dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten tersebut dan begitu pula dengan perhitungan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

Faktor rentang kendali terbagi menjadi dua indikator yaitu jarak tempuh dan waktu tempuh. Rata-rata jarak tempuh yang dihasilkan untuk kecamatan induk (setelah pemekaran) yaitu 8 Km sedangkan untuk rata-rata waktu tempuhnya adalah 17 menit. Lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 5.28 indikator rentang kendali kecamatan induk. Sedangkan rata-rata jarak tempuh yang dihasilkan untuk calon kecamatan baru (setelah pemekaran) yaitu 19 Km sedangkan untuk rata-rata waktu tempuhnya adalah 59 menit dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.29 indikator rentang kendali calon kecamatan baru.

Tabel 5.32. Indikator Rentang Kendali Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Rentang Kendali	
		Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Menit)
1	Kelurahan Tanah Grogot	0	0
2	Desa Janju	10	30
3	Desa Sempulang	9	15
4	Desa Tepian Batang	4	10
5	Desa Tanah Periuk	2	10
6	Desa Pepera	25	30
7	Desa Sungai Tuak	2	15
8	Desa Tapis	4	10
	Rata-rata	8	17

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.33. Indikator Rentang Kendali Calon Kecamatan Baru

No	Nama Desa	Rentang Kendali	
		Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Menit)
1	Desa Rantau Panjang	0	0
2	Desa Jone	5	20
3	Desa Padang Pengrapat	10	30
4	Desa Muara Pasir	18	60
5	Desa Perepat	45	120
6	Desa Pulau Rantau	2	10
7	Desa Sungai Langir	49	150
8	Desa Senaken	5	20
	Rata-rata	19	59

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Perekonomian di Kecamatan Induk akan berpusat pada Kelurahan Tanah Grogot mengingat Kelurahan Tanah Grogot sebagai ibu kota kecamatan. Dengan adanya pemekaran diharapkan pembangunan sarana ekonomi di kecamatan (setelah pemekaran) dapat mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Lebih jelasnya lihat tabel 5.30 indikator aktivitas perekonomian kecamatan induk.

Dapat dilihat pada tabel 5.31 indikator aktivitas perekonomian calon kecamatan baru bahwa aktivitas perekonomian di kecamatan baru masih sangat minim. Hal ini memungkinkan adanya rencana pembangunan sarana perekonomian seperti bank, pasar dan lainnya, sehingga mempermudah masyarakat melakukan aktivitas perekonomian dalam menunjang kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.34. Indikator Aktivitas Perekonomian Kecamatan Induk

No	Nama Desa/Kelurahan	Aktivitas Perekonomian			
		Jumlah Bank (Unit)	Jumlah Non Bank (Unit)	Jumlah Pasar (Unit)	Jumlah Kelompok Pertokoan (unit)
1	Kelurahan Tanah Grogot	8	70	2	12
2	Desa Janju	0	4	1	1
3	Desa Sempulang	0	4	1	0
4	Desa Tepian Batang	0	2	1	1
5	Desa Tanah Periuk	0	10	0	0
6	Desa Pepara	0	1	1	0
7	Desa Sungai Tuak	0	1	0	0
8	Desa Tapis	0	5	1	0
Total		8	97	7	14

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.35. Indikator Aktivitas Perekonomian Calon Kecamatan Baru

No	Nama Desa	Aktivitas Perekonomian			
		Jumlah Bank (Unit)	Jumlah Non Bank (Unit)	Jumlah Pasar (Unit)	Jumlah Kelompok Pertokoan (unit)
1	Desa Rantau Panjang	0	5	0	0
2	Desa Jone	0	10	1	0
3	Desa Padang Pengrapat	0	2	1	0
4	Desa Muara Pasir	0	1	1	0
5	Desa Perepat	0	1	0	0
6	Desa Pulau Rantau	0	2	0	0
7	Desa Sungai Langir	0	1	0	0
8	Desa Senaken	0	24	1	1
Total		0	46	4	1

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.36. Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Induk

Ketersediaan Sarana dan Prasarana														
No	Nama Desa/Kelurahan	Σ SD (Unit)	Σ Usia SD (Jiwa)	Rasio SD	Σ SLTP (Unit)	Σ Usia SLTP (Jiwa)	Rasio SLTP	Σ SLTA (Unit)	Σ Usia SLTA (Jiwa)	Rasio SLTA	Σ Fasilitas Kesehatan (Unit)	Rasio Fasilitas Kesehatan/ Σ penduduk	Σ tenaga medis (Jiwa)	Rasio Tenaga Media/ Penduduk
1	Desa Janju	1	198	0,0051	2	129	0,0155	1	14	0,0714	3	0,0011	1	0,00038
2	Desa Sempulang	1	144	0,0069	0	0	0	0	0	0	5	0,0025	1	0,00051
3	Desa Tepian Bufang	1	189	0,0053	0	0	0	3	1.351	0,0022	6	0,0012	2	0,0004
4	Kelurahan Tanah Grogot	22	5.021	0,0044	12	1.862	0,0064	3	2.257	0,0013	28	0,0007	44	0,00111
5	Desa Tanah Periuik	2	712	0,0028	1	0	0	3	433	0,0069	6	0,0016	3	0,00082
6	Desa Pepara	1	82	0,0122	0	0	0	0	0	0	2	0,0032	2	0,00317
7	Desa Sungai Tuak	1	100	0,0100	0	0	0	0	0	0	4	0,0024	2	0,0012
8	Desa Tapis	1	220	0,0045	2	171	0,0117	0	0	0	0	0	0	0
	Total	30	6.666	222,2	17	2.162	127,18	10	4.055	405,5	54	1.070,70	55	1.051,2

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No	Nama Desa/Kelurahan	Σ Kendaraan (Unit)	Prosentase RT memiliki Kendaraan /KK	Σ Pelanggan Listrik	Prosentase pelanggan listrik/KK	Panjang jalan (Km)	Rasio panjang jalan/ Σ kendaraan	Σ Sarana Peribadatan (Unit)	Rasio sarana peribadatan /jumlah penduduk	Σ Lapangan (Unit)	Rasio Fasilitas Lapangan/ Σ Penduduk	Balai Pertemuan (Unit)
1	Desa Janju	811	100	435	54	8	0,009864365	11	0,00420972	4	0,001530808	1
2	Desa Sempulang	557	88	327	52	21	0,037701975	10	0,00508906	5	0,002544529	1
3	Desa Tepian Butang	1.053	71	828	56	64	0,060778727	7	0,00140902	3	0,000603865	1
4	Kelurahan Tanah Grogot	17.493	145	6.591	55	101	0,005773738	42	0,00106192	4	0,000101135	1
5	Desa Tanah Periuk	1.132	112	606	60	23	0,020318021	10	0,00274876	2	0,000549753	1
6	Desa Peparu	195	101	105	54	13	0,066666667	3	0,00475436	3	0,004754358	0
7	Desa Sungai Tuak	489	101	277	57	10	0,020449898	6	0,00360794	1	0,000601323	0
8	Desa Tapis	1.251	154	464	57	35	0,027977618	2	0,0007171	3	0,001075654	0
	Total	22.981	874	9.633	445	275	0,24953101	91	635,36264	25	2.313	6

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.37. Indikator Ketersediaan Sarana dan Prasarana Calon Kecamatan Baru

No	Nama Desa/Kelurahan	Ketersediaan Sorana dan Prasarana												
		Σ SD (Unit)	Σ Usia SD (Jiwa)	Rasio SD	Σ SLTP (Unit)	Σ Usia SLTP (Jiwa)	Rasio SLTP	Σ SLTA (Unit)	Σ Usia SLTA (Jiwa)	Rasio SLTA	Σ Fasilitas Kesehatan (Unit)	Rasio Fasilitas Kesehatan / Σ penduduk	Σ tenaga medis (Jiwa)	Rasio Tenaga Medis/ Penduduk
1	Desa Rantau Panjang	1	118	0,0085	1	59	0,0169	0	0	0	4	0,00323	3	0,00242
2	Desa Jone	1	83	0,0120	0	0	0,0000	0	166	0	6	0,00118	2	0,00039
3	Desa Padang Pengrapat	4	473	0,0085	2	254	0,0079	0	0	0	4	0,00097	32	0,00776
4	Desa Muara Pasir	1	429	0,0023	1	137	0,0073	0	0	0	4	0,00105	2	0,00052
5	Desu Perepat	1	63	0,0159	0	0	0,0000	0	0	0	2	0,00418	2	0,00418
6	Desa Pulau Rantau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00239	1	0,00119
7	Desa Sungai Langir	1	46	0,0217	0	0	0	0	0	0	1	0,00246	2	0,00493
8	Desa Senaken	1	309	0,0032	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total		10	1521	152,1	5	450	90	1	166	166	23	1022	44	534,205

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No	Nama Desa/Kelurahan	Σ Kendaraan (Unit)	Prosentase RT memiliki Kendaraan /KK	Σ Pelanggan Listrik	Prosentase pelanggan listrik/KK	Panjang jalan (Km)	Rasio panjang jalan/ Σ kendaraan	Σ Sarana Peribadatan (Unit)	Rasio sarana peribadatan/ Σ penduduk	Σ Lapangan (Unit)	Rasio Fasilitas Lapangan/ Σ Penduduk	Σ Balai Pertemuan (unit)
1	Desa Rantau Panjang	352	104	206	61	28	0,079545455	4	0,00322581	1	0,000806452	1
2	Desa Jone	7287	537	846	62	49	0,0067243	19	0,00374163	2	0,000393856	1
3	Desa Padang Pengrupat	2056	171	687	57	51	0,024805447	9	0,00218129	4	0,000969462	1
4	Desa Muara Pasir	2531	237	300	28	25	0,009800078	0	0	1	0,000262055	1
5	Desa Perepat	300	208	79	55	13	0,043333333	1	0,00208768	1	0,002087683	0
6	Desa Pulau Rantau	177	86	139	67	24	0,13559322	3	0,00358423	2	0,002389486	1
7	Desa Sungai Langir	168	142	67	57	17	0,101190476	1	0,00246305	1	0,002463054	0
8	Desa Senaken	1323	60	1253	57	37	0,02796674	1	0,00013293	4	0,000531703	0
	Total	14214	1545,28136	3577	444	244	0,084663163	38	0,01741662	16	0,00990375	3

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

5.3.2. Perhitungan Kelayakan Pemekaran Kecamatan

Metode penilaian yang digunakan dalam analisis kelayakan pemekaran kecamatan induk dan calon kecamatan baru adalah sistem skoring sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Faktor yang mempengaruhi kelayakan pemekaran ialah: jumlah penduduk, luas daerah, rentang kendali, aktivitas perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana. Setiap faktor dan indikator mempunyai skor dengan skala 1-5 dan mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan kecamatan. Berdasarkan PP 19/2008, pemberian skor pada tiap indikator adalah :

- Skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, masuk dalam kategori sangat mampu
- Skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% dan lebih kecil atau sama dengan 79% besaran/nilai rata-rata, masuk dalam kategori mampu
- Skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% dan lebih kecil atau sama dengan 59% besaran/nilai rata-rata, masuk dalam kategori kurang mampu
- Skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% dan lebih kecil atau sama dengan 39% besaran/nilai rata-rata, masuk dalam kategori tidak mampu
- Skor 1 apabila besaran/nilai indikator sama dengan atau kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata, masuk kategori sangat tidak mampu.

Berdasarkan PP 19 tahun 2008, cara menghitung tiap indikator adalah sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk:
Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap.
- Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan:
Jumlah luas daratan ditambah luas lautan
- Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan:
Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.
- Rata-rata jarak ke pusat pemerintahan kecamatan:

- Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan.
- Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan:
Jumlah waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
 - Jumlah Bank:
Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
 - Lembaga Keuangan Non Bank:
Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi.
 - Kelompok Pertokoan:
Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
 - Jumlah Pasar:
Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
 - Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar:
Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun.
 - Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama:
Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
 - Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas:
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun.
 - Rasio tenaga medis per penduduk:
Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk
 - Rasio fasilitas kesehatan per penduduk:
Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk

- Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor: Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100.
- Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga: Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100.
- Rasio panjangjalan terhadap jumlah kendaraan bermotor: Jumlah panjangjalan dibagi jumlah kendaraan bermotor.
- Rasio sarana Peribadatan per penduduk: Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk.
- Rasio fasilitas lapangan olah raga per penduduk: Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk.
- Balai Pertemuan: Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

1. Perhitungan Kelayakan Pemekaran Kecamatan Induk

Berdasarkan design pemekaran Kecamatan Induk, desa-desa yang terbagi dalam kecamatan induk yaitu : Desa Janju, Desa Sempulang, Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tanah Periuk, Desa Tepian Batang, Desa Sungai Tuak, Desa Pepara dan Desa Tapis.

2. Perhitungan Kelayakan Calon Kecamatan Baru

Berdasarkan hasil design pemekaran, desa-desa yang termasuk dalam calon kecamatan baru meliputi : Desa Rantau Panjang, Desa Jone, Desa Padang Pengrapat, Desa Muara Pasir, Desa Pulau Rantau, Desa Perepat, Desa Sungai Langir dan Desa Senaken.

Tabel 5.38. Perhitungan Kelayakan Pemekaran Kecamatan Induk

No	Indikator	Tanah Grogot (Induk)	Rata-rata pembeding	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
1	Penduduk							
	Jumlah Penduduk	57.818	24.761,2	2,34	234	5	20	100
2	Luas Daerah							
	Luas Wilayah Keseluruhan	108,85	1.160,394	0,09	9	1	5	5
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	104	850,505	0,12	12	1	5	5
3	Rentang Kendali							
	Rata-rata jarak desa ke ibukota kecamatan	8	17,49	0,46	46	3	10	30
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke ibukota kecamatan	17	42,22	0,40	40	3	10	30
4	Aktivitas Perekonomian							
	Jumlah Bank	8	2,3	3,48	348	5	2	10
	Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank	97	27,36	3,55	355	5	2	10
	Jumlah Kelompok Pertokoan	14	5,8	2,41	241	5	2	10

No	Indikator	Tanah Grogot (induk)	Rata-rata pembanding	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
	Jumlah Pasar	7	7,9	0,89	89	4	4	16
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana							
	Rasio sekolah Dasar/ penduduk usia sekolah dasar	1/222	1/140	0,63	63	4	4	16
	Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama/perpenduduk usia SLTP	1/127	1/138	1,09	109	5	4	20
	Rasio sekolah SLTA/penduduk SLTA	1/405	1/205	0,51	51	3	4	12
	Rasio taskes/jumlah penduduk	1/2513	1/394	0,16	16	1	4	4
	Rasio tenaga medis/jumlah penduduk	1/1314	1/288	0,22	22	2	4	8
	Persentase RT yang mempunyai kendaraan bermotor/perahu motor/ kupal motor	132	80	1,65	165	5	3	15

No	Indikator	Tanah Grogot (induk)	Rata-rata pembanding	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	55	38	1.45	145	5	3	15
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1/84	1/84	1.00	100	5	3	15
	Rasio sarana peribadatan/ jumlah penduduk	1/635	1/273	0.43	43	3	4	12
	Rasio fasilitas lap. Olahraga/ jumlah penduduk	1/2.313	1/2.265	0,98	98	5	3	15
	Jumlah Balai pertemuan	6	14,4	0.42	42	4	4	16
TOTAL								364

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Tabel 5.39. Perhitungan Kelayakan Pemekaran Calon Kecamatan Baru

No	Indikator	Kecamatan Baru (Calon)	Rata-rata perbandingan	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
1	Penduduk							
	Jumlah Penduduk	23.505	24.761,2	0,95	95	5	20	100
2	Luas Daerah							
	Luas Wilayah Keseluruhan	289	1.160,394	0.25	25	2	5	10
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	272	850,505	0.32	32	2	5	10
3	Rentang Kendali							
	Rata-rata jarak desa ke ibukota kecamatan	19	17,49	1,09	109	5	10	50
	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke ibukota kecamatan	59	42,22	1,40	140	5	10	50
4	Aktivitas Perekonomian							
	Jumlah Bank	0	2,3	0,00	0	1	2	2
	Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank	46	27,36	1,68	168	5	2	10
	Jumlah Kelompok Pertokoan	1	5,8	0.17	17	1	2	2
	Jumlah Pasar	4	7,9	0,51	51	3	4	12

No	Indikator	Kecamatan Baru (Calon)	Rata-rata pembanding	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana							
	Rasio sekolah Dasar/ penduduk usia sekolah dasar	1/152	1/140	0,92	92	5	4	20
	Rasio sekolah lanjutan tingkat pertama/perpenduduk usia SLTP	1/90	1/138	1,53	153	5	4	20
	Rasio sekolah SLTA/penduduk SLTA	1/166	1/205	1,23	123	5	4	20
	Rasio faskes/jumlah penduduk	1/1022	1/394	0,39	39	2	4	8
	Rasio tenaga medis/jumlah penduduk	1/534	1/288	0,54	54	3	4	12
	Persentase RT yang mempunyai kendaraan bermotor/perahu motor/ kapal motor	214	80	2,68	268	5	3	15
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	54	38	1,42	142	5	3	15

No	Indikator	Kecamatan Baru (Calon)	Rata-rata pembanding	Perhitungan	Nilai (%)	Konversi	Bobot	Nilai akhir (konversi x bobot)
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	58	1/84	1,45	145	5	3	15
	Rasio sarana peribadatan/ jumlah penduduk	1/619	1/273	0,44	44	3	4	12
	Rasio fasilitas lap. Olahraga/ jumlah penduduk	1/1.469	1/2.265	1,54	154	5	3	15
	Jumlah Balai pertemuan	3	14,4	0,21	21	4	4	16
TOTAL								414

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015

Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan pada tabel 5.38, kecamatan induk mendapatkan nilai total keseluruhan sebesar 364. Menurut standar PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Jadi dapat disimpulkan bahwa kecamatan induk termasuk dalam kategori mampu dan dapat direkomendasikan menjadi kecamatan baru. Sedangkan hasil perhitungan analisa kelayakan pemekaran calon Kecamatan Baru (tabel 5.39), maka dari nilai total yang dihasilkan adalah 414. Dapat disimpulkan bahwa calon kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Grogot dikategorikan mampu dan bisa direkomendasikan untuk dilakukan pemekaran.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari proses penelitian sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dan memuat rekomendasi menyangkut dengan tema studi berikutnya yang berkaitan dengan studi pemekaran wilayah.

6.1. Kesimpulan

Penelitian dan kajian secara umum bertujuan untuk mengetahui studi kelayakan dan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Grogot. Hasil kajian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

6.1.1. Mengidentifikasi karakteristik wilayah Kecamatan Tanah Grogot.

Dari hasil kajian karakteristik wilayah yang dilihat dari aspek kependudukan, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian serta sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Tanah Grogot maka dapat disimpulkan bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kecamatan Tanah Grogot. Berikut akan dijabarkan berdasarkan aspek-aspek diatas.

1. Aspek kependudukan

Jika dilihat dari aspek kependudukan, indeks kepadatan penduduk menunjukkan persebaran penduduk yang tidak merata karena jumlah penduduk menumpuk pada wilayah-wilayah yang terdapat di sekitar pusat kota. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat kota memiliki jumlah penduduk yang rendah.

2. Aspek luas wilayah

Luasnya wilayah kecamatan Tanah Grogot mengindikasikan adanya keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran karena dengan luasnya wilayah tersebut masyarakat merasa kesulitan dalam menjangkau pelayanan pemerintahan.

3. Aspek rentang kendali

Berdasarkan jarak dan waktu tempuh, masyarakat Kecamatan Tanah Grogot khususnya yang berada di daerah terpencil kesulitan dalam menjangkau pusat pemerintahan dikarenakan infrastruktur yang

kurang memadai seperti jaringan jalan yang rusak sehingga menghambat waktu yang ditempuh.

4. Aspek sarana dan prasarana

Berdasarkan sarana dan prasarana yang ada saat ini dianggap kurang mencukupi. Konsentrasi sarana hanya berada di pusat kota yaitu kelurahan tanah grogot. Dengan demikian menunjukkan ketidakseimbangan dalam pemerataan pembangunan. Sedangkan prasarana yang ada di Kecamatan Tanah Grogot kurang terlayani seperti jaringan jalan. Jaringan

5. Aspek perekonomian

Dari hasil analisa dapat dilihat bahwa 54% sarana perdagangan berada di pusat kota yaitu Kelurahan Tanah Grogot, hal ini menunjukkan ketimpangan pergerakan ekonomi di Kecamatan Tanah Grogot.

6.1.2. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat terhadap kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

Berdasarkan hasil survey dan analisa terhadap aspirasi masyarakat dapat dilihat yaitu :

1. 85% responden menyatakan pendapatnya setuju dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Grogot, artinya masyarakat Kecamatan Tanah Grogot menginginkan dan mendukung pemekaran kecamatan tersebut. Keinginan masyarakat tersebut di dorong oleh factor jangkauan pelayanan yang rendah, hal ini dinyatakan dengan suara yang diperoleh sebesar 37 suara atau pendapat masyarakat.
2. Masyarakat yang setuju dengan adanya pemekaran dan letaknya jauh dari pusat kecamatan menginginkan keluar dari kecamatan inti dan menjadi kecamatan baru yaitu Desa Rantau Panjang, Desa Padang Pengrapat, Desa Jone, Desa Muara Pasir, Desa Senaken, Desa Perepat, Desa Sungai Langir, dan Desa Pulau Rantau.

6.1.3. Menguji kelayakan pemekaran Kecamatan Tanah Grogot.

Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan tiap indikator dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanah Grogot dikategorikan mampu untuk dimekarkan menjadi kecamatan induk dan calon kecamatan baru dengan

kecamatan induk mendapatkan nilai total keseluruhan sebesar 364 dan Kecamatan Baru dengan nilai total sebesar 414. Nilai tersebut merupakan nilai berdasarkan standar pemerintah dalam menentukan kelayakan pemekaran kecamatan.

Kecamatan induk dinilai mampu untuk dimekarkan karena didukung oleh factor penduduk, dimana hal ini menunjukkan bahwa kecamatan induk memiliki potensi SDM yang tinggi. Sumberdaya manusia menentukan akan keberhasilan pembangunan wilayah melalui jumlah dan kualitas penduduknya. Selain itu factor yang menunjang pemekaran kecamatan induk adalah aktifitas perekonomian, dimana hal ini sangat penting untuk mendukung pengembangan wilayah. Kedua hal tersebut sangat berkaitan karena pertumbuhan penduduk sebagai faktor endogen dalam pertumbuhan ekonom iwilayah.

Kecamatan baru dinilai mampu untuk dimekarkan karena didukung oleh faktor ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal ini menunjukkan bahwa kecamatan baru sudah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan pemerintahan dengan baik.

6.2. Rekomendasi

Setelah dilakukan penelitian mengenai studi kelayakan dan aspirasi masyarakat terhadap pemekaran Kecamatan Tanah Grogot dan hasilnya yaitu Kecamatan Tanah Grogot layak untuk dimekarkan. Peneliti memberikan rekomendasi untuk dilakukan studi lanjutan terkait dengan pemekaran wilayah. Adapun rekomendasi dari penulis untuk studi lanjutannya yaitu :

1. Desain Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot di Kab. Paser Kaltim
2. Rencana Pemekaran Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim
3. Konsep Penentuan Calon Ibukota Kecamatan Baru, Kabupaten Paser, Kaltim

Maksimilianus Ga'i Ardiyanto, Hidayat Wahyu dan Budi Santoso Endratno, 2010, *Kajian Kesiapan Maunere Menjadi Kota Otonom*, Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 2, No.1, Hlm 7

Margono A, Djaja Suarta dan Zulkifli, 2014, *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012*, eJournal Administrative Reform, Vol. 2, No. 1, Hlm 1051

Puspitasari Ratty, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah baru*, Jom FISIP, Vol.1, No.2, Hlm 3

Suliyanto, 2011, *Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal atau Skala Interval*, Prosiding Seminar Nasional Statistika

Syamsiah, 2013, *Dampak pemekaran kabupaten tana tidung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat*, eJournal Pemerintahan Intergatif, Vol.1, No.4, Hlm 224

D. Kamus

DirJen Penataan Ruang, 2009, *Kamus Penataan Ruang*, (Cet : Departemen Pekerjaan Umum), Jakarta, Hlm 283

E. Regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita Rahardjo, 2014, *Pertumbuhan wilayah & wilayah pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm 25
- Budiharsono Sugeng, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, Hlm 18
- Furqon, 2004, *Statistika Terapan untuk Penelitian*, Bandung, CV. Alfabeta, Hlm 22
- Ilhami, 1990, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Surabaya, Usaha Nasional, Hlm 63
- Riduwan, 2009, *Dasar-dasar Statistika*, Bandung, CV. Alfabeta, Hlm 20
- Singarimbun Irawati, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES, Hlm 192
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV Alfabeta, Hlm 140
- Yitnosumarto Suntoyo, 1990, *Dasar-dasar Statistika*, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm 13

B. Internet

- Lubis Zulkarnain, 2009, *Pemekaran Untuk Kesejahteraan: Antara Solusi dan Imajinasi* (Online), (<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/pemekaran-untuk-kesejahteraan-antara-solusi-dan-imaginasi/>), diakses tanggal 8 November 2014

C. Jurnal

- Eriany Praharesti, Goeritno Haryo dan Hernawati Lucia, 2014, *Studi Deskriptif Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Mengikuti Kegiatan Bimbingan Belajar pada Siswa SMP di Semarang*, Psikodimensia, Vol. 13, No. 1, Hlm 119
- Kanaha Ibnu, 2014, *Efektifitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Pulau Morotai*, Jurnal UNIERA Vol. 3 No.1, Hlm 24

Maksimilianus Ga'i Ardiyanto, Hidayat Wahyu dan Budi Santoso Endratno, 2010, *Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom*, Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol. 2, No.1, Hlm 7

Margono A, Djaja Suarta dan Zulkifli, 2014, *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2012*, eJournal Administrative Reform, Vol. 2, No. 1, Hlm 1051

Puspitasari Ratty, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan daerah baru*, Jom FISIP, Vol.1, No.2, Hlm 3

Suliyanto, 2011, *Perbedaan Pandangan Skala Likert Sebagai Skala Ordinal atau Skala Interval*, Prosiding Seminar Nasional Statistika

Syamsiah, 2013, *Dampak pemekaran kabupaten tana tidung terhadap, peningkatan kesejahteraan masyarakat*, eJournal Pemerintahan Intergatif, Vol.1, No.4, Hlm 224

D. Kamus

DirJen Penataan Ruang, 2009, *Kamus Penataan Ruang*, (Cet : Departemen Pekerjaan Umum), Jakarta, Hlm 283

E. Regulasi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No 2 Malang

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Halimurrahman
Nim : 1024056
Judul Skripsi : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Penerapan Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser
Pembimbing I : Maria C. Endawati, ST, MIUM

NO	TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	17/1/2015	<ul style="list-style-type: none">- Prakerjalektri variabel- Tujuan & sasaran- kesanggupan pasar- 2 sasaran tetap sampai kelas ke-1000- check definisi aspirasi	
	17/2/2015	<ul style="list-style-type: none">1. L.G. sumbernya dan kebutuhan (tanya masyarakat, org lain)2. hasil pengajaran & wawancara & perlu studi lapangan3. bagaimana hasil ini akan dibayar - monev yg & hasil yg diharapkan ut ? - dalam aspek ?Tujuan SKI adalah : 1. keinginan masyarakat 2. penerapan ut keinginan4. tujuan penerapan & proses seleksi kandidat5. kesanggupan pasar6. kesanggupan pasar	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Malang

LEMBAR ASISTENSI



Nama : Halimurrahman
Nim : 1024056
Judul Skripsi : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Penekaran Kecamatan Tanah Gregot,
Kabupaten Paser
Pembimbing 1 : Maria C. Endarwati, ST, MUEM

NO	TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
	13/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Check kembali rekomendasi- lengkapi daftar isi 1/2 sekoran- ACC sidang	













LEMBAR ASISTENSI

Nama :
 Haluanurrahman
 NIM : 1024056
 Judul Skripsi : Studi Kelayakan dan Aspek Biaya: Analisis Terhadap Pendirian Kecamatan Tanah Gongot, Kabupaten Pacel
 Kecamatan II : Agung Wijaksono, ST, MT

NO	TANGGAL	URAIAN	TANDA TANGAN
8 / 7 2016		-> Lakukan faktor pembatas yg menyebabkan masyarakat mengalami masalah. -> Identifikasi faktor pembatas yg menyebabkan	
11 / 7 2016		-> pastikan masyarakat tahu masalah. -> siapa (atau siapa saja?) -> permasalahan, apa saja masalahnya? -> faktor sistem, sistem & sistem -> faktor teknis, apa saja masalahnya?	
1000		-> faktor teknis, apa saja masalahnya? -> faktor sistem, sistem & sistem -> faktor teknis, apa saja masalahnya?	

**JURUSAN TEKNIK PWK/PLANOLOGI
PERIODE II 2015
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

1. Nama Mahasiswa : **HALIMURRAHMAN**
2. NIM : **10.24.056**
3. Jurusan : **Teknik PWK/Planologi**
4. Hari / Tanggal : **KAMIS, 25 JUNI 2015**
5. Waktu : **09.00 – 11.00 WIB**
6. Ruang : **r. 31**
7. Judul Tugas Akhir : **STUDI KELAYAKAN DAN ASPRASI
MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN
KECAMATAN TANAH GROGOT**

NO	NAMA MAHASISWA	REVISI	TANDA TANGAN
1.	Elthon C Tanna	1324087	
2.	Selwano D.C Banus	1324111	
3.	Joy Paul Dimi	1324049	
4.	Gerontinus R.D. Pangi	1324096	
5.	SETIAWAN ROLAN DOK	1324045	
6.	Andwin Fatmawati E	1324025	
7.	Ariso Pitaro Cantoso Pan	1324050	
8.	Muhammad Wahida Abdul K	1324066	
9.	Ifan Yoga Pratomo	1324086	
10.	Hardianti	10.24.092	

Malang, 25 JUNI 2015
Mengetahui
Ketua Jurusan T. Planologi



Iga Soesarno, ST, MT
NIP. Y. 1039600293

Panitia Pelaksana Tugas Akhir
Koordinator



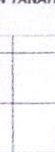
Arif Setyawan, ST, MT
NIP. Y. 1030100369

DAFTAR HADIR UJIAN SEMINAR HASIL
JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI/PWK
PERIODE II 2015
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG


1. Nama Mahasiswa : HALIMURRAHMAN
2. N i m : 10 24 056
3. Jurusan : Teknik PWK/Planologi
4. Hari / Tanggal : KAMIS, 25 JUNI 2015
5. Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
6. Ruang : r. 31
7. Judul Tugas Akhir : **STUDI KELAYAKAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PEMEKARAN KECAMATAN TANAH GROGOT**

NO	NAMA DOSEN PEMBAHAS	TANDA TANGAN
1	MARIA C. ENDARWATI, ST, MIUEM	
2	IR. A. NURUL HIDAYATI, MTP	
3	ARIEF SETIYAWAN, ST, MT	

Malang, 25 JUNI 2015
Mengetahui
Ketua Jurusan T. Planologi


Ida Soewarni, ST, MT
NIP.Y. 1039600293

Panitia Pelaksana Tugas Akhir
Koordinator


Arief Setiyawan, ST, MT
NIP.Y.1030100369



Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang
Jl. Bendungan Sigura - gura No. 02 Kota Malang

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Nama : HALIMURRAHMAN
Nim : 10 24 056
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015
Waktu : 09.00 - 11.00 WIB
Jurusan : Teknik PWK / Planologi
Ruang : R. 32
Judul : Studi Kelayakan dan Aspirasi Masyarakat Terhadap Pemekaran
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

No	Dosen Pembahas	Pertanyaan/Masukan	Paraf
1.	Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP	<ul style="list-style-type: none">- Dasar dari pemekaran? Sebagai landasan penelitian- Penggunaan variabel penelitian untuk dasar/landasan penelitian- Latar belakang untuk dilakukan pemekaran (hal 24??)- Variabel aspirasi masyarakat apa saja?- Analisis : tabel hasil kuesioner di analisis/tidak?- Penarikan kesimpulan sesuaikan dengan tujuan dan sasaran. (terlalu mendasar)- Kelayakan : jika ada yang kurang (diarahkan menjadi apa?), jika ada yang lebih (dipertahankan). Dijelaskan	
2.	Arief Setiyawan, ST, MT	<ul style="list-style-type: none">- Tugas akhir bukan merupakan suatu project tapi merupakan analisa teorikal yang didapat pada kuliah, namun dapat ditolerir karena memasukkan teorikal pada proses aspirasi masyarakat	

No	Dosen Pembahas	Pertanyaan/Masukan	Paraf
		<ul style="list-style-type: none">- Aspirasi : Teori vs aplikasi, konsistensi- Fakta wajib punya sumber : indikator, sumber dll- Kesetaraan antar sub bab : Satuan/kumpulan	

Malang, Juni 2015

Mengetahui,

Pembimbing I,



Maria C. Endarwati, ST, MIUEM

Pembimbing II,



Agung Witjaksono, ST, MT



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Hasil tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 JUNI 2015

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : HALIMURRAHMAN
NIM : 10.24.056

Perbaikan tersebut meliputi :

- Semua data ada sumbernya ✓
- Keseluruhan sub bab mis: Kesimpulan vs Lap. Akhir / Bab terakhir / E.H
- Pd bab Analisis banyak yg selarasnya
- Teori yg dipakai?
- ↓ Metode yg digunakan vs bab 2 mis: SPSS.

Aspirasi perbaikan

- Cita
- Tujuan
- Misi

→ kembangkan → manfaat besar / Hasil yg ada diteliti

• ~~Dasar Pemukiman~~ → Aspirasi → Hasil (juga) ~~komponen~~

Aspirasi
Dasar Pemukiman → Variabel → Analisis → Hasil !!!

Dosen Penguji

ARIEF SETYAWAN, ST, MT



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Hasil tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 JUNI 2015

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : HALIMURRAHMAN
NIM : 10.24.056

Perbaikan tersebut meliputi :

1. dasar perencanaan → kor.
2. lengkap data di analisis
3. Analisis aspirasi dan permasalahan
4. Pemusatan di corb vi terbantu

Dosen Penguji

IR. A. NURUL HIDAYATI, MTP



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Hasil tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : KAMIS
Tanggal : 25 JUNI 2015

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : HALIMURRAHMAN
NIM : 10.24.056

Perbaikan tersebut meliputi :

- Tugas akhir bukan merupakan suatu proyek tapi merupakan analisa kental yg didapat pada kuliah ; namun dapat diteliti karena memuatkan teoritis pd proses aspirasi masyarakat
- Aspirasi → teori vs aplikasi ; konsistensi
- Fakta wajib punya sumber → indikator, sumber, dll
- Kesetaraan antar sub bab → satuan / kumpulan
- Dasar dari pemekaran ? sbg landasan penelitian
- Penggunaan variabel penelitian vs dasar / landasan penelitian
- Latar belakang utk dilakukan pemekaran (hal 24 ?)
- Variabel Aspirasi Masyarakat apa saja ?
↳ analisis tabel hasil kuisioner dianalisis / table ?
- Penarikan kesimpulan → sekuat dg tujuan dan sasaran!
- Kelengkapan → kurang / lebih / dipertahankan !
→ di kesimpulan jelaskan !

Dosen Pembimbing

MARIA C. ENDARWATI, ST, MIUM



AlhamduLiLLahirobbiL'aLamin.....

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan saya untuk menikmati hidup yang berharga ini sampai saya bisa menikmati kerasnya perkuliahan di pLanoLogi...

Bapak dan ibu.... makasih banyak atas kasih sayang dan cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya samapi saya bisa menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ITN Malang, Saudara/i ku yang selalu memberikan semangat di setiap langkah ku, Makasih buat Kakak pertama ku Sertu M. Fadlurrahman, Kakak kedua ku Taufiqurrahman dan adik ku yang terakhir Zukhriyah. Love U All.....

Buat adekQ sayang.... makasih udah berikan semangat n doa untuk abank selama ini... karena omelan adekQ selama ini sehingga abank bisa menyelesaikan skripsi. Hehehe.....

Buat keluarga besar PLANO REVOLUTION '10

Buat sahabat-sahabat yang sudah bersama selama ini, berjuang bersama-sama di planologi. Banyak hal yang kita lalui bersama-sama baik suka maupun duka dan pengalaman hidup yang takkan pernah bisa dilupakan. "Buka Semangat Baru" Plano Revolution....Kita Satu Team.....

Untuk keluarga besar PLANOLOGI ITN MALANG dari mulai dosen, kakak-2, adik-2, bu puji, bu narsih dan semuanya.... terima kasih sudah menjadi keluarga di kampus bagi kita semua dan memberikan berbagai pelajaran dan pengaruh-pengaruh positif untuk kita dalam segala hal. Terutama untuk Bu Maria dan Pak Agung yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan tugas akhir saya yang terhitung ngebut tapi dengan hasil yang cukup memuaskan. Tanpa kalian semua, saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang inii... Terima Kasih

Tidak lupa pula ucapakan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang yang berjasa dalam hidup saya yaitu Pak End dan Pak Andung (HNR) yang sudah membantu saya, putra, nata dan dosen tercinta Pak Koko melewati perkara hukum.

Dan untuk semua yang telah membantu saya dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu... terima kasih banyak ...

